



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UJIAN NASIONAL
PADA JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
DI KOTA JAKARTA PUSAT**

TESIS

**MUSTOFIK SLAMET
0906589614**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI
JAKARTA
DESEMBER 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UJIAN NASIONAL
PADA JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
DI KOTA JAKARTA PUSAT**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam
bidang administrasi (M.A.)**

**MUSTOFIK SLAMET
0906589614**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI
KEKHUSUSAN ADMINTRASI DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN
JAKARTA
DESEMBER 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

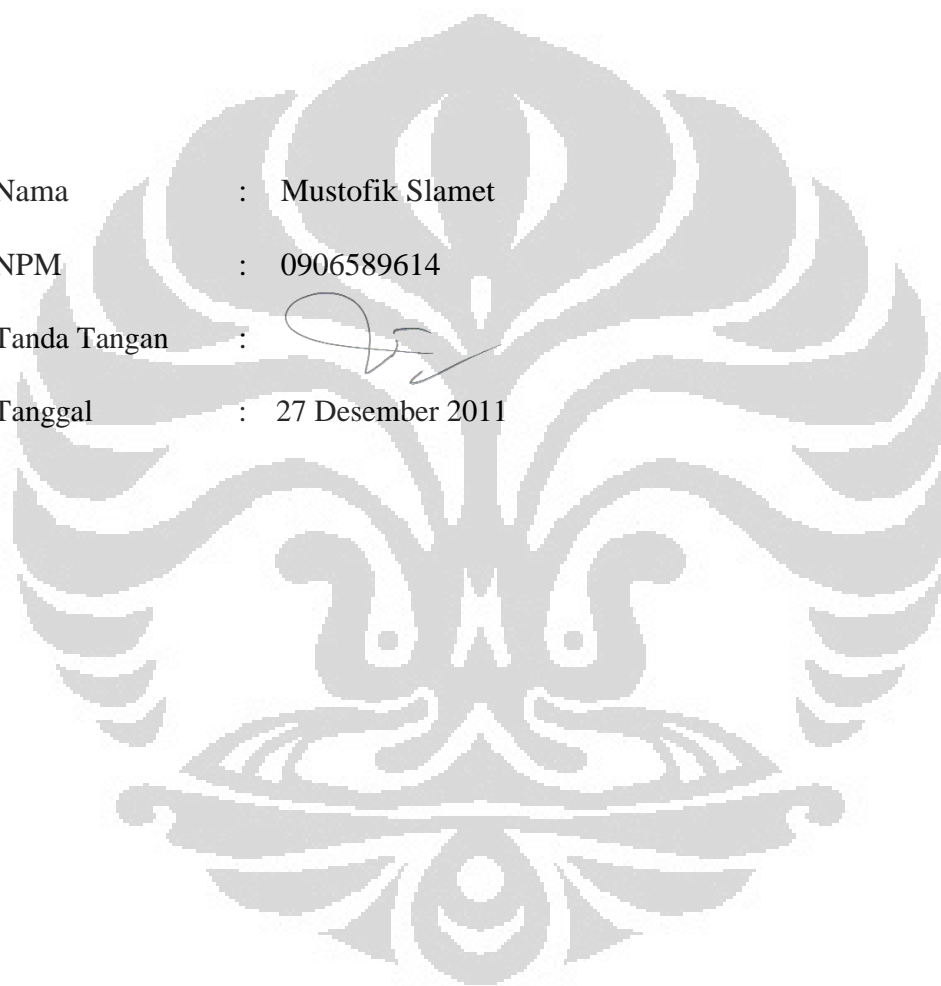
Nama : Mustofik Slamet

NPM : 0906589614

Tanda Tangan :



Tanggal : 27 Desember 2011



**UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN**

LEMBAR PERSETUJUAN

NAMA : Mustofik Slamet
NPM : 0906589614
JUDUL TESIS : Analisis Implementasi Kebijakan Ujian Nasional Pada Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Jakarta Pusat

Telah Disetujui
Pembimbing

(Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M.Si)

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Mustofik Slamet
NPM : 0906589614
Program Studi : Ilmu Administrasi
Judul Tesis : Analisis Implementasi Kebijakan Ujian Nasional
Pada Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di
Kota Jakarta Pusat

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar M.A. (Magister Administrasi) pada Program Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Prof. Dr. Masliana Bangun Sitepu
Pembimbing : Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M.Si.
Penguji : Prof. Dr. Azhar Kasim, MPA
Sekretaris : Drs. Achmad Lutfi, M.Si



Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : Desember 2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu saya, mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, selaku Dekan FISIP Universitas Indonesia.
2. Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M.Si, yang telah dengan ikhlas memberikan bimbingan hingga selesainya penyusunan tesis ini.
3. Prof. Dr. Masliana Bongun Sitepu, Prof. Dr. Azhar Kasim, MPA, dan Drs. Achmad Lutfi, M.Si, selaku Tim Penguji.
4. Seluruh dosen Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Pendidikan yang telah memberikan tambahan ilmu dan wawasan
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Jakarta Pusat, Kepala Sekolah dan Guru SMAN 68 Jakarta, Kepala Sekolah dan Guru SMA Triwibawa Jakarta, Kepala Sekolah dan Guru SMA Dwi Saka Jakarta, yang telah memberikan waktu berharganya untuk memberikan informasi yang penulis butuhkan untuk penyelesaian tesis ini.
6. Sekretariat Ditjen Manajemen Dikdasmen yang telah memberikan kesempatan saya untuk mengenyam pendidikan S2.
7. Keluarga besar di Pematang dan Lampung (Ibunda, Bapak dan Ibu Mertua serta Saudaraku), yang telah memberikan dukungan baik itu do'a maupun dukungan moril dan materil.
8. Istri tercinta Dwi Christiyani, dan anak-anaku tersayang, Baghiz MC, Shaka MC dan Makeina MC, yang telah memberikan banyak doa dan dukungan.
9. Keluarga besar Bagian Perencanaan dan Penganggaran Setditjen Dikdas.
10. Rekan-rekan di kelas Pendidikan angkatan I. dan II.

11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, teman-teman, kerabat, yang telah mensupport dan men do'akan penulis hingga tesis ini dapat terselesaikan.

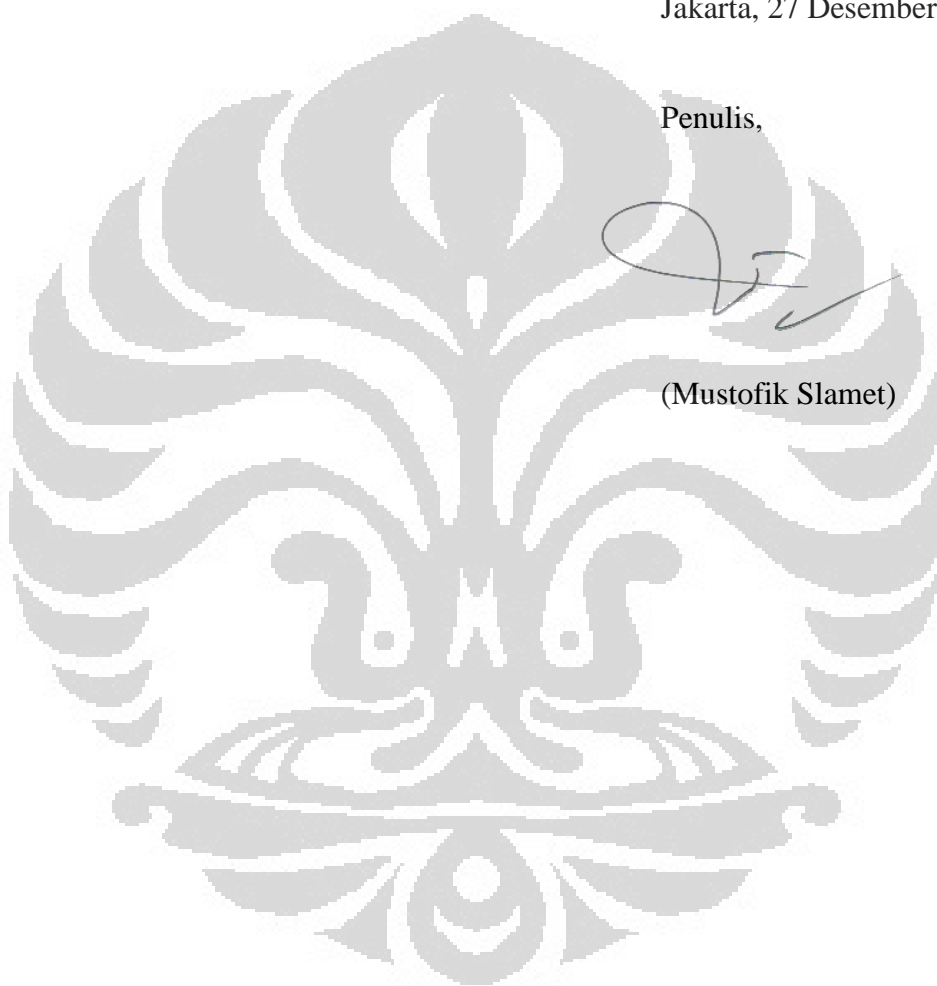
Akhir kata, penulis mengucapkan permohonan maaf atas segala kekurangan dalam tesis ini. Semoga tesis ini dapat membawa manfaat

Jakarta, 27 Desember 2011

Penulis,



(Mustofik Slamet)



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Nama : Mustofik Slamet
NPM : 0906589614
Program Studi : Ilmu Administrasi
Kekhususan : Ilmu Adminstrasi dan Kebijakan Pendidikan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Non-exclusive Royalty – Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Analisis Implementasi Kebijakan Ujian Nasional Pada Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Jakarta Pusat”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama ini tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Desember 2011
Yang menyatakan



Mustofik Slamet

ABSTRAK

Nama : Mustofik Slamet
Program Studi: Ilmu Administrasi
Judul : Analisis Implementasi Kebijakan Ujian Nasional pada Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Jakarta Pusat

Tesis ini membahas Analisis Implementasi Kebijakan Ujian Nasional Pada Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Jakarta Pusat. Berdasarkan pendapat para ahli faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan antara lain faktor komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur organisasi. Penelitian ini menggunakan kerangka tersebut.

Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Key informan dalam penelitian ini para narasumber yang berkompeten dibidangnya yang terdiri dari 1 orang Dinas Pendidikan Jakarta Pusat, 3 kepala sekolah dan 12 orang guru yang mata pelajaran yang di Ujian Nasional-kan di lingkungan SMAN 68 Jakarta, SMA Triwibawa Jakarta, SMA Dwi Saka Jakarta. Instrumen yang digunakan adalah pedoman wawancara, dan telaah dokumen.

Hasil penelitian secara umum menunjukkan, bahwa implementasi kebijakan ujian nasional di SMAN 68 Jakarta sudah berhasil dengan baik. Terbukti dari hasil wawancara dan dokumentasi dikumpulkan, Namun kondisi yang ada di SMA Triwabawa dan SMA Dwi Saka jauh berbeda meskipun komunikasi yang terjalin antara pejabat dinas pendidikan, kepala sekolah dan guru sudah terjalin dengan cukup baik tetapi untuk sumber daya dan sarana prasarana masih sangat minim., kualitas pelaksanaan juga masih perlu ditingkatkan dan koordinasi dan sosialisasi dalam struktur birokrasi masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka perlu upaya agar implementasi kebijakan kebijakan ujian nasional di SMAN 68 Jakarta, SMA Triwibawa Jakarta, SMA Dwi Saka Jakarta berhasil dengan baik. Oleh karena itu, perlu diperhatikan faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor sikap pelaksana dan faktor struktur birokrasi.

Kata Kunci: Analisis Kebijakan Ujian Nasional

ABSTRACT

Name : Mustofik Slamet
Study Program : Administration Science
Title : Analysis Implementation of national examination policy in Senior High School level, Central Jakarta

This thesis discusses about the analysis implementation of national examination policy in Senior High School level, Central Jakarta. Based on the experts' opinions, the influenced factors in the policy implementation itself are communication, resources, practitioner's attitude and organization structure. This research uses those frameworks.

This research is descriptive qualitative type using interview and documentation method. The key informants in this research are the sources who are competent in their fields, consisting of one person from education ministry officer Central Jakarta, three principals and twelve teachers whose their subjects are examined in national examination at around SMA 68 Jakarta, tribawa Jakarta, SMA Dwi Saka Jakarta. The used instruments themselves are interview guide and document review.

The result of this research generally indicates that the implementation of national examination policy in SMA 68 has worked well. It can be proved with the interview result and collected documentation, however the condition in SMA tribawa Jakarta and SMA Dwi Saka Jakarta is absolutely different even though the communication between local education officers, principals and the teachers has been established good enough. But for resources and facilities are still minimal. The quality implementation itself still needs to be improved also the coordination and socialization (dissemination) in bureaucratic structure are still needs to be improved too.

Based on those issues above, it needs the efforts in order to the national examination policies in SMA 68 Jakarta, tribawa Jakarta, SMA Dwi Saka Jakarta work well. Therefore, it is important to consider the factors such as communication, resources, practitioner's attitude and bureaucratic structure

Key word : analysis of national examination policy

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Sistematika Penulisan Penelitian.....	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Kebijakan Publik	9
2.2. Implementasi Kebijakan Publik	10
2.2.1. Konsep Implementasi Kebijakan Publik.....	10
2.2.2. Model-Model Implementasi Kebijakan	18
2.3. Standar Penilaian Pendidikan	25
2.4. Kebijakan Ujian Nasional.....	28
2.5. Kerangka Pemikiran	32
2.6. Operasionalisasi Konsep	34
BAB 3 METODE PENELITIAN	36
3.1 Pendekatan Penelitian.....	36
3.2 Tipe penelitian.....	36
3.3 Sumber Data.....	37
3.4 Teknik Analisis Data.....	37
BAB 4 GAMBARAN UMUM HASIL PENELITIAN	39
4.1. Deskripsi Empiris SMAN 68 Kota Jakarta Pusat.....	39
4.1.1 Gambaran Umum SMAN 68 Jakarta	39
4.1.2 Visi dan Misi, SMA Negeri 68 Jakarta	40
4.1.3 Keadaan Siswa	41
4.1.4 Prestasi Siswa.....	41
4.1.5 Ekstrakurikuler.....	43
4.1.6 Sumber Daya Manusia	44
4.1.7 Sarana dan Prasarana.....	46
4.2. Deskripsi Empiris SMA Triwibawa Jakarta.....	48
4.2.1 Gambaran Umum SMA Triwibawa Jakarta.....	48
4.2.2 Visi dan Misi, SMA Triwibawa Jakarta.....	49
4.2.3 Keadaan Siswa	49

4.2.4 Prestasi Siswa.....	50
4.2.5 Ekstrakurikuler.....	50
4.2.6 Sumber Daya Manusia	50
4.2.7 Sarana dan Prasarana.....	53
4.3. Deskripsi Empiris SMA Dwi Saka Jakarta.....	54
4.3.1 Gambaran Umum SMA Dwi Saka Jakarta	54
4.3.2 Visi dan Misi, SMA Dwi Saka Jakarta	54
4.3.3 Keadaan Siswa	55
4.3.4 Prestasi Siswa.....	55
4.3.5 Ekstrakurikuler.....	55
4.3.6 Sumber Daya Manusia	56
4.3.7 Sarana dan Prasarana.....	58
BAB 5 ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
5.1 Implementasi Kebijakan Ujian Nasional.....	63
5.1.1 Permasalahan Implementasi Kebijakan Ujian Nasional di Sekolah	66
5.2 Hasil Penelitian.....	68
5.2.1 Keadaan Informan dan Responden Penelitian	68
5.2.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Ujian Nasional pada Jenjang Sekolah Menengah Atas.....	72
a. Faktor Komunikasi.....	73
b. Faktor Sumber Daya	81
c. Faktor Sikap/Disposisi	93
d. Faktor Struktur Birokrasi	100
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN	107
6.1 Kesimpulan.....	107
6.2 Saran.....	107
DAFTAR REFERENSI	1
LAMPIRAN.....	5

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Operasionalisasi Konsep.....	35
Tabel 2 : Keadaan Siswa SMAN 68 Jakarta Tahun 2009/2010.....	41
Tabel 3 : Prestasi Akademik SMAN 68 Jakarta Tahun 2009/2010	42
Tabel 4 : Prestasi Non Akademik SMAN 68 Jakarta Tahun 2009/2010	43
Tabel 5 : Keadaan Tenaga Pendidik SMAN 68 Jakarta Tahun 2009/2010	46
Tabel 6 : Keadaan Tenaga Kependidikan SMAN 68 Jakarta Tahun 2009/2010	46
Tabel 7 : Keadaan Sarana Prasarana SMAN 68 Jakarta Tahun 2009/2010.....	47
Tabel 8 : Keadaan Siswa SMA Triwibawa Jakarta Tahun 2009/2010	49
Tabel 9 : Keadaan Tenaga Pendidik SMA Triwibawa Jakarta Tahun 2009/2010	52
Tabel 10 : Keadaan Tenaga Kependidikan SMA Triwibawa Jakarta Tahun 2009/2010.....	52
Tabel 11 : Keadaan Sarana Prasana SMA Triwibawa Jakarta Tahun 2009/2010.....	53
Tabel 12 : Keadaan Siswa SMA Triwibawa Tahun 2009/2010.....	55
Tabel 13 : Keadaan Tenaga Pendidik SMA Dwi Saka Jakarta Tahun 2009/2010.....	58
Tabel 14 : Keadaan Tenaga Kependidikan SMA Dwi Saka Jakarta Tahun 2009/2010.....	58
Tabel 15 : Keadaan Sarana Prasana SMA Dwi Saka Jakarta Tahun 2009/2010	59
Tabel 16 : Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009/2010	61
Tabel 177 Daftar Peserta Ujian SMA N 68 Jakarta, SMA Triwibawa Jakarta, SMA Dwi Saka Jakarta	71
Tabel 188 Daftar Nilai Ujian Nasional SMAN 68 Jakarta, SMA Triwibawa, SMA Dwi Saka Tahun Pelajaran 2009/2010	71
Tabel 19 : Ringkasan	103
Tabel 20 : Perbandingan Hasil Analisis Kebijakan Ujian Nasional Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) Yang Menjadi Obyek Penelitian.....	104

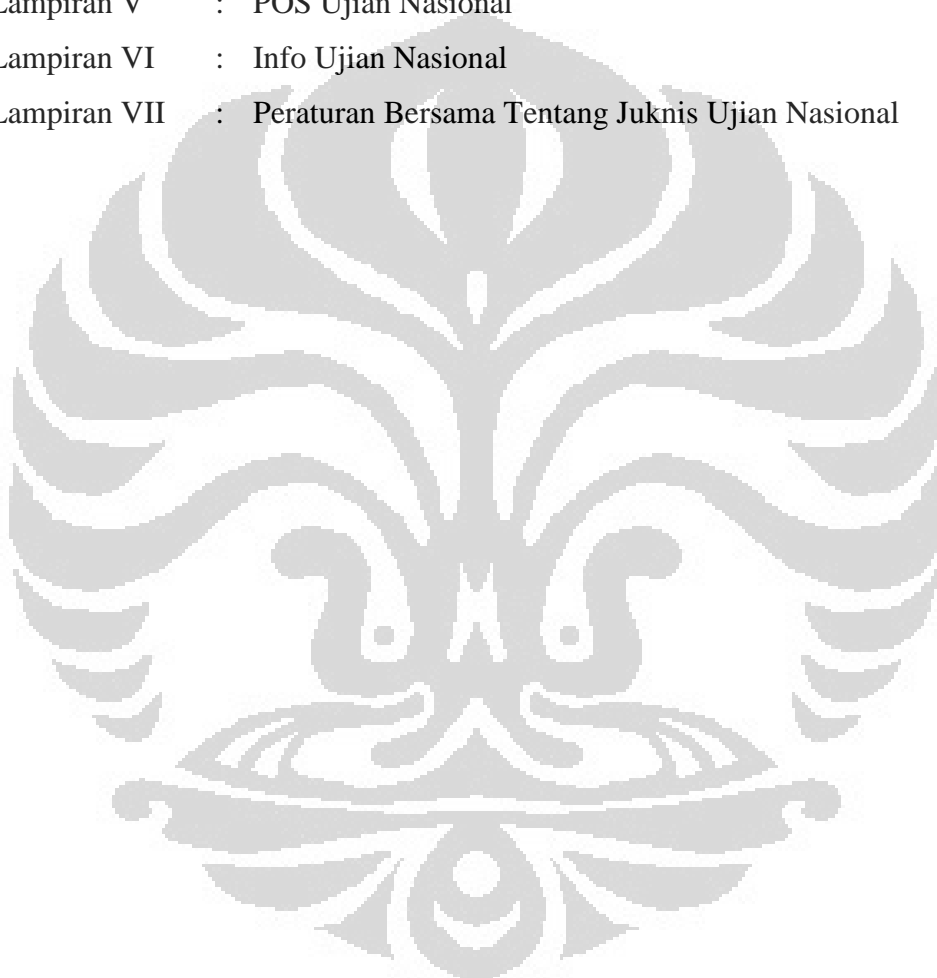
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Model Implementasi Kebijakan Menurut Grindle	14
Gambar 2 : Model Implementasi Kebijakan Menurut Edwards III	20
Gambar 3 : Alur Komunikasi Pelaksanaan Ujian Nasional	74
Gambar 4 : Sosialisasi Ujian Nasional oleh Dinas Pendidikan Jakarta Pusat.....	77
Gambar 5 : Panitia dan Pengawas Ujian Nasional di SMAN 68 Jakarta.....	78
Gambar 6 : Raker Guru dan Karyawan SMAN 68 Jakarta.....	83
Gambar 7 : Sarana Prasarana SMAN 68 Jakarta	87
Gambar 8 : Sarana Prasarana SMA Triwibawa Jakarta.....	88
Gambar 9 : Sarana Prasarana SMA Dwi Saka Jakarta.....	89



Lampiran

- Lampiran I : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran II : Pedoman Wawancara dan Dokumentasi
- Lampiran III : Transkrip Wawancara
- Lampiran IV : Perundang-undangan
- Lampiran V : POS Ujian Nasional
- Lampiran VI : Info Ujian Nasional
- Lampiran VII : Peraturan Bersama Tentang Juknis Ujian Nasional



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Krisis ekonomi yang berkembang menjadi krisis multidimensional yang berkepanjangan merupakan salah satu indikator mutu sumber daya manusia (SDM) yang masih rendah. Rendahnya mutu SDM ini terkait, antara lain, dengan rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan mutu pendidikan di tanah air. Kondisi-kondisi tersebut berdampak langsung terhadap daya saing bangsa dalam pergaulan internasional.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bangsa Indonesia hingga kini masih belum menggembirakan. Berdasarkan laporan UNDP terbaru, IPM bangsa Indonesia berada di peringkat ke-108 dari 177 negara Indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia semakin menurun dalam dua tahun terakhir. Jika pada 2007 berada di peringkat 107 dari 177 negara, pada 2009 menurun menjadi peringkat ke 111. Angka ini jauh di bawah negara-negara ASEAN.

Sejumlah studi yang terkait dengan kinerja pendidikan juga menunjukkan bahwa mutu pendidikan di Indonesia masih memprihatinkan. Studi yang dilakukan oleh Moegiadi (1976) dan Suryadi (1989) memperlihatkan bahwa tingkat penguasaan siswa kelas 6 SD pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA pada tahun 1976 adalah 35, 33, dan 37, kemudian turun menjadi 27,7, 21,5, dan 24,2 pada tahun 1989 (Tim UPI, 2004). Studi lain yang dilakukan oleh IAEA (*International Association for the Evaluation of Educational Achievement*) menunjukkan bahwa skor kemampuan membaca siswa kelas 6 SD di Indonesia adalah 51,7 sementara Hongkong, Singapura, Thailand dan Filipina, secara berturut-turut adalah 75,5, 74,0, 65,1, dan 52,2. Hasil yang serupa juga dilaporkan oleh *Third International Mathematics and Science Study - Repeat* (TIMSS-R, 1999) yang menunjukkan bahwa diantara 38 negara peserta, prestasi siswa berusia 14 tahun (kelas II SLTP) Indonesia berada pada peringkat 34 pada bidang matematika dan 32 pada bidang IPA (Mardapi, 2001).

Kondisi mutu pendidikan (prestasi belajar) dan IPM di atas memberikan gambaran tentang kemampuan bangsa Indonesia dalam persaingan global. Gambaran tersebut merupakan bukti yang lebih dari cukup bagi bangsa Indonesia untuk memacu mutu pendidikannya dan meningkatkan kesempatan seluruh warga negaranya memperoleh pendidikan yang bermutu.

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia dan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Menyadari pentingnya proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka Pemerintah telah berupaya mewujudkan amanat tersebut melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang lebih berkualitas melalui pengembangan dan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya. Tetapi kenyataan belum cukup dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satu indikator kurang berhasil ini antara lain ditunjukkan dengan menurunnya tingkat kelulusan siswa khususnya pada jenjang sekolah menengah atas.

Pemerintah juga telah berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui reformasi bidang pendidikan dengan memberlakukan desentralisasi pendidikan seiring dengan otonomi daerah dengan memfokuskan manajemen berbasis sekolah yang berorientasi pada mutu di era desentralisasi pendidikan. Makna mutu ditekankan pada kemandirian dan kreativitas sekolah untuk mempermudah pencapaian tujuan pendidikan. Manajemen Berbasis Sekolah juga merupakan salah satu wujud dari reformasi pendidikan yang menawarkan kepada sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi siswa. Hal ini juga berpotensi untuk meningkatkan kinerja staf, menawarkan partisipasi langsung kepada kelompok-kelompok terkait, dan meningkatkan pemahaman kepada masyarakat terhadap pendidikan. Tujuan utama penerapan MBS pada intinya adalah untuk penyeimbangan struktur kewenangan antara sekolah, pemerintah daerah pelaksanaan proses dan pusat sehingga manajemen menjadi lebih efisien.

Evaluasi, khususnya ujian nasional, memegang peranan strategis dalam manajemen mutu pendidikan. Ujian pada akhir satuan pendidikan merupakan strategi peningkatan mutu pendidikan yang banyak dipilih dan digunakan oleh negara-negara berkembang yang sumber dayanya relatif terbatas (Heyneman & Ransom, 1992). Ujian yang direncanakan dan dilakukan dengan baik akan mampu menyediakan informasi yang mendorong dan memacu terjadinya peningkatan mutu pendidikan secara terus menerus. Oleh karena itu, walaupun banyak dikritik dan dikecam, ujian di akhir sekolah menengah bukan hanya terus berlangsung akan tetapi terus berkembang di berbagai negara, seperti Inggris, Jerman, Amerika Serikat, Italia, Perancis, dan Spanyol (Olmedilla, 1992; Tindal, 2002).

Kebijakan Ujian Nasional merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka memacu peningkatan mutu pendidikan. Ujian Nasional selain berfungsi untuk mengukur dan menilai pencapaian kompetensi lulusan dalam mata pelajaran tertentu, serta pemetaan mutu pendidikan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, juga berfungsi sebagai motivator bagi pihak-pihak terkait untuk bekerja lebih baik guna mencapai hasil ujian yang baik. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya Ujian Nasional, siswa terdorong untuk belajar lebih baik dan guru terdorong untuk mengajar lebih baik pula.

Dari perspektif yang lain, informasi tentang peta hasil Ujian Nasional dapat digunakan sebagai umpan balik bagi semua pihak terkait dalam rangka memperbaiki kinerjanya masing-masing. Oleh karena itu, peta hasil Ujian Nasional merupakan bahan informasi yang perlu dikaji secara mendalam oleh semua pihak dalam rangka memperbaiki pembelajaran dan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Meskipun pelaksanaan Ujian Nasional (UN) selalu diwarnai pro dan kontra sejak dikeluarkannya pada tahun 2003 hingga sampai sekarang dan bahkan beberapa kalangan pemerhati pendidikan menyarankan penghapusan Ujian Nasional (UN). Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) menegaskan UN pada tahun ajaran 2009/2010 tetap dilaksanakan sesuai jadwal. Penegasan ini disampaikannya untuk menghentikan polemik di tengah masyarakat, karena Ujian Nasional (UN) sesuai dengan landasan hukum yaitu Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

Pasal 58 ayat (2): “Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan, Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 75 tahun 2009 tentang Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun Pelajaran 2009/2010. Perhelatan nasional yang baru saja terjadi adalah pengumuman hasil Ujian Nasional untuk tingkat SMA pada akhir bulan April 2010, Secara nasional tingkat kelulusan tahun 2010 ini menurun, dan lebih mengejutkan lagi salah satunya di provinsi DKI Jakarta mengalami penurunan sangat dratis, karena daerah tersebut biasanya menduduki peringkat atas.

Permasalahan yang muncul berkaitan dengan kebijakan Ujian Nasional di sekolah antara lain adalah adanya kesenjangan koordinasi antara dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota dengan sekolah, kesenjangan terjadi ketika melakukan komunikasi serta pengadministrasian, sehingga seringkali terjadi kekurangan soal, kekurangan lembar jawaban yang sebenarnya sudah dilaporkan melalui data-data Ujian Nasional yang dibuat sekolah dan di setorkan ke dinas pendidikan masing-masing kota dan kabupaten, untuk selanjutnya di kumpulkan di dinas pendidikan provinsi dan dilaporkan ke pusat, dengan pola demikian seharusnya terjadi koordinasi yang baik, namun kurang terampilnya sumber daya manusia serta tidak rasionalnya petugas yang terlibat memungkinkan terjadinya permasalahan tersebut. Hal lain terjadi berkaitan dengan kultur birokrasi organisasi pemerintah daerah dengan dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota.

Peningkatan peran dan alih tanggung jawab dalam implementasi kebijakan Ujian Nasional di sekolah sangat dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal pemerintahan daerah sebagai fokus tempat terselenggaranya ujian nasional, sehingga keberhasilan pemerataan dan perluasan pendidikan menengah tersebut akan sangat ditentukan oleh optimalisasi dan upaya strategis dan sinergis dari

pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap faktor-faktor yang mempengaruhinya yang didukung oleh dukungan dana yang memadai dari pemerintah, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Hal ini tidak langsung bisa berjalan seperti apa yang diharapkan atau semudah seperti apa yang dibayangkan, karena akan terkait dengan faktor-faktor ekonomi, sosial, politik, budaya dan karakteristik wilayah serta faktor-faktor lain yang berkaitan dengan individu kepemimpinan daerah dan respon *stakeholders* pendidikan.

Ketidakmudahan tersebut muncul berkaitan dengan variabel-variabel yang berasal dari kebijakan itu sendiri dan bertambah besar oleh pengaruh-pengaruh variabel dari lingkungan luar kebijakan. Variabel-variabel yang berasal dari kebijakan itu sendiri adalah ketidakmampuan kebijakan dalam menstrukturkan secara tepat proses implementasi, antara lain : (1) adanya permasalahan yang kurang tegas dan *inkonsistensi* dalam menetapkan prosedur teknis dan petunjuk pelaksanaan operasional kebijakan Ujian Nasional, antara pusat, provinsi hingga kerayon sekolah; (2) tidak tepatnya pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya; (3) longgarnya keterpaduan hirarkhis dalam dan diantara lembaga-lembaga pelaksana; (4) tidak tepatnya rekrutmen pejabat pelaksana; dan (5) adanya akses formal pihak luar. hal ini sering kali muncul dalam pendistribusian dan biaya pelaksanaan yang sering kali tiap daerah berbeda. Misalnya biaya untuk operasional yang terlambat, nominasi yang kurang untuk para pengawas dan sebagainya.

Sedangkan variabel-variabel dari luar kebijakan yang mempengaruhi implementasi kebijakan, antara lain : (1) kondisi dan lokasi sekolah yang berbeda dilihat dari letak sekolah ada yang di kota ada yang di pinggiran, sehingga menghambat transportasi; (2) sikap tidak patuh dan tingkat kepedulian yang rendah dari kelompok sasaran; dan (3) rendahnya komitmen, moral dan kemampuan pejabat-pejabat pelaksana; (4) target pencapaian nilai Ujian Nasional yang dicanangkan oleh pemerintah dirasakan membebani sekolah dan (5) tuntutan masyarakat dalam hal ini orang tua menekan keberhasilan belajar siswa pada Ujian Nasional sebagai sesuatu yang harus, kegagalan seperti sesuatu yang berdosa.

Kondisi tersebut ditunjang oleh permasalahan perbedaan persepsi antara masyarakat, sekolah di dalamnya guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan, dinas pendidikan dan pemerintah tentang kebijakan Ujian Nasional di Sekolah, hal lain berkaitan dengan kekhawatiran orang tua akan kemampuan sekolah dalam menjaga kualitas pembelajaran yang dilakukan guru, kualitas pelayanan pendidikan, kualitas lulusan. Berkaitan dengan pelaku, munculnya persepsi di lingkungan sekolah berkaitan dengan tatacara penyaluran dan pendistribusian soal yang seringkali terlambat dan kurang ke sekolah, atau waktu pengambilan berkas yang terbatas, artinya berkas Ujian Nasional seringkali disimpan di rayon dan diambil ketika akan melaksanakan Ujian Nasional, tanpa mempertimbangkan jarak tempuh dan waktu.

Pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Jakarta Pusat mengalami penurunan hasil pada tingkat kelulusan siswa. Dari informasi yang peneliti dapatkan dari sekolah bahwa penyebab dari permasalahan tersebut yaitu : (1) Jadwal Ujian Nasional dimajukan 2 bulan lebih awal; (2) Standar Kompetensi Lulusan (SKL) untuk Ujian Nasional (kisi-kisi UN) di akhir menjelang pelaksanaan Ujian Nasional; (3) Adanya guru yang belum memahami Standar Kompetensi Lulusan (SKL); (4) Beberapa guru belum optimal dalam mengeksplorasi pembelajaran, Frekuensi try out UN dirasakan masih kurang; (5) Pelaksanaan try out yang diadakan sekolah sangat minim dananya; (6) Sarana dan prasarana di sekolah juga masih dirasakan kurang memadai; (7) Belum optimalnya koordinasi sekolah dan orangtua.

Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat karena terkadang masalah-masalah yang tidak ditemui dalam konsep muncul di lapangan, dimana akan mempengaruhi proses implementasi kebijakan tersebut. Ada banyak faktor atau variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sebuah kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi, dan masing-masing faktor atau variabel tersebut akan saling berhubungan satu sama lain. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini berjudul: ANALISIS KEBIJAKAN UJIAN NASIONAL PADA JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DI KOTA JAKARTA PUSAT.

1.2.Perumusan Masalah

Berdasarkan pemikiran terdapat pada latar belakang, maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana implementasi Kebijakan Ujian Nasional pada Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Jakarta Pusat (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Ujian Nasional pada Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Jakarta Pusat

1.3.Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan (1) menganalisis implementasi kebijakan Ujian Nasional pada Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Jakarta Pusat (2) menganalisis faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi kebijakan Ujian Nasional pada Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Jakarta Pusat

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara akademis maupun praktis.

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan studi bidang pendidikan terutama mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan Ujian Nasional pada Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA).
2. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang dapat digunakan dalam mengambil kebijakan dan keputusan dalam mendukung keberhasilan kebijakan Ujian Nasional pada Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dalam memajukan akses dan mutu pendidikan.
3. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para peneliti untuk melakukan penelitian sejenis dengan ruang lingkup yang lebih luas

1.5.Sistematika Penulisan Penelitian

Sistematika penulisan laporan penelitian ini akan disusun sebagai berikut:

Bab I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi pembahasan teoritis tentang kebijakan publik, kebijakan pendidikan, dan konsep tentang ujian nasional.

Bab III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang pendekatan penelitian, tipe penelitian yang digunakan, teknik pengumpulan data, sumber data dan analisis data hasil penelitian

Bab IV : GAMBARAN UMUM HASIL PENELITIAN

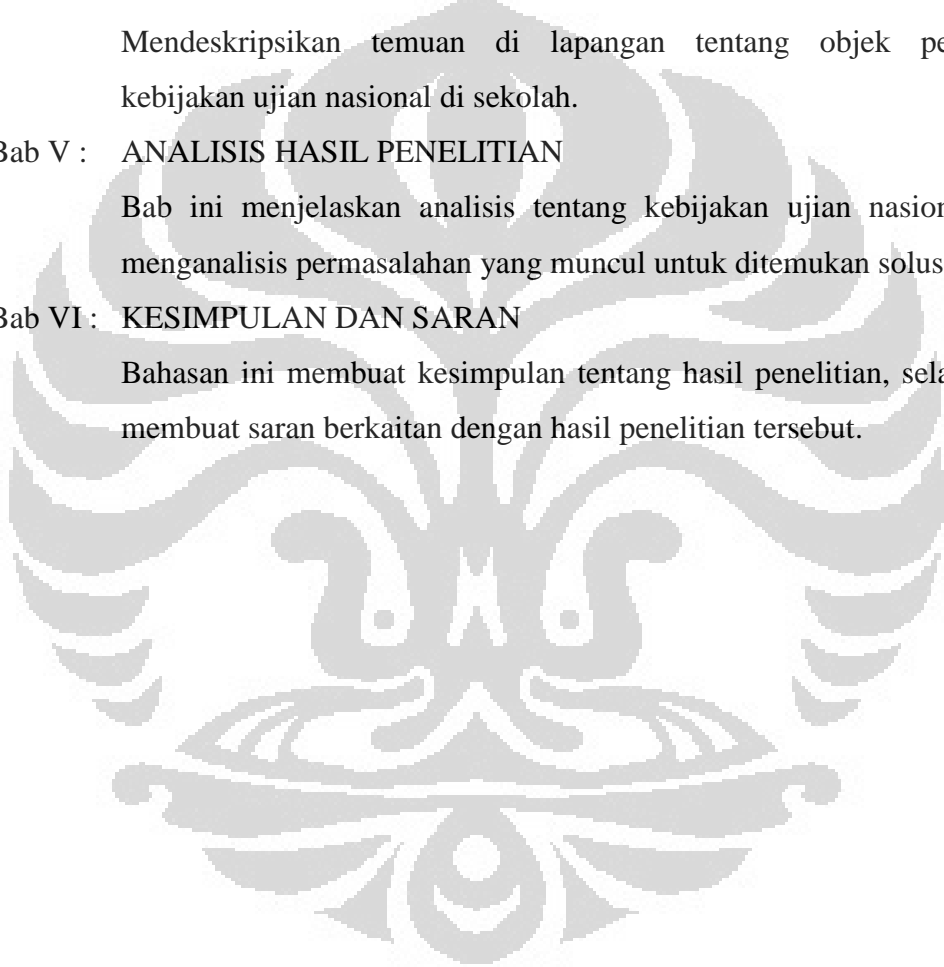
Mendeskripsikan temuan di lapangan tentang objek penelitian kebijakan ujian nasional di sekolah.

Bab V : ANALISIS HASIL PENELITIAN

Bab ini menjelaskan analisis tentang kebijakan ujian nasional, dan menganalisis permasalahan yang muncul untuk ditemukan solusinya.

Bab VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bahasan ini membuat kesimpulan tentang hasil penelitian, selanjutnya membuat saran berkaitan dengan hasil penelitian tersebut.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang berbagai aspek yang akan diteliti, maka pada bab ini yang akan disusun sebagai pendukung kerangka pemikiran dan landasan teori, serta pendapat para ahli yang dikutip dari berbagai sumber literatur. Pembahasan akan difokuskan pada konsep dan teori tentang (1) kebijakan publik (public policy), (2) implementasi kebijakan publik, (3) standar penilaian pendidikan, (4) kebijakan Ujian Nasional (UN) yang menjelaskan kerangka dan perspektif teori yang melandasi penelitian ini.

2.1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik (public policy) mempunyai banyak pemahaman teoritis oleh sejumlah pakar tergantung pada perspektif keilmuan yang bersangkutan. Rian Nugroho dalam bukunya public policy (2009, 83) mengumpulkan beberapa pendapat dari sejumlah pakar tentang definisi kebijakan publik yaitu ; pendapat Harold Laswell dan Abraham Kaplan (Laswell dan Kaplan Power And Society 1970, 71) mendefinisikannya bahwa “public policy is a projected program of goals, values and practices (kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktik-praktik tertentu)”. David Easton (1965, 212) mendefinisikannya sebagai akibat dari aktifitas pemerintah (the impact of government activity). James Anderson (2000, 4) mendefinisikannya sebagai a relative stable, purpose course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern.

James Lester dan Robert Steward (2000, 18) mendefinisikannya sebagai a process or a series or pattern of governmental activities or decision that are design to remedy some public problem, either real or imagined. Austin Steven A. Peterson (2003, 1030) mendefinisikannya sebagai government action to address some problem. B.G. Peters (1993, 4) mendefinisikannya sebagai the sum of

government activities, whether acting directly or through agents, as it has an influence on the lives of citizens. Carl I. Friedrich (1963, 79) mendefinisikannya sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada. Kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Sedangkan Michael Howlett dan M. Ramesh (1995, 7) mengemukakan bahwa public policy is a complex phenomenon consisting of numerous decisions made by numerous individual and organization. It is often shaped by earlier policies and is frequently linked closely with other seemingly unrelated decisions. Thomas R. Dye (1995, 2) mendefinisikannya sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukannya, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda (what government do, why they do it, and what difference it makes).

Dari pemahaman teoritis tersebut, kita dapat merumuskan definisi kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju kepada masyarakat yang dicita-citakan.

2.2. Implementasi Kebijakan Publik

2.2.1. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena di sini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul di lapangan. Selain itu, ancaman utama, adalah konsistensi implementasi. Salah satu faktor yang menentukan sukses atau tidaknya kebijakan adalah kapasitas untuk melaksanakan kebijakan tersebut sesuai dengan yang direncanakan.

Perhatian besar terhadap masalah implementasi kebijakan timbul pada awal tahun 1970-an atau tepatnya sejak diterbitkannya karya Pressman dan Wildavsky yang berjudul *implementation* pada tahun 1973 (Solichin, 2001:60). Kamus Webster merumuskan implementasi secara pendek bahwa *to implement*

(mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effect* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Implikasi dari pandangan ini, maka implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, dan dekrit presiden) (Solichin, 2001:64).

Pressman dan Wildavsky (Solichin, 1997:65) menyatakan bahwa sebuah kata kerja mengimplementasikan itu sudah sepantasnya terkait langsung dengan kata benda kebijaksanaan. Edwards III (1980: 1) menjelaskan implementasi kebijakan sebagai tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhi.

Rumusan lain mengenai implementasi kebijakan dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975:458) yaitu: memberikan batasan terhadap konsep implementasi dengan menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok), pemerintah, atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2008: 147) juga memberi perbedaan antara apa yang dimaksud dengan implementasi kebijakan, pencapaian kebijakan dan apa yang secara umum menunjuk kepada dampak kebijakan. Studi tentang dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan-kebijakan publik mengkaji konsekuensi-konsekuensi dari suatu keputusan kebijakan. Sementara itu, studi tentang implementasi kebijakan menfokuskan diri pada aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menjalankan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, studi kebijakan akan mampu memberi penjelasan terhadap salah satu atau lebih kekuatan-kekuatan yang menentukan dampak kebijakan. Hal ini berarti bahwa implementasi kebijakan hanya merupakan salah satu variabel penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan dalam memecahkan persoalan-persoalan publik.

Jones (dalam Tangkilisan, 2003) menganalisis masalah pelaksanaan kebijakan dengan mendasarkan pada konsepsi kegiatan-kegiatan fungsional. Jones mengemukakan beberapa dimensi dari implementasi pemerintahan mengenai program-program yang sudah disahkan, kemudian menentukan implementasi, juga membahas aktor-aktor yang terlibat dengan memfokuskan pada birokrasi yang merupakan lembaga eksekutor. Jadi implementasi merupakan suatu proses yang dinamis yang melibatkan secara terus menerus usaha-usaha untuk mencari apa yang akan dan dapat dilakukan.

Dengan demikian implementasi mengatur kegiatan-kegiatan yang mengarah pada penempatan suatu program ke dalam tujuan kebijakan yang diinginkan. Tiga kegiatan utama yang paling penting dalam implementasi keputusan adalah:

1. Penafsiran yaitu merupakan kegiatan yang menterjemahkan makna program kedalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan.
2. Organisasi yaitu merupakan unit atau wadah untuk menempatkan program kedalam tujuan kebijakan.
3. Penerapan yang berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, upah dan lain-lain (Tangkilisan, 2003:19).

Setidaknya ada dua hal mengapa implementasi kebijakan pemerintah memiliki relevansi: *Pertama*, secara praktis akan memberikan masukan bagi pelaksanaan operasional program sehingga dapat dideteksi apakah program telah berjalan sesuai dengan yang telah dirancang serta mendeteksi kemungkinan tujuan kebijakan negatif yang ditimbulkan. *Kedua*, memberikan alternatif model pelaksanaan program yang lebih efektif.

Yang perlu ditekankan disini adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan saran-saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut (Winarno, 2002:102).

Berdasarkan pandangan yang diutarakan diatas dapat disimpulkan, bahwa proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan

program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap tujuan kebijakan, baik yang negatif maupun yang positif (Tangkilisan, 2003:19).

Implementasi program dan kegiatan pada awalnya adalah kebijakan publik (*public policy*) yang kemudian diterjemahkan ke dalam program-program nyata yang ditujukan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan publik itu. Makna implementasi menurut Daniel A. Mazmania dan Paul A. Sabatier adalah memahami apa yang senyatanya sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan focus perhatian implementasi kebijakan. (Daniel A.M, 2001: 2).

Implementasi kebijakan merupakan aktivitas pemerintah untuk merealisasikan tujuan-tujuan public (*goals of public policies*) menjadi hasil-hasil yang bisa dilihat. Jadi implementasi kebijakan publik merupakan fungsi dari implementasi program dan yang tergantung daripada hasil-hasil (*outcome*) itu sendiri.

Studi mengenai pelaksanaan kebijakan harus dibedakan dari evaluasi kebijakan (Merille S. Grindle,1980:6) :

“Analisis mengenai pelaksanaan kebijakan (policy implementation) mencoba mempelajari sebagai keberhasilan/kegagalan kebijakan public melalui pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, sedangkan di dalam pelaksanaan kebijaksanaan itu tidak hanya bersifat teknis administratif belaka, tetapi melibatkan juga masalah-masalah politik. Dengan demikian studi mengenai implementasi kebijakan, mencoba menjawab pertanyaan mengapa hal ini terjadi, dan tidak hanya berhenti pada pertanyaan apa yang terjadi.”

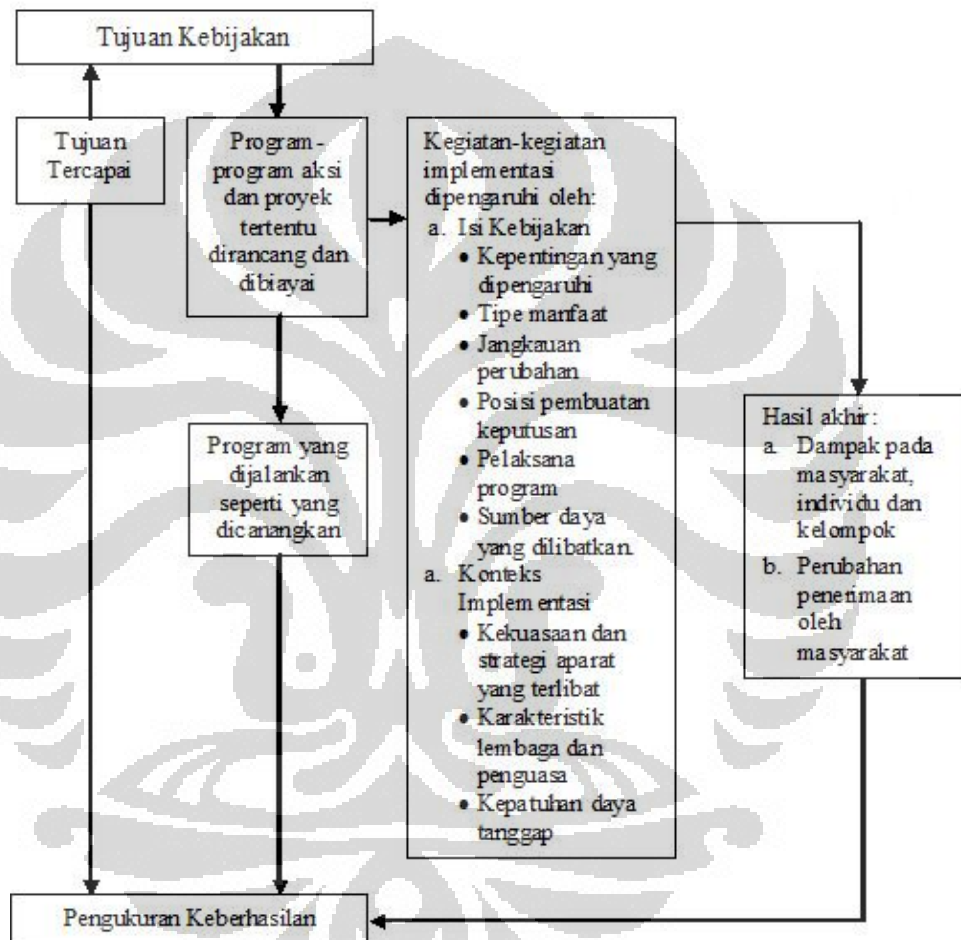
Merille S. Grindle menyatakan bahwa studi implementasi kebijakan publik merupakan usaha untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik serta variable-variabel yang mempengaruhinya.

Menurut Grindle, implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Studi ini melihat adanya tugas dimensi analisis dalam organisasi, yaitu tujuan, pelaksanaan, tugas dan kaitan organisasi dengan lingkungan. Ide dasar Grindle adalah bahwa kebijakan ditransformasikan menjadi

program-program aksi maupun proyek individual dengan biaya yang telah disediakan, maka implementasi kebijakan dapat dilakukan. (Samudra, 1991: 22).

Untuk lebih jelasnya lagi akan digambarkan dalam model sebagai berikut:

Gambar 1 :
Model Implementasi Kebijakan Menurut Grindle



Sumber: Samodra Wibawa, 1994:23

Dari bagian di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Isi Kebijakan:

1. Kepentingan yang dipengaruhi
Kepentingan yang menyangkut banyak kepentingan yang berbeda akan sulit diimplementasikan disbanding yang menyangkut sedikit kepentingan.
2. Tipe manfaat
Suatu kebijakan yang memberikan manfaat dan langsung dapat dirasakan oleh sasaran, bukan hanya formal, ritual, dan simbolis. Akan tetapi kongkrit akan lebih mudah diimplementasikan.
3. Derajat perubahan yang diharapkan
Kebijakan cenderung lebih mudah diimplementasikan jika dampak yang diharapkan dapat memberi hasil yang pemanfaatannya jelas disbandingkan dengan yang bertujuan terjadi perubahan sikap dan perilaku penerima kebijakan.
4. Letak pengambilan keputusan
Kedudukan pembuat kebijakan akan mempengaruhi implementasi, selanjutnya pembuatan kebijakan yang mempunyai kewenangan dan otoritas yang tinggi akan lebih mudah dan mempunyai wewenang dalam pengkoordinasikan organisasi di bawahnya.
5. Pelaksana program
Keputusan siapa yang akan ditugasi untuk mengimplementasikan program yang ada dapat mempengaruhi proses implementasi dan hasilnya. Dalam hal ini tingkat kemampuan, keefektifan, dan dedikasi yang tinggi akan berpengaruh dalam prosesnya.
6. Sumber daya yang dilibatkan
Sumber daya yang digunakan dalam program, bentuk dasar, dan asal sumber daya akan menentukan implementasi dan keberhasilan kebijakan.

Konteks Implementasi:

1. Strategi yang digunakan dalam proses, kekuasaan, dan badan pelaksana ataupun elit politik dan penguasa setempat akan mempengaruhi implementasi kebijakan.

2. Kondisi dan keberadaan badan pelaksana yang didukung otoritas penguasa akan berpengaruh.
3. Kepatuhan dapat berupa dukungan elit politik, kesediaan instansi pelaksanaan program, juga kepatuhan masyarakat penerima manfaat/sasaran program. Sedangkan daya tanggap berupa kepekaan lembaga publik seperti birokrasi terhadap kebutuhan atau permasalahan yang timbul dari implementasi kebijakan.

Rumusan Kebijakan menurut Edward III ada 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi. Faktor-faktor tersebut bekerja secara simultan dan berinteraksi antara satu dan yang lainnya, untuk membantu bahkan menghambat implementasi kebijakan. Keempat faktor yang dimaksud tersebut adalah: (George E. Edward, 1980: 9-12). Muhajir Darwin (1992) mengemukakan:

“Proses implementasi bukanlah proses mekanisme di mana setiap aktor akan secara otomatis melakukan apa saja yang seharusnya dilakukan sesuai dengan skenario pembuat kebijakan, tetapi merupakan proses kegiatan yang acapkali rumit, diwarnai pembentukan kepentingan antar aktor yang terlibat baik sebagai administrator, petugas lapangan atau sekelompok sasaran.”

Sementara menurut Abdul Wahab Solichin suatu proses implementasi kebijakan merupakan keseluruhan dari kegiatan atau tindakan-tindakan yang dilakukan baik individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. (Dunn, 2001:52)

Selanjutnya agar tujuan-tujuan kebijakan publik tersebut tercapai kebijakan publik tersebut diterjemahkan ke dalam bentuk program-program dan dilaksanakan ke dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memiliki ciri-ciri operasional seperti:

- a. Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan program tersebut.
- b. Berbagai sasaran yang hendak dicapai
- c. Besarnya biaya yang diperlukan beserta identifikasi sumbernya
- d. Jenis-jenis kegiatan yang akan dilaksanakan

Pada kenyataannya setelah kebijakan tersebut dijalankan hasilnya sering tidak mencapai hasil yang diharapkan, menurut William N. Dunn (2001:52):

“Hasil kebijaksanaan (policy outcome) adalah akibat-akibat yang terjadi dari serangkaian tindakan kebijaksanaan tidak sepenuhnya stabil atau diketahui sebelum tindakan dilakukan; juga tidak semua hasil tersebut terjadi seperti yang diterapkan atau dapat diduga sebelumnya. Perubahan moneter dunia, krisis bahan baker, bencana alam, dan sebagainya membuat rencana melesat atau hasil yang timbul tidak sesuai dengan yang diharapkan.”

Penilaian terhadap kebijakan negara seringkali menunjukkan bahwa kebijakan negara tersebut tidak mencapai hasil atau memperoleh dampak yang diharapkan. Tidak tercapainya tujuan kebijakan ini disebabkan adanya faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Pertama, tersedianya sumber-sumber yang terbatas, baik tenaga, biaya, material, waktu, dan sebagainya, sehingga dampak yang diharapkan tidak tercapai. Banyak program-program pembangunan yang terbengkalai karena kekurangan dan dan sebagainya.
- b. Kedua, kesalahan dalam pengadministrasian kebijaksanaan-kebijaksanaan negara akan mengurangi tercapainya dampak kebijaksanaan negara. Betapapun baiknya isi kebijaksanaan negara, kalau tidak diadministrasikan dengan baik akan sulit mencapai dampak yang diharapkan.
- c. Ketiga, problema-problema publik seringkali timbul karena adanya pelbagai macam faktor, sedangkan kebijaksanaan seringkali dirumuskan hanya atas dasar salah satu dari sejumlah kecil faktor-faktor tersebut.
- d. Keempat, masyarakat memberikan respon atau melaksanakan kebijaksanaan negara dengan cara-caranya sendiri sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan dampaknya.
- e. Kelima, adanya beberapa kebijaksanaan negara yang mempunyai tujuan bertentangan satu sama lain.
- f. Keenam, adanya usaha-usaha untuk memecahkan beberapa masalah tertentu yang memakan biaya lebih besar dari masalah-masalahnya sendiri.
- g. Ketujuh, banyaknya problema-problema publik yang tidak dapat dipecahkan secara tuntas.
- h. Kedelapan, terjadinya perubahan sifat permasalahan ketika kebijaksanaan sedang dirumuskan atau dilaksanakan.

- i. Kesembilan, adanya masalah-masalah baru yang lebih menarik dan dapat mengalihkan perhatian orang dari masalah-masalah yang telah ada.

2.2.2. Model-Model Implementasi Kebijakan

Kemudian dalam rangka untuk mengimplementasikan kebijakan publik ini dikenal dengan beberapa model, antara lain:

a. Model Gogin

Untuk mengimplementasikan kebijakan dengan Model Gogin, maka perlu diidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tujuan-tujuan formal pada keseluruhan implementasi yakni: (1) Bentuk dan isi kebijakan, termasuk di dalamnya kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi, (2) Kemampuan organisasi dengan segala sumber daya berupa dana maupun insentif lainnya yang akan mendukung implementasi secara efektif, dan (3) Pengaruh lingkungan dari masyarakat dapat berupa karakteristik, motivasi, kecenderungan hubungan antar warga masyarakat, termasuk pola komunikasinya.

b. Model Grindle

Grindle menciptakan model implementasi sebagai kaitan antara tujuan kebijakan dan hasil-hasilnya, selanjutnya pada model ini hasil kebijakan yang dicapai akan dipengaruhi oleh kebijakan yang terdiri dari: (1) kepentingan-kepentingan yang dipengaruhi; (2) jenis atau tipe-tipe manfaat yang dihasilkan; (3) derajat perubahan yang diharapkan; (4) letak pengambilan keputusan; (5) pelaksanaan program, dan (6) sumber daya yang dilibatkan. Pengaruh selanjutnya adalah lingkungan yang terdiri dari: kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga penguasa, dan kepatuhan serta daya tanggap.

c. Model Meter dan Horn

Meter dan Horn mengemukakan model implementasi kebijakan yang dipengaruhi oleh enam faktor, yaitu: (1) standar kebijakan dan sasaran yang akan menjelaskan rincian tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh; (2) sumber daya kebijakan berupa dana pendukung implementasi; (3) komunikasi inter organisasi dan aktivitas pengukuran digunakan oleh pelaksana untuk memakai

tujuan yang hendak dicapai; (4) karakteristik pelaksanaan, artinya karakteristik organisasi merupakan faktor krusial yang akan menentukan berhasil tidaknya suatu program; (5) kondisi sosial ekonomi dan politik yang dapat mempengaruhi hasil kebijakan; dan (6) sikap pelaksanaan dalam memahami kebijakan yang akan ditetapkan.

d. Model Deskriptif

William N. Dunn (dalam Tangkilisan, 2003) mengemukakan bahwa model kebijakan dapat diperbandingkan dan dipertimbangkan menurut sejumlah banyak asumsi, yang paling penting di antaranya adalah: (1) perbedaan menurut tujuan; (2) bentuk penyajian; dan (3) fungsi metodologis model. Dua bentuk pokok dari model kebijakan adalah: (1) Model deskriptif; dan (2) Model normatif. Tujuan model deskriptif adalah menjelaskan dan atau meramalkan sebab dan akibat pilihan-pilihan kebijakan. Model kebijakan ini digunakan untuk memonitor hasil tindakan dalam suatu kebijakan misalnya penyampaian laporan tahunan tentang keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan di lapangan.

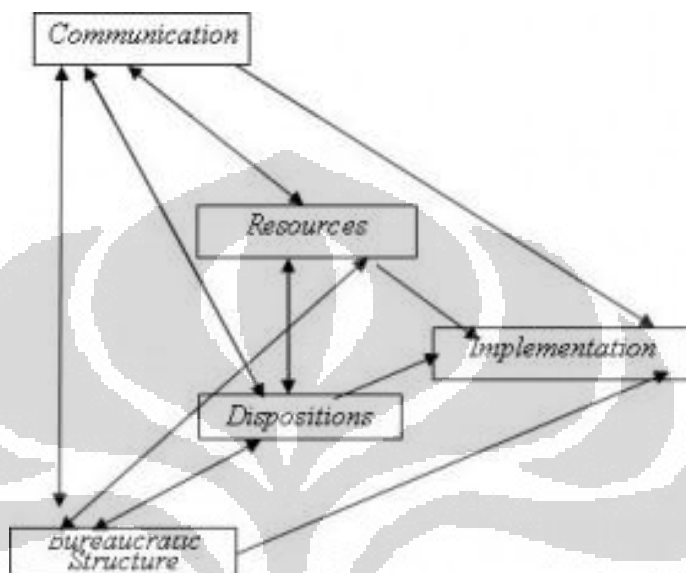
e. Model George Edwards III

Menurut George C. Edwards III, implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang cemerlang mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik. Mengenai hal ini Edwards III (1980: 53) menyatakan bahwa:

Resources can be a critical factor in implementing public policy. Important resources include staff of sufficient size and with the proper skills to carry out their assignment and information, authority and facilities necessary to translate proposals on paper into functioning public services.

Untuk lebih jelasnya lagi akan digambarkan dalam model sebagai berikut:

Gambar 2 :
Model Implementasi Kebijakan Menurut Edwards III



Dari bagian di atas dapat dijelaskan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor yang saling berhubungan satu sama lain, yakni:

1. Komunikasi

Persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah itu dapat diikuti. Tentu saja, komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat. Secara umum Edwards membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan.

Transmisi; sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Hal ini tidak selalu merupakan proses yang langsung sebagaimana tampaknya. Banyak sekali ditemukan keputusan-keputusan tersebut diabaikan atau jika tidak demikian, seringkali terjadi kesalahpahaman terhadap keputusan-keputusan yang dikeluarkan.

Kejelasan; jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksana tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Seringkali instruksi-instruksi yang diteruskan kepada pelaksana-pelaksana kabur dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan. Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal.

Konsistensi; jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik.

2. Sumberdaya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial serta fasilitas-fasilitas. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di atas kertas dan menjadi dokumen saja. Sumber-sumber yang penting meliputi: staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, informasi, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menterjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

a. Staf

Barangkali sumber yang paling penting dalam melaksanakan kebijakan adalah staf. Salah satu hal penting yang harus diingat bahwa jumlah tidak selalu mempunyai efek positif bagi implementasi kebijakan. Hal ini berarti bahwa jumlah staf yang banyak tidak secara otomatis mendorong implementasi yang berhasil.

b. Informasi

Informasi merupakan sumber penting yang kedua dalam implementasi kebijakan. Informasi mempunyai dua bentuk; Pertama, informasi mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan. Pelaksana-pelaksana perlu mengetahui apa yang dilakukan dan bagaimana harus melakukannya. Dengan demikian para pelaksana diberi petunjuk untuk melaksanakan kebijakan. Kedua, data tentang ketaatan personil-personil lain terhadap peraturan-peraturan pemerintah. Pelaksana-pelaksana harus mengetahui apakah orang-orang lain yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan mentaati undang-undang ataukah tidak.

c. Wewenang

Wewenang ini akan berbeda-beda dari suatu program ke program lain serta mempunyai banyak bentuk yang berbeda, seperti misalnya: hak untuk mengeluarkan surat panggilan untuk datang ke pengadilan; mengajukan masalah-masalah ke pengadilan; mengeluarkan perintah kepada para pejabat lain; menarik dana dari suatu program; menyediakan dana, staf dan bantuan teknis kepada pemerintah daerah; membeli barang-barang dan jasa.

d. Fasilitas Fisik

Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. (Subarsono, 2005:90).

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktifitas organisasi tidak fleksibel. Selain itu menurut Edwards, ada dua karakteristik utama dari birokrasi, yakni prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau sering disebut sebagai *standard operating procedures* (SOP) dan fragmentasi.

a. *Standars Operating Procedures* (SOP)

Struktur organisasi-organisasi yang melaksanakan kebijakan mempunyai pengaruh penting pada implementasi. Salah satu dari aspek-aspek struktural paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur kerja ukuran dasarnya (*Standard Operating Procedures*, SOP). Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia. Para pelaksana jarang mempunyai kemampuan untuk menyelidiki dengan seksama dan secara individual setiap keadaan yang mereka hadapi. Sebaliknya, mereka mengandalkan pada prosedur-prosedur biasa yang menyederhanakan pembuatan keputusan dan menyesuaikan tanggung jawab program dengan sumber-sumber yang ada.

Namun demikian, prosedur-prosedur biasa yang dirumuskan pada masa lalu mungkin dimaksudkan untuk menyelesaikan keadaan-keadaan khusus yang berbeda dengan keadaan sekarang sehingga justru akan menghambat perubahan dalam kebijakan karena prosedur-prosedur biasa itu tidak sesuai dengan keadaan-keadaan baru atau program-program baru. SOP sangat mungkin menghalangi implemetasi kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan.

b. Fragmentasi

Sifat kedua dari struktur birokrasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan adalah fragmentasi organisasi. Tanggung jawab bagi suatu bidang kebijakan sering tersebar diantara beberapa organisasi, seringkali pula terjadi desentralisasi kekuasaan tersebut dilakukan secara radikal guna mencapai tujuan-tujuan kebijakan. Kongres dan lembaga-lembaga legislatif lain mencantumkan banyak badan secara terpisah dalam undang-undang agar dapat mengamatinya lebih teliti dan dalam usaha menentukan perilaku mereka. Sementara itu, badan-badan yang ada bertentangan satu sama lain untuk mempertahankan fungsi-fungsi mereka dan menentang usaha-usaha yang memungkinkan mereka mengkoordinasi kebijakan-kebijakan dengan badan-badan yang melaksanakan program-program yang berhubungan. Konsekuensi yang paling buruk dari fragmentasi birokrasi adalah usaha untuk menghambat koordinasi. Fragmentasi mengakibatkan pandangan-pandangan yang sempit dari banyak lembaga birokrasi. Hal ini akan menimbulkan dua konsekuensi pokok yang merugikan bagi implementasi yang berhasil. Pertama, tidak ada orang yang akan mengakhiri implementasi kebijakan dengan melaksanakan fungsi-fungsi tertentu karena tanggung jawab bagi suatu bidang kebijakan terpecah-pecah.

Di samping itu, karena masing-masing badan mempunyai yuridiksi yang terbatas atas suatu bidang, maka tugas-tugas penting mungkin akan terdampar antara retak-retak struktur organisasi. Kedua, pandangan-pandangan yang sempit dari badan-badan mungkin juga menghambat perubahan.

Suatu kebijakan publik dikatakan berhasil bila dalam implementasinya mampu menyentuh kebutuhan kepentingan publik. Pertanyaannya adalah ketika suatu kebijakan tidak lagi memenuhi kepentingan publik, bagaimana bisa disebut sebagai kebijakan yang berhasil? Peters (dalam Tangkilisan, 2003:22) mengatakan bahwa: "Implementasi kebijakan yang gagal disebabkan beberapa faktor, yaitu informasi, di mana kekurangan informasi dengan mudah mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat baik kepada objek kebijakan maupun kepada para pelaksana dari isi kebijakan itu; isi kebijakan, dimana implementasi kebijakan dapat gagal karena masih samarnya isi atau tujuan kebijakan atau ketidaktepatan atau ketidaktegasan intern ataupun ekstern kebijakan itu sendiri; dukungan,

dimana implementasi kebijakan publik akan sangat sulit bila pada pelaksanaannya tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut; pembagian potensi, dimana hal ini terkait dengan pembagian potensi di antaranya para aktor implementasi dan juga mengenai organisasi pelaksana dalam kaitannya dengan diferensiasi tugas dan wewenang.

2.3. Standar Penilaian Pendidikan

Penilaian merupakan rangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan (Suharsimi Arikunto;2009).

Penilaian dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah penilaian berbasis kompetensi, yaitu bagian dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan untuk mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Penilaian dilakukan selama proses pembelajaran dan/atau pada akhir pembelajaran. Fokus penilaian pendidikan adalah keberhasilan belajar peserta didik dalam mencapai standar kompetensi yang ditentukan. Pada tingkat mata pelajaran, kompetensi yang harus dicapai berupa Standar Kompetensi mata pelajaran yang selanjutnya dijabarkan dalam Kompetensi Dasar. Untuk tingkat satuan pendidikan, kompetensi yang harus dicapai peserta didik adalah Standar Kompetensi Lulusan.

Kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kemampuan satuan pendidikan dalam mengelola proses pembelajaran. Penilaian merupakan bagian yang penting dalam pembelajaran. Dengan melakukan penilaian, pendidik sebagai pengelola kegiatan pembelajaran dapat mengetahui kemampuan yang dimiliki peserta didik, ketepatan metode mengajar yang digunakan, dan keberhasilan peserta didik dalam meraih kompetensi yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penilaian, pendidik dapat mengambil keputusan secara tepat untuk menentukan langkah yang harus dilakukan selanjutnya. Hasil penilaian juga dapat memberikan motivasi kepada peserta didik untuk berprestasi lebih baik.

Evaluasi (*evaluation*) adalah penilaian yang sistematis tentang manfaat atau kegunaan suatu objek (Mehrens & Lehmann, 1991). Dalam melakukan

evaluasi terdapat *judgement* untuk menentukan nilai suatu program yang sedikit banyak mengandung unsur subjektif. Evaluasi memerlukan data hasil pengukuran dan informasi hasil penilaian yang memiliki banyak dimensi, seperti kemampuan, kreativitas, sikap, minat, keterampilan, dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam kegiatan evaluasi, alat ukur yang digunakan juga bervariasi bergantung pada jenis data yang ingin diperoleh. Pengukuran, penilaian, dan evaluasi bersifat bertahap (hierarkis), maksudnya kegiatan dilakukan secara berurutan, dimulai dengan pengukuran, kemudian penilaian, dan terakhir evaluasi

Standar penilaian pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari standar nasional pendidikan, oleh karena itu standar penilaian mempunyai peran dan kedudukan yang sangat strategis dan sangat penting dalam dunia pendidikan. Selain itu juga Zaenal Arifin (2009:43), mengemukakan bahwa standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Dengan demikian artinya pemerintah sudah mengatur bagaimana tahap-tahap melakukan penilaian, langkah-langkah operasional yang harus ditempuh oleh pendidik, dan alat yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang proses hasil belajar peserta didik. Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, pelaksanaan penilaian pendidikan dapat dilakukan oleh:

Pertama, pendidik, yaitu tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, dll. **Kedua**, satuan pendidikan, yaitu kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. **Ketiga**, pemerintah, yaitu pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan Nasional. Selanjutnya untuk pendidikan tinggi, penilaian hasil belajar dapat dilakukan oleh pendidik dan satuan pendidikan tinggi, adapun teknis pelaksanaannya dapat diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Di dalam penilaian pendidikan, terdapat penilaian tes sumatif yang peranannya sangat penting, sehingga pedoman penilaian serta kaidah-kaidahnya diatur oleh sistem pendidikan nasional. Adapun mengenai pengukurannya Sumarna Surapranata (2007:36) mengungkapkan, dari segi pelaksanaan dan

penafsiran hasil tes, pengukuran dalam penilaian dibedakan ke dalam tiga kategori, yaitu: 1) acuan norma, 2) acuan kriteria, 3) acuan standar. Acuan norma adalah kemampuan peserta didik dibandingkan dengan kemampuan kelompok. Perbedaan ini dapat digambarkan melalui distribusi normal. Adapun hasil keputusannya yaitu, di atas, sama atau di bawah kelompoknya, yang dilakukan secara normatif berdasarkan kelompok tersebut.

Sementara asumsi yang digunakan dalam acuan kriteria adalah membandingkan kemampuan peserta didik dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria yang digunakan biasanya 75% atau 80%. Sedangkan asumsi yang digunakan dalam acuan standar atau kompetensi adalah membandingkan kemampuan peserta didik dengan standar yang telah ditetapkan. Misalnya dalam kurikulum berbasis kompetensi atau kurikulum 2004, penilaian yang digunakan adalah penilaian yang berdasarkan kompetensi.

Biasanya dalam proses penilaian, guru banyak menggunakan acuan norma, karena prosesnya umum dan sederhana. Pengaplikasiannya pun tidak rumit dan mudah diterka. Berbeda dengan acuan kriteria dan acuan standar, acuan kriteria harus ditetapkan dengan menggunakan presentase, sedangkan acuan standar harus diinterpretasikan dengan standar kompetensi yang sudah ditetapkan. Akan tetapi ketiga acuan penilaian ini harus diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan, karena ketiganya merupakan bagian yang penting dan tidak dapat dipisahkan dari penilaian/evaluasi hasil belajar.

Selain acuan penilaian, ada pula acuan untuk mengolah nilai. Suharsimi Arikunto (2008:241) ada beberapa skala penilaian yang dapat digunakan untuk mengolah nilai, yaitu: (1) skala bebas, (2) skala 1-10, (3) skala 1-100, (4) skala huruf, (5). Skala bebas, artinya dapat menggunakan huruf ataupun angka yang sesuai dengan kehendak penilai, akan tetapi tetap sebelumnya harus diberitahukan terlebih dahulu kepada testee. Skala 1-10 adalah skala yang sering digunakan oleh guru-guru di Indonesia, yakni menggunakan nilai antara rentang 1-10 untuk menilai hasil kerja siswa. Adapun skala 1-100 biasanya digunakan untuk menilai hasil belajar siswa dalam raport. Sedangkan skala huruf yaitu memberi simbol terhadap nilai tertentu dalam bentuk huruf, biasanya huruf yang digunakan adalah

A-E, akan tetapi sebelumnya huruf-huruf tersebut awalnya berupa nilai dengan kriteria tertentu.

Kelima skala penilaian ini sudah umum digunakan oleh guru untuk menilai hasil belajar siswa, sehingga guru tinggal memilih skala pengukuran mana yang cocok untuk digunakan pada situasi dan keadaan tertentu. Akan tetapi para guru tersebut haruslah hati-hati karena penggunaan atau pemberian skor pada tes objektif sangat berbeda dengan penggunaan skor pada tes subjektif. Dengan demikian guru harus memahami kelima skala penilaian tersebut serta pengaplikasiannya.

2.4. Kebijakan Ujian Nasional

Ujian Nasional atau disingkat dengan UN adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik pada beberapa mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan.

Berkaitan dengan kebijakan kebijakan Ujian Nasional, paling tidak terdapat dua persoalan mendasar dalam proses implementasinya yaitu kebijakannya sendiri dan lingkungan kebijakan. Dari aspek kebijakannya sendiri dapat dikaji bahwa kebijakan Ujian Nasional tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka perluasan dan pemerataan pendidikan dasar. Dalam hal ini pendekatan kebijakan adalah pendekatan dari atas (*top down policy*) yang dimaksudkan untuk merubah perilaku lingkungan kebijakan.

Pada dasarnya implementasi kebijakan Ujian Nasional merupakan proses interaksi antara tujuan dan tindakan yang disiapkan untuk memuaskan orang-orang yang terkait di dalamnya. Namun demikian kepentingan kelompok sasaran dalam hal ini masyarakat/orang tua belum bisa diakomodasi dengan memuaskan, sehingga pelaksanaan Ujian Nasional selalu diwarnai pro dan kontra sejak dikeluarkannya pada tahun 2003 hingga sampai sekarang dan bahkan beberapa kalangan pemerhati pendidikan menyarankan penghapusan Ujian Nasional. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional, tetap dalam

pendiriannya yakni melaksanakan UN, karena UN sesuai dengan landasan hukum yaitu Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 58 ayat (2): “Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan, Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 75 tahun 2009 tentang Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun Pelajaran 2009/2010. tersebut disamping masih menyisakan banyak permasalahan yang saling bertautan dan belum secara tuntas ditangani oleh kebijakan itu sendiri atau kebijakan-kebijakan lain yang mendukung implementasi kebijakan tersebut, juga banyak menimbulkan pemasalahan baru yang muncul dalam tataran implementasinya. Permasalahan tersebut pada tingkat sekolah akan dirasakan sekali ketidak lulusan dalam Ujian Nasional sebenarnya merupakan hal lumrah, namun persepsi masyarakat kegagalan Ujian Nasional sebagai kegagalan dari pembelajaran di sekolah, sehingga sekolah bisa dipersalahkan berkaitan dengan kegagalan tersebut.

Untuk mengantisipasi banyak sekolah yang melakukan kecurangan, dengan membocorkan jawaban atau cara lain yang tidak sesuai dengan kaidah pendidikan. Kebijakan Ujian Nasional merupakan kemauan politik pemerintah yang lebih banyak bersifat politis dan menempatkan Ujian Nasional menjadi fokus sistem pendidikan. Hal ini bisa dilihat dari alasan-alasan yang melatar belakangi pelaksanaan Ujian Nasional, antara lain : *Pertama*, untuk meningkatkan kualifikasi tenaga kerja Indonesia agar memiliki keunggulan kompetitif dan posisi tawar yang tinggi dalam rangka menunjang perkembangan ekonomi; *Kedua*, upaya memperbesar peluang agar masyarakat lebih mampu berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta lebih memiliki kesadaran sebagai warga negara akan hak mengenyam pendidikan; *Ketiga*, untuk meningkatkan martabat, kesejahteraan dan makna hidup masyarakat dan bangsa.

Permasalahan yang muncul berkaitan dengan kebijakan Ujian Nasional di sekolah antara lain adalah adanya kesenjangan koordinasi antara Dinas pendidikan provinsi dengan pemerintah provinsi di tingkat provinsi dan antara Dinas pendidikan Kabupaten/kota dengan pemerintah daerah kabupaten/kotamadya di kabupaten/kotamadya dengan sekolah, kesenjangan terjadi ketika melakukan komunikasi serta pengadministrasian, sehingga seringkali terjadi kekurangan soal, kekurangan lembar jawaban yang sebenarnya sudah dilaporkan melalui data-data ujian sekolah yang dibuat sekolah dan di setorkan ke Dinas Pendidikan masing-masing kota/kabupaten, untuk selanjutnya dikumpulkan di Dinas Pendidikan Provinsi dan dilaporkan ke Pusat, dengan pola demikian seharusnya terjadi koordinasi yang baik, namun kurang terampilnya sumber daya manusia serta tidak rasionalnya petugas yang terlibat memungkinkan terjadinya permasalahan tersebut.

Hal lain terjadi berkaitan dengan kultur birokrasi organisasi pemerintah daerah dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sekalipun memiliki hubungan struktural dengan pemerintah daerah, tapi masing-masing Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dirasakan sulit berkoordinasi sekolah secara langsung. Dengan demikian maka keterkaitan itu harus berjalan secara sinergi dan seimbang, artinya pemerintah pusat dan provinsi bisa memberi bantuan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota agar mereka lebih leluasa dan tidak menghadapi hambatan dalam melakukan upaya optimalisasi sesuai dengan potensi dan kearifan lokal masing-masing Kabupaten/Kota dalam pencapaian perluasan dan pemerataan pendidikan menengah.

Peningkatan peran dan alih tanggung jawab dalam implementasi kebijakan Ujian Nasional di Sekolah tersebut akan sangat dipengaruhi oleh kondisi-kondisi internal dan eksternal pemerintahan daerah sebagai fokus tempat terselenggaranya sekolah dimaksud, sehingga keberhasilan pemerataan dan perluasan pendidikan menengah akan sangat ditentukan pula oleh optimalisasi dan upaya-upaya strategis dan sinergis dari pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap faktor-faktor yang mempengaruhinya yang didukung oleh dukungan dana yang memadai dari pemerintah, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Hal ini

tidak langsung bisa berjalan seperti apa yang diharapkan atau semudah seperti apa yang dibayangkan, karena akan terkait dengan faktor-faktor ekonomi, sosial, politik, budaya dan karakteristik wilayah serta faktor-faktor lain yang berkaitan dengan individu kepemimpinan daerah dan respon *stakeholders* pendidikan.

Berdasarkan karakteristik masalahnya, kebijakan Ujian Nasional di sekolah tersebut mempunyai tingkat kesukaran teknis yang relatif tidak kecil untuk di berbagai daerah termasuk dipersulit dengan keragaman karakteristik wilayah dan perilaku kelompok sasaran yang ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkannya sangat besar, sehingga kebijakan tersebut menjadi tidak mudah untuk diimplementasikan dalam pencapaian sasaraannya.

Ketidakmudahan tersebut muncul berkaitan dengan variabel-variabel yang berasal dari kebijakan itu sendiri dan bertambah besar oleh pengaruh-pengaruh variabel dari lingkungan luar kebijakan. Variabel-variabel yang berasal dari kebijakan itu sendiri adalah ketidakmampuan kebijakan dalam menstrukturkan secara tepat proses implementasi, antara lain : (1) adanya permasalahan yang kurang tegas dan *inkonsistensi* dalam menetapkan prosedur teknis dan petunjuk pelaksanaan operasional kebijakan Ujian Nasional, antara pusat, provinsi hingga kerayon sekolah; (2) tidak tepatnya pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya; (3) longgarnya keterpaduan hirarkhis dalam dan diantara lembaga-lembaga pelaksana; (4) tidak tepatnya rekrutmen pejabat pelaksana; dan (5) adanya akses formal pihak luar. hal ini sering kali muncul dalam pendistribusian dan biaya pelaksanaan yang sering kali tiap daerah berbeda. Misalnya biaya untuk operasional yang terlambat, nominasi yang kurang untuk para pengawas dan sebagainya.

Sedangkan variabel-variabel dari luar kebijakan yang mempengaruhi implementasi kebijakan, antara lain : (1) kondisi dan lokasi sekolah yang berbeda dilihat dari letak sekolah ada yang di kota ada yang di pinggiran, sehingga menghambat transportasi; (2) sikap tidak patuh dan tingkat kepedulian yang rendah dari kelompok sasaran; dan (3) rendahnya komitmen, moral dan kemampuan pejabat-pejabat pelaksana ; (4) target pencapaian nilai Ujian Nasional yang dicanangkan oleh pemerintah dirasakan membebani sekolah dan (5) tuntutan masyarakat dalam hal ini orang tua menuntut keberhasilan belajar siswa pada

Ujian Nasional sebagai sesuatu yang harus, kegagalan seperti sesuatu yang berdosa.

Kondisi-kondisi tersebut ditunjang oleh permasalahan perbedaan persepsi antara masyarakat, sekolah di dalamnya guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan, dinas pendidikan dan pemerintah tentang kebijakan Ujian Nasional di Sekolah, hal lain berkaitan dengan kekhawatiran orang tua (masyarakat) akan kemampuan sekolah dalam menjaga kualitas pembelajaran yang dilakukan guru, kualitas pelayanan pendidikan, kualitas lulusan. Berkaitan dengan pelaku, munculnya persepsi yang dalam di lingkungan sekolah berkaitan dengan tatacara penyaluran dan pendistribusian soal yang seringkali terlambat dan kurang ke sekolah, atau waktu pengambilan berkas yang terbatas, artinya berkas Ujian Nasional seringkali di simpan di rayon dan diambil ketika akan melaksanakan Ujian Nasional, tanpa mempertimbangkan jarak tempuh dan waktu.

2.5. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan Ujian Nasional di Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Jakarta Pusat. Faktor komunikasi merupakan prasyarat pertama bagi implementasi kebijakan Ujian Nasional, karena suatu kebijakan dapat berhasil dengan baik ketika para pembuat kebijakan kebijakan mentransmisikan petunjuk kebijakan dengan jelas akurat dan tepat kepada pelaksana kebijakan. Keberhasilan Ujian Nasional sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pembuat kebijakan dalam mengkomunikasikan kebijakan tersebut, dikarenakan Ujian Nasional merupakan kebijakan yang memiliki kompleksitas tinggi sehingga diperlukan komunikasi yang efektif baik dari segi pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan maupun sasaran kebijakan.

Sumber daya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan yang efektif. Sumber daya yang meliputi; sumber daya manusia, informasi, kewenangan dan sumber daya yang ada (dana, sarana-prasarana), ketersediaan sumber daya tersebut sangat mempengaruhi dalam implementasi Ujian Nasional, karena tanpa sumber daya, kebijakan Ujian Nasional tidak dapat diterapkan.

Dalam melaksanakan kebijakan Ujian Nasional di sekolah diperlukan sumber daya manusia yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas, kecukupan jumlah dan *skill* petugas pengelola sangat diperlukan dalam melaksanakan pelayanan pelaksanaan Ujian Nasional di sekolah, pengawasan Ujian Nasional serta pengadministrasian hasil Ujian Nasional. Selain itu sumber daya informasi dan kewenangan tak kalah pentingnya dengan SDM, dikarenakan kebijakan Ujian Nasional di sekolah merupakan kewenangan pemerintah pusat dan daerah, sehingga memerlukan koordinasi yang baik dan tupoksi masing-masing pihak.

Keberhasilan implementasi kebijakan Ujian Nasional di sekolah juga dipengaruhi oleh bagaimana karakteristik implementor dan *resipient* dengan berbagai permasalahan yang dihadapinya. Sikap atau disposisi memegang peranan penting dalam menerima dan melaksanakan suatu kebijakan, jika para *implementor* memperhatikan suatu kebijakan khusus, maka dimungkinkan bagi *implementor* dapat melaksanakan suatu kebijakan sebagaimana yang dimaksudkan para pembuat keputusan.

Namun ketika sikap atau perspektif *implementor* ini berbeda dari para pembuat keputusan, maka proses implementasi kebijakan menjadi rumit dan gagal. Begitupun yang akan terjadi dalam menerapkan kebijakan Ujian Nasional di sekolah, diperlukan kesediaan para pelaksana kebijakan untuk menerima dan melaksanakan sesuai dengan para pembuat kebijakan.

Struktur birokrasi mengandung dua karakteristik utama yaitu Prosedur Pengoperasian Standar (*Standard Operating Procedure/ SOP*) dan *Fragmentasi*. Struktur organisasi-organisasi yang melaksanakan kebijakan Ujian Nasional sangat mempengaruhi keberhasilan kebijakan tersebut. Dengan menggunakan SOP atau petunjuk pelaksanaan kebijakan Ujian Nasional dapat menyeragamkan tindakan-tindakan para pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan yang kompleks dan tersebar luas dalam penerapan kebijakan.

Selain itu kebijakan Ujian Nasional merupakan kewenangan pemerintah pusat dan daerah sehingga terjadi penyebaran tanggung jawab baik di tingkat pusat sampai tingkat daerah. Dalam implementasi kebijakan Ujian Nasional di sekolah diperlukan struktur birokrasi yang sistematis, dalam rangka mendukung

keberhasilan kebijakan tersebut. Hal ini berkaitan dengan bagaimana tanggung jawab pelaksana dalam mendistribusikan soal, bagaimana prosedur pengawasan pelaksanaan Ujian Nasional termasuk di dalamnya pemilihan petugas yang menjadi panitia maupun para pengawas yang kompeten, baik dari sekolah maupun dari dinas pendidikan.

2.6. Operasionalisasi Konsep

Berdasarkan pada uraian teori dan konsep implementasi kebijakan di atas, maka dapat didefinisikan konsep-konsep secara operasional faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tentang Ujian Nasional pada Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Jakarta Pusat adalah sebagai berikut :

- a. Faktor komunikasi adalah kegiatan kerja sama dan hubungan kerja secara timbal balik baik formal maupun informal dalam proses implementasi kebijakan mengenai ujian nasional meliputi kejelasan, ketepatan, dan konsistensi.
- b. Faktor sumber daya dalam proses implementasi kebijakan tentang ujian nasional meliputi tenaga pelaksana, informasi, kewenangan dan fasilitas fisik serta sumber dana.
- c. Faktor sikap pelaksana adalah kesesuaian persepsi komitmen antara pembuat kebijakan dan aparat pelaksana (implementor) untuk melaksanakan kebijakan tersebut, yang meliputi antara lain sikap dan komitmen.
- d. Faktor struktur birokrasi adalah fragmentasi untuk melaksanakan kebijakan tersebut yang meliputi SOP dan koordinasi.

Uraian di atas dapat dilihat secara ringkas dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1 :
Operasionalisasi Konsep

Variabel	Faktor	Indikator	Sumber data
Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Kebijakan Ujian Nasional	a. Komunikasi: <ul style="list-style-type: none"> • Transmisi • Kejelasan • Konsistensi 	<ul style="list-style-type: none"> • Diketuainya derajat pengetahuan mengenai kebijakan • Diketuainya tingkat pemahaman maksud dan tujuan dari kebijakan • Diketuainya tingkat pemahaman mekanisme pelaksanaan dari kebijakan 	Wawancara mendalam dan Studi Dokumen
	b. Sumber Daya: <ul style="list-style-type: none"> • Tenaga Pelaksana • Informasi • Wewenang • Fasilitas Fisik • Dana/Keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas • Kuantitas • Cara melaksanakan kebijakan • Kewenangan yang memadai • Sarana prasarana • Pendanaan/Keuangan 	Wawancara mendalam dan Studi Dokumen
	c. Sikap/Disposisi: <ul style="list-style-type: none"> • Sikap • Komitmen 	<ul style="list-style-type: none"> • Kesiadaan untuk melaksanakan kebijakan • Komitmen untuk melaksanakan kebijakan 	Wawancara mendalam dan Studi Dokumen
	d. Struktur Birokrasi <ul style="list-style-type: none"> • SOP • Koordinasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan program • Koordinasi baik dalam organisasi maupun diluar organisasi 	Wawancara mendalam dan Studi Dokumen

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan positivisme. Pendekatan positivisme karena posisi teori dan konsep kebijakan digunakan untuk konfirmasi terhadap realitas yang diteliti (Neuman 2007).

Pendekatan ini menurut Salim (2001:39) adalah untuk mengungkapkan kebenaran realitas yang ada dan bagaimana realitas tersebut senyatanya berjalan. Dalam penelitian positivism, informasi kebenaran itu ditanyakan peneliti kepada individu yang dijadikan responden penelitian. Untuk mencapai kebenaran ini, maka seorang pencari kebenaran (peneliti) harus menanyakan langsung kepada objek yang diteliti, dan objek dapat memberikan jawaban langsung kepada peneliti yang bersangkutan.

3.2 Tipe penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah dan tujuan penelitian maka tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Penelitian deskriptif menurut Irawan (2007: 215) adalah penelitian yang bertujuan menjelaskan sesuatu seperti apa adanya (*as it is*) secara mendalam.

Sedangkan menurut Nugroho, penelitian deskripsi adalah penelitian dengan tujuan mengetahui nilai variabel tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lainnya. Tingkat pemaparan ini dilakukan apabila (rumusan) permasalahan bersifat deskriptif. Berdasarkan kedua pendapat ahli di atas, maka penelitian ini mencoba menganalisis implementasi kebijakan Ujian Nasional pada Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Jakarta Pusat dengan menggunakan empat faktor yang mempengaruhinya yaitu: faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor sikap pelaksana dan faktor struktur birokrasi.

3.3 Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah:

a. Data Primer

- 1) Pejabat Dinas Pendidikan Kota Jakarta Pusat;
- 2) Kepala Sekolah SMAN 68 Jakarta, Swasta Tri Wibawa Jakarta, dan SMA Swasta Dwi Saka Jakarta;
- 3) Guru SMAN 68 Jakarta, Swasta Tri Wibawa Jakarta, dan SMA Swasta Dwi Saka Jakarta yang mengajar mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Nasional.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yakni pengumpulan data dengan cara mempelajari dan menelaah studi pustaka atau studi dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan implementasi kebijakan Ujian Nasional.

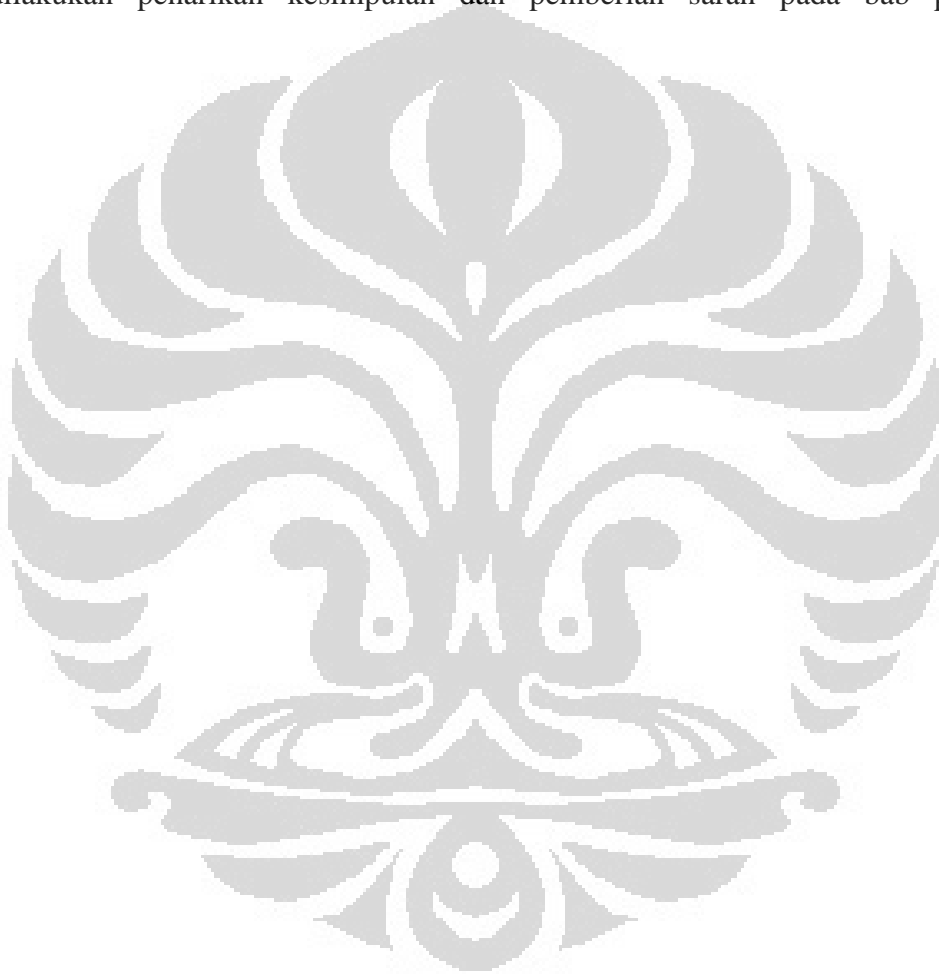
3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Ujian Nasional di SMA SMAN 68, Swasta Tri Wibawa, dan SMA Swasta Dwi Saka Kota Jakarta Pusat ditinjau dari faktor komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi. Analisis deskriptif merupakan bentuk pemaparan dari hasil temuan dari penelitian (Kuncoro, 2003, p.8). Analisis deskriptif ini memaparkan semua hasil penelitian berdasarkan hasil kuisioner, maupun hasil wawancara serta dokumentasi yang berkaitan dengan kebijakan Ujian Nasional tersebut.

Sementara Suharsini Arikunto (1993:353), mengemukakan bahwa analisis dengan deskriptif kualitatif adalah:

“ Memberikan predikat pada variabel yang diteliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Predikat yang diberikan tersebut dalam bentuk predikat yang sebanding dengan atau atas dasar kondisi yang diinginkan agar pemberian predikat dapat tepat, maka sebelum dilakukan pemberian predikat, kondisi tersebut diukur dengan presentase, kemudian baru ditafsirkan ke predikat”

Berdasarkan penafsiran atas kategori, selanjutnya dilakukan ulasan secara kualitatif, melalui paparan yang logis, rasional, objektif dan sistematis. Hal ini juga berlaku untuk data kualitatif, setelah data mentah terkumpul, data tersebut ditranskrip dan dibuatkan koding dan kategorisasi data kemudian dilanjutkan penyimpulan sementara, triangulasi untuk *check* dan *recheck* baru setelah itu penyimpulan terakhir. Dengan demikian diharapkan dapat diungkapkan fenomena-fenomena yang terjadi serta yang melatarbelakanginya kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dan pemberian saran pada bab penutup.



BAB 4

GAMBARAN UMUM HASIL PENELITIAN

Kebijakan Ujian Nasional di SMA Negeri 68 Jakarta, SMA Triwibawa Jakarta dan SMA Dwi Saka Jakarta dilaksanakan mulai tahun ajaran 2003/2004. Untuk di SMA Negeri 68 Ujian Nasional dilaksanakan di lokasi sekolah secara langsung, sementara untuk di SMA Triwibawa dan SMA Dwi Saka awalnya menginduk ke sekolah lain,

Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan Nasional hasil pelaksanaan Ujian Nasional di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2010 pada tingkat SMA dari total peserta 59.898 siswa, yang lulus 54,271 siswa (90,6%) dan yang tidak lulus 5.426 siswa (9,09 persen), menurun dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai 97%, dengan rincian di Kota Jakarta Pusat sebesar 83,547%, Kota Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu 83,34%, Kota Jakarta Barat 95,25%, Kota Jakarta Selatan 92,09%, dan Kota Jakarta Timur 92,82%. Pada sekolah dengan tingkat kelulusannya dalam Ujian Nasional 2009/2010 nol persen (0%) sekolah kelulusan 0% di provinsi DKI Jakarta yaitu; Kota Jakarta Pusat 3 sekolah (88 peserta), Kota Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu 1 sekolah (4 peserta), Kota Jakarta Barat 1 sekolah (25 peserta), Kota Jakarta Selatan 2 sekolah (6 peserta), Kota Jakarta Timur 3 sekolah (20 peserta).

4.1.Deskripsi Empiris SMAN 68 Kota Jakarta Pusat

Untuk mengetahui kondisi objektif lokasi penelitian dapat dilihat pada paparan tentang keberadaan SMA N 68 Jakarta dapat dilihat dari berikut :

4.1.1 Gambaran Umum SMAN 68 Jakarta

SMA Negeri 68 Jakarta berdiri tahun 1981, beralamat di jalan Salemba Raya 18, Senen, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta dengan letak lokasinya sangat strategis karena dapat kunjungi dengan berbagai angkutan kota yang melaluinya dan juga karena letaknya tak jauh dari universitas ternama di Indonesia yaitu Universitas Indonesia dan juga rumah sakit Cipto Mangunkusumo

(RSCM) dan RS. Saint Carolus. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) telah dilaksanakan sejak tahun ajaran 2006/2007. Terselenggaranya layanan kelas internasional dengan mengacu pada kurikulum Cambridge Pada tahun ajaran 2005/2006. Pada tahun ajaran 2006/2007 sekolah ini ditunjuk sebagai Rintisan Sekolah Nasional Berstandar Internasional RSBI. Pelaksanaan RSBI dilaksanakan mulai tahun ajaran 2008 – 2009 di kelas X. Pada Tahun ajaran 2009/2010 Pelaksanaan RSBI pada kelas X, dan XI. Pada Tahun ajaran 2010/2011 Pelaksanaan RSBI pada kelas X, XI dan XII.

Sekolah ini menjadi salah satu sekolah unggulan di DKI Jakarta dan satu-satunya dari Jakarta Pusat. Sistem pendidikan dan kurikulum sekolah ini mengacu pada ketentuan yang ditentukan oleh dinas terkait, dan mulai tahun pelajaran 2003 – 2004 telah menggunakan sistem pendidikan dan kurikulum yang disebut Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dimana sekolah diberi kebebasan mengembangkan kurikulumnya sendiri namun tidak menyimpang dari ketentuan yang ada. Semua kegiatan sekolah mengacu pada program kerja dan mempunyai tujuan yang mengarah pada visi dan misi.

4.1.2 Visi dan Misi, SMA Negeri 68 Jakarta

Sebagai lembaga pendidikan yang dikelola dengan mengikuti regulasi pemerintah dibawah pengendalian Kementerian Pendidikan Nasional, mengemban tugas untuk menciptakan sumber daya manusia yang mampu memberikan kontribusi positif kepada bangsa Indonesia yang cerdas, sehat dan kreatif, serta berwawasan dan berkepribadian yang baik sesuai dengan tujuan umum pendidikan nasional.

Untuk memenuhi amanat tersebut di atas, SMA Negeri 68 memiliki visi dan misi sebagai berikut:

Visi :

- Unggul dalam perolehan nilai, unggul dalam prestasi non akademik (seni, budaya, dan olahraga),
- Unggul dalam memasuki SPMB, dan menjadi teladan dalam bersikap dan berperilaku.

Misi :

- Meningkatkan prestasi akademik, menjadi duta seni, budaya dan olahraga tingkat nasional,
- Meningkatkan prosentase siswa yang diterima di perguruan tinggi dalam dan luar negeri,
- Meningkatkan kepekaan terhadap lingkungan dan masalah global, meningkatkan amaliah keagamaan, mengembangkan sikap hormat, saling menghargai dan cinta tanah air.

4.1.3 Keadaan Siswa

Keadaan siswa SMAN 68 Jakarta tahun pelajaran 2009/2010 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2 :
Keadaan Siswa SMAN 68 Jakarta
Tahun 2009/2010

Jenis Kelamin	Kelas X	Kelas XI		Kelas XII		Total
		IPA	IPS	IPA	IPS	
Laki-laki	99	64	58	67	44	332
Perempuan	146	95	57	92	66	456
Jumlah	245	159	115	159	110	788

4.1.4 Prestasi Siswa

Dalam perjalanannya sekolah ini berhasil membuat kejutan-kejutan melalui prestasi hasil studi siswanya maupun kualitas para alumninya. Berikut ini data prestasi siswa baik akademik maupun non akademik secara lengkap termasuk prestasi lomba keilmuan/olimpiade dan lomba non akademik (olahraga dan seni), Prestasi ini perlu dipaparkan sebab merupakan modal awal kemampuan yang bisa dijadikan tolak ukur kreativitas siswa dalam mencapai prestasi. Untuk prestasi akademik dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3 :
Prestasi Akademik SMAN 68 Jakarta
Tahun 2009/2010

Tahun	Jenis Lomba	Perolehan Medali
2001	Lomba riset Fisika di Swedia.	Finalis
	Galileo, SCTV Jakarta	Juara 2
2003	OSN Fisika di Balik Papan	Finalis
	Lomba IPTEK Nuklir BATAN	Juara 1
2005	OSN Fisika di Jakarta	Finalis
	Lomba Kreatifitas Pelajar se Jabodetabek	Juara 1
2006	OSN Matematika di Semarang	Finalis
	Lomba cepat tepat Biologi FPMIPA UI	Juara 1
	lomba Netkuis BSI Se-Jabotabek	Juara 1
2007	Lomba cepat tepat Biologi FPMIPA UI	Juara Umum
	Debat Bahasa Inggris sejabotabek.	Juara 1
	Netkuis BSI se Jakarta Pusat	Juara 1
2008	Cerdas Cermat Islamic Festifal TK. DKI	Juara 2
	Olimpiade MIPA AL Azhar (Biologi) TK. DKI	Juara 1
	Olimpiade MIPA AL Azhar (Fisika) TK. DKI	Juara 1
	Evolution Matematika (DKI)	Juara 2
	OSN Biologi	Juara 2

Selain prestasi akademik, siswa juga memiliki prestasi non akademik sebagai penunjang kreativitas siswa yang merupakan gambaran dari bakat non akademik yang dimiliki siswa sebagai penunjang dalam proses pembelajaran di sekolah. Prestasi yang cukup membanggakan . Gambaran prestasi non akademik yang di rasih para siswa dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4 :
Prestasi Non Akademik SMAN 68 Jakarta
Tahun 2009/2010

Tahun	Jenis Lomba	Perolehan Medali
2005	Lomba Futsal tingkat pelajar se DKI Jakarta	Juara 2
2006	Remaja Ceria tingkat DKI Jakarta	Juara 1
	Lomba Taekwondo se DKI Jakarta	Juara 1
	Lomba Tari saman sejabotabek	Juara 1
2007	Desain Poster Wira Tingkat Jabotabek (PMR)	Juara 1
	Fotografi SMAK Tingkat Jabotabek	Juara 2
	PMR Teenage Medical Response Competition, Tim	Juara 1
	Bantuan Medis Senat Mahasiswa Tk. DKI	Juara 1
2008	Kaligrafi Tingkat DKI	Juara 2
	Rohis/Miniatur Masjid Tingkat DKI	Juara 2
	Futsal – Putra ASCOPE 2 SMA ASASI Tk.DKI	Juara 2
	DMC (Darunnajannah Marching Competition) Tingkat Nasional dan Piala Bergilir dari Menko Kesra Republik Indonesia	Juara 2
	Busana Colour Guard Tingkat Nasional	Juara 2
	General Effect Tingkat Nasional	Juara 2
	Display and Showmanship Tingkat Nasional	Juara 2
	Music Analysis Harn Line Tingkat Nasional	Juara 2
	Music Analysis Percussion Line Tingkat Nasional	Juara 2
Volly DKI Tahun 2008 Pada acara School of Sport, Science art and Charity SMA Negeri 14 Jakarta	Juara 2	

4.1.5 Ekstrakurikuler

Di SMAN 68 Jakarta ada sederet daftar kegiatan tambahan ekstrakurikuler atau yang disingkat dengan sebutan ekskul yang diizinkan sekolah dengan siswa sekolah tersebut sebagai anggotanya. Manfaat, fungsi dan tujuan diadakannya kegiatan ekskul baik di sekolah adalah sebagai wadah penyaluran hobi, minat dan bakat para siswa secara positif yang dapat mengasah kemampuan, daya

kreativitas, jiwa sportivitas, meningkatkan rasa percaya diri, dan lain sebagainya. Adapun kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMAN 68 Jakarta sebagai berikut:

- Rohani Islam (Rohis)
- Rohani Kristen (Rokris)
- Rohani Katolik (Rohkat)
- Kelompok Ilmiah Remaja (KIR)
- Palang Merah Remaja (PMR)
- Basket
- Paskibra
- Sepak Bola
- Futsal
- Pramuka
- ELPALA Enam Lapan
Pencinta Alam
- TOSLA Teater Olah Seni
Lanjutan Atas
- Bulu Tangkis
- Bela Diri

4.1.6 Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan faktor utama dalam lembaga pendidikan, karena sumber daya manusia merupakan faktor pendorong dan penggerak dari faktor-faktor lain. Sumber daya manusia di SMA Negeri 68 Jakarta terdiri dari kepala sekolah, pendidik dan pegawai.

a. Kepala Sekolah

Saat ini SMAN 68 Jakarta dipimpin oleh Pono Fadlullah, Kepala Sekolah menduduki peranan sentral dalam dinamika keberlangsungan kegiatan kependidikan. Karena kepala sekolah merupakan faktor penggerak, pengarah, dan pengendali kegiatan pendidikan di sekolah.

Kepala Sekolah sebagai pemimpin pendidikan merupakan motor penggerak dalam dinamika keberlangsungan kegiatan kependidikan. Kepala sekolah memiliki tanggung jawab yang besar terhadap dinamika keberlanjutan kegiatan kependidikan. Jenis tanggung jawab yang dipikul oleh kepala sekolah meliputi tanggung jawab sebagai pemimpin, supervisi dan administrator.

Tanggung jawab sebagai pemimpin yaitu kepala sekolah hendaknya menjadi contoh dan tauladan bagi semua staf dan dewan guru, siswa maupun masyarakat. Dirinya dituntut memiliki kepribadian yang baik., seperti disiplin,

jujur, mendorong kepada guru dan karyawan serta para siswa yang motivasi kerja dan belajarnya rendah, membantu dan memberikan bantuan moral kepada guru dan karyawan yang memiliki masalah baik mengenai pekerjaan maupun pribadi termasuk rumah tangga, sebagai konseptor dalam menyusun rencana program kerja dan lain-lain.

Sebagai supervisor kegiatan yang dilaksanakan oleh kepala sekolah antara lain mengadakan supervisi kepada guru baik dalam melaksanakan tugas akademik yaitu kegiatan pembelajaran, mengontrol kelengkapan administrasi guru, membimbing guru yang cara mengajarnya masih di bawah standar yang diharapkan.

Sedangkan sebagai administrator tugas yang dilaksanakan oleh kepala sekolah seperti membuat kelengkapan administrasi kepala sekolah, merancang membuat kelengkapan sarana dan prasarana, fasilitas belajar, menanda tangani surat masuk dan keluar dan lain-lain.

Kegiatan kependidikan di sekolah bisa berjalan lancar, dan dinamis apabila terdapat kerja sama berbagai unsur yang ada di sekolah. Kepala sekolah, guru, karyawan dan komite sekolah selaku wakil dari orang tua siswa secara sinergi menjalin hubungan kerja sama dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah disepakati.

b. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pengelolaan pendidikan disekolah memerlukan tenaga yang berkompeten sesuai dengan bidang keahliannya karena jika suatu urusan atau pekerjaan diserahkan pada orang yang bukan ahlinya maka hasilnya kemungkinan besar tidak maksimal. Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan adalah sumber daya manusia yang sangat diperlukan oleh sekolah dalam mengembangkan manajemen berbasis sekolah. Oleh sebab itu eksistensinya memegang peranan sentral dalam mencapai tujuan sekolah. Adapun data keadaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di SMAN 68 Jakarta adalah sebagai berikut:

Tabel 5 :
Keadaan Tenaga Pendidik SMAN 68 Jakarta
Tahun 2009/2010

Jenis Kelamin	Kualifikasi Pendidikan					Status		Total
	D2	D3	S1	S2	S3	Tetap	Tdk Tetap	
Laki-laki	-	-	19	4	-	23	-	23
Perempuan	-	-	38	4	-	42	-	42
Jumlah	-	-	57	8	-	65	-	65

Tabel 6 :
Keadaan Tenaga Kependidikan SMAN 68 Jakarta
Tahun 2009/2010

Jenis Kelamin	Kualifikasi Pendidikan					Status		Total
	SD	SMP	SMA	D3	S1	Tetap	Tdk Tetap	
Laki-laki	3	6	12	-	5	13	13	26
Perempuan	-	-	4	-	1	4	1	5
Jumlah	20	-	11	-	-	17	14	31

4.1.7 Sarana dan Prasarana

Keberhasilan dalam sebuah proses pendidikan bukan hanya ditentukan oleh keahlian dari para pendidiknya, namun juga sangat ditentukan oleh berbagai ragam sarana prasarana yang dimiliki, untuk membantu mengembangkan keahlian dan ilmu pengetahuan yang diberikan kepada para siswa. SMAN 68 Jakarta memiliki berbagai sarana prasarana yang dapat digunakan oleh siswa dan guru dalam mengembangkan ilmu pengetahuan tersebut. Adapun sarana prasarana yang dimiliki oleh SMAN 68 Jakarta adalah sebagai berikut:

Tabel 7 :
Keadaan Sarana Prasarana SMAN 68 Jakarta
Tahun 2009/2010

No.	Sarana Prasarana	Keterangan
1.	Luas Tanah	3.213 m ²
2.	Luas Bangunan	957 m ²
3.	Ruang Kantor Kepala Sekolah	1 unit
4.	Ruang Guru	3 unit
5.	Ruang Kelas	23 unit
6.	Ruang Tata Usaha (Administrasi)	1 unit
7.	Ruang Audio Visual (Audi)	1 unit
8.	Ruang UKS / PMR / Dokter	1 unit
9.	Ruang Koperasi	1 unit
10.	Ruang Bimbingan dan Konseling	1 unit
11.	Ruang OSIS	1 unit
12.	Ruang Ektrakurikuler	5 unit
13.	Ruang Laboratorium (IPA, Bahasa, Komputer)	5 unit
14.	Ruang Perpustakaan	2 unit
15.	Ruang Keagamaan (Islam, Kristen)	2 unit
16.	Ruang Kantin	8 unit
17.	Ruang Gudang/Inventarisasi	1 unit
18.	MCK / WC Siswa	8 unit
19.	MCK / WC Guru	1 unit
20.	Ruang Dapur Sekolah	1 unit
21.	Ruang Penjaga Sekolah	2 unit
22.	Pos Satpam	1 unit
23.	Masjid/Mushollah	1 unit

24.	Ruang Rapat	1 unit
25.	Kebun Toga	1 unit
26.	Green House	1 unit
27.	Taman Sekolah	1 unit
28.	Taman Air mancur dan kolam ikan	1 unit
29.	Sangkar Burung	2 unit
30.	Ruang Perlengkapan Olahraga	1 unit

4.2.Deskripsi Empiris SMA Triwibawa Jakarta

Untuk mengetahui kondisi objektif lokasi penelitian dapat dilihat pada paparan tentang keberadaan SMA Triwibawa Jakarta dapat dilihat dari berikut :

4.2.1 Gambaran Umum SMA Triwibawa Jakarta

SMA Triwibawa Jakarta adalah berstatus SMA Swasta berakreditasi B, beralamat di jalan Rajawali Selatan I/30, Gunung Sahari Utara, Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, SMA Triwibawa, sebuah SMA yang berdiri tahun 1955 dengan luas 956 m². terdiri dari 2 lantai.

SMA Triwibawa Jakarta adalah lembaga pendidikan jenjang pendidikan menengah dibawah tanggung jawab Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Kementrian Pendidikan Nasional. Status SMA Triwibawa Jakarta adalah sekolah swasta yang diproyeksikan memiliki keunggulan dalam prestasi akademik dan memiliki kualitas sumberdaya manusia yang baik serta fasilitas pembelajaran yang memadai, sesuai dengan yang diproyeksikan oleh yayasan pengelola pendidikan tersebut.

Kurikulum yang digunakan merupakan perpaduan Kurikulum Satuan Tingkat Pendidikan (KTSP) dan inovasi dari institusi yang disesuaikan dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan SMA Triwibawa Jakarta.

4.2.2 Visi dan Misi, SMA Triwibawa Jakarta

Tujuan pendidikan dijabarkan berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan SMA Triwibawa Jakarta.

”Mewujudkan generasi muda yang sarat pengetahuan, keterampilan dan moral serta bercita-cita luhur. Adapun visi dan SMA Triwibawa Jakarta adalah sebagai berikut:

Visi :

- Menjadikan SMA Triwibawa unggul dalam prestasi IPTEK dan IMTAK serta disenangi masyarakat

Misi :

- Melaksanakan kegiatan keagamaan secara rutin dan teratur
- Melaksanakan KBM secara intensif
- Menjunjung tinggi nilai budaya bangsa dan berbudi pekerti luhur
- Menekankan semangat keunggulan kepada siswa, guru, dan karyawan secara terus menerus
- Mewujudkan lingkungan sekolah yang indah dan nyaman

4.2.3 Keadaan Siswa

Keadaan siswa SMA Triwibawa Jakarta tahun pelajaran 2009/2010 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 8 :
Keadaan Siswa SMA Triwibawa Jakarta
Tahun 2009/2010

Jenis Kelamin	Kelas X	Kelas XI		Kelas XII		Total
		IPA	IPS	IPA	IPS	
Laki-laki	66	-	28	-	24	118
Perempuan	22	-	20	-	16	58
Jumlah	88	-	48	-	40	176

4.2.4 Prestasi Siswa

Para siswa/siswa SMA Triwibawa sampai saat ini belum menunjukkan prestasi yang berarti, baik di tingkat kota, provinsi maupun nasional.

4.2.5 Ekstrakurikuler

Kegiatan tambahan ekstrakurikuler atau yang disingkat dengan sebutan ekskul yang diizinkan sekolah dengan siswa sekolah tersebut sebagai anggotanya. Manfaat, fungsi dan tujuan diadakannya kegiatan ekskul baik di sekolah adalah sebagai wadah penyaluran hobi, minat dan bakat para siswa secara positif yang dapat mengasah kemampuan, daya kreativitas, jiwa sportivitas, meningkatkan rasa percaya diri, dan lain sebagainya.

Akan lebih baik lagi apabila ekstrakurikuler mampu memberikan prestasi yang gemilang di luar sekolah sehingga dapat mengharumkan nama sekolah atau kampus kita. Walaupun secara akademis nilai dari ekstrakurikuler tidak masuk secara langsung ke nilai rapot, namun kegunaannya jauh lebih bermanfaat daripada tidak melakukan banyak hal di luar jam belajar. Berikut adalah kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMA Triwibawa Jakarta, yakni :

- Komputer
- Basket
- Bulutangkis
- Tennis Meja
- Pramuka

4.2.6 Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan faktor utama dalam lembaga pendidikan, karena sumber daya manusia merupakan faktor pendorong dan penggerak dari faktor-faktor lain. Sumber daya manusia di SMA Triwibawa Jakarta terdiri dari kepala sekolah, pendidik dan pegawai.

a. Kepala Sekolah

Saat ini SMA Triwibawa Jakarta dipimpin oleh Drs. Abdul Haris, SE, kepala sekolah menduduki peranan sentral dalam dinamika keberlangsungan kegiatan kependidikan. Karena kepala sekolah merupakan faktor penggerak, pengarah, dan pengendali kegiatan pendidikan di sekolah.

Kepala Sekolah sebagai pemimpin pendidikan merupakan motor penggerak dalam dinamika keberlangsungan kegiatan kependidikan. Kepala sekolah memiliki tanggung jawab yang besar terhadap dinamika keberlanjutan kegiatan kependidikan. Jenis tanggung jawab yang dipikul oleh kepala sekolah meliputi tanggung jawab sebagai pemimpin, supervisi dan administrator.

Tanggung jawab sebagai pemimpin yaitu kepala sekolah hendaknya menjadi contoh dan tauladan bagi semua staf dan dewan guru, siswa maupun masyarakat. Kepala Sekolah dituntut memiliki kepribadian yang baik., seperti disiplin, jujur, mendorong kepada guru dan karyawan serta para siswa yang motivasi kerja dan belajarnya rendah, membantu dan memberikan bantuan moral kepada guru dan karyawan yang memiliki masalah baik mengenai pekerjaan maupun pribadi termasuk rumah tangga, sebagai konseptor dalam menyusun rencana program kerja dan lain-lain.

Sebagai supervisor kegiatan yang dilaksanakan oleh kepala sekolah antara lain mengadakan supervisi kepada guru baik dalam melaksanakan tugas akademik yaitu kegiatan pembelajaran, mengontrol kelengkapan administrasi guru, membimbing guru yang cara mengajarnya masih di bawah standar yang diharapkan.

Sedangkan sebagai administrator tugas yang dilaksanakan oleh kepala sekolah seperti membuat kelengkapan administrasi kepala sekolah, merancang membuat kelengkapan sarana dan prasarana, fasilitas belajar, menanda tangani surat masuk dan keluar dan lain-lain.

Sulit memisahkan antara ketiga jenis tanggung jawab tersebut. Prinsipnya segala sesuatu yang dianggap belum ada dan atau masih kurang baik untuk pengembangan lembaga, kepala sekolah turun tangan secara langsung baik itu sebenarnya menjadi tugas dan tanggung jawab guru, karyawan maupun penjaga kebersihan atau pesuruh.

Kegiatan kependidikan di sekolah bisa berjalan lancar, dan dinamis apabila terdapat kerja sama berbagai unsur yang ada di sekolah. Kepala Sekolah, guru, karyawan dan komite sekolah selaku wakil dari orang tua siswa secara sinergi menjalin hubungan kerja sama dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah disepakati.

b. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pengelolaan pendidikan di sekolah memerlukan tenaga yang berkompeten sesuai dengan bidang keahliannya karena jika suatu urusan atau pekerjaan diserahkan pada orang yang bukan ahlinya maka hasilnya kemungkinan besar tidak maksimal. Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan adalah sumber daya manusia yang sangat diperlukan oleh sekolah dalam mengembangkan manajemen berbasis sekolah. Oleh sebab itu eksistensinya memegang peranan sentral dalam mencapai tujuan sekolah. Adapun data keadaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di SMA Triwibawa Jakarta adalah sebagai berikut:

Tabel 9 :
Keadaan Tenaga Pendidik SMA Triwibawa Jakarta
Tahun 2009/2010

Jenis Kelamin	Kualifikasi Pendidikan					Status		Total
	D2	D3	S1	S2	S3	Tetap	Tdk Tetap	
Laki-laki	-	3	9	-	-	12	-	12
Perempuan	-	-	7	-	-	7	-	7
Jumlah	-	3	16	-	-	19	-	19

Tabel 10 :
Keadaan Tenaga Kependidikan SMA Triwibawa Jakarta
Tahun 2009/2010

Jenis Kelamin	Kualifikasi Pendidikan					Status		Total
	SD	SMP	SMA	D3	S1	Tetap	Tdk Tetap	
Laki-laki	-	-	3	-	-	3	-	3
Perempuan	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	-	3	-	-	3	-	3

4.2.7 Sarana dan Prasarana

Keberhasilan dalam sebuah proses pendidikan bukan hanya ditentukan oleh keahlian dari para pendidiknya, namun juga sangat ditentukan oleh berbagai ragam sarana prasarana yang dimiliki, untuk membantu mengembangkan keahlian dan ilmu pengetahuan yang diberikan kepada para siswa. SMA Triwibawa Jakarta memiliki berbagai sarana prasarana yang dapat digunakan oleh siswa dan guru dalam mengembangkan ilmu pengetahuan tersebut. Adapun sarana prasarana yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Tabel 11 :
Keadaan Sarana Prasana SMA Triwibawa Jakarta
Tahun 2009/2010

No.	Sarana Prasarana	Keterangan
1.	Ruang Kepsek	1 unit
2.	Ruang Wakil Kepsek	1 unit
3.	Ruang Guru	1 unit
4.	Ruang Tata Usaha	1 unit
5.	Ruang Kelas/Teori	5 unit
6.	Ruang Perpustakaan	1 unit
7.	Ruang Lab. Komputer	1 unit
8.	Ruang BP/Konseling	1 unit
9.	Ruang UKS/R Kesehatan	1 unit
10.	Ruang Ibadah/Mushola	1 unit
11.	Ruang OSIS	1 unit
12.	Ruang Gudang	2 Unit
13.	R Kamar Mandi Guru	1 unit
14.	R Kamar Mandi Siswa	4 unit
15.	Lapangan Badminton	1 unit
16.	Ruang Penjaga Sekolah	1 unit

4.3. Deskripsi Empiris SMA Dwi Saka Jakarta

Untuk mengetahui kondisi objektif lokasi penelitian dapat dilihat pada paparan tentang keberadaan SMA Dwi Saka Jakarta dapat dilihat dari berikut :

4.3.1 Gambaran Umum SMA Dwi Saka Jakarta

SMA Dwi Saka yang berdiri sejak tahun 1954 beralamat di Jalan Tambak No. 32 Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat tepatnya berlokasi di belakang Rumah Sakit Ibu dan Anak Tambak, Kelurahan Pegangsaan, Jakarta Pusat. Berada di lingkungan yang warganya kerap terlibat tawuran, sekolah tersebut harus menanggung stigma sebagai sekolah bermasalah.

SMA Dwi Saka berstatus swasta yang dikelola oleh yayasan pendidikan Dwi Saka dan sampai saat ini sekolah tersebut berakreditasi C. Metode mengajar tak jauh berbeda dengan di sekolah lain. Di sekolahnya, yang berdiri sejak 1954, jam belajar pukul 12.00-17.00 WIB. Tapi, selama tiga bulan menjelang ujian, mereka masuk pagi hingga sore. Dengan fasilitas dan kualitas siswa yang serba terbatas, sulit mengharapkan siswa kelas III mampu mengerjakan soal-soal UN.

Kurikulum yang digunakan merupakan perpaduan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) serta inovasi dari institusi yang disesuaikan dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan SMA Dwi Saka Jakarta. Kurikulum tersebut dikemas dalam bentuk proses pembelajaran yang menyenangkan sambil bekerja.

4.3.2 Visi dan Misi, SMA Dwi Saka Jakarta

Tujuan pendidikan dijabarkan berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan di SMA Dwi Saka Jakarta. "Membantu masyarakat sekitar sekolah agar dapat mengenyam pendidikan di SMA, terutama masyarakat kelas bawah" Adapun visi dan SMA Dwi Saka Jakarta adalah sebagai berikut:

Visi :

- Membantu pemerintah dalam bidang pendidikan

Misi :

- Untuk meningkatkan Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara proporsional

4.3.3 Keadaan Siswa

Keadaan siswa SMA Triwibawa Jakarta tahun pelajaran 2009/2010 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 12 :
Keadaan Siswa SMA Triwibawa
Tahun 2009/2010

Jenis Kelamin	Kelas X	Kelas XI		Kelas XII		Total
		IPA	IPS	IPA	IPS	
Laki-laki	27	-	21	-	25	73
Perempuan	7	-	7	-	9	23
Jumlah	34	-	28	-	34	96

4.3.4 Prestasi Siswa

Prestasi siswa baik prestasi akademik maupun non akademik sampai saat ini belum menunjukkan prestasi yang berarti, baik di tingkat kota, provinsi maupun nasional.

4.3.5 Ekstrakurikuler

Kegiatan tambahan ekstrakurikuler atau yang disingkat dengan sebutan ekskul yang diizinkan sekolah dengan siswa sekolah tersebut sebagai anggotanya. Manfaat, fungsi dan tujuan diadakannya kegiatan ekskul baik di sekolah adalah sebagai wadah penyaluran hobi, minat dan bakat para siswa secara positif yang dapat mengasah kemampuan, daya kreativitas, jiwa sportivitas, meningkatkan rasa percaya diri, dan lain sebagainya.

Akan lebih baik lagi apabila ekstrakurikuler mampu memberikan prestasi yang gemilang di luar sekolah sehingga dapat mengharumkan nama sekolah atau kampus kita. Walaupun secara akademis nilai dari ekstrakurikuler tidak masuk

secara langsung ke nilai rapot, namun kegunaannya jauh lebih bermanfaat daripada tidak melakukan banyak hal di luar jam belajar.

Adapun kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMA Triwibawa Jakarta sangat minim sekali yaitu ekstrakurikuler komputer, hal tersebut dikarenakan kurangnya dukungan dana dan sarana prasarana yang ada.

4.3.6 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam lembaga pendidikan, karena sumber daya manusia merupakan faktor pendorong dan penggerak dari faktor-faktor lain. Sumber daya manusia di SMA Dwi Saka Jakarta terdiri dari kepala sekolah, pendidik dan pegawai.

a. Kepala Sekolah

Saat ini SMA Dwi Saka Jakarta dipimpin oleh Drs. Syafi'i, kepala sekolah menduduki peranan sentral dalam dinamika keberlangsungan kegiatan kependidikan. Karena kepala sekolah merupakan faktor penggerak, pengarah, dan pengendali kegiatan pendidikan di sekolah.

Kepala Sekolah sebagai pemimpin pendidikan merupakan motor penggerak dalam dinamika keberlangsungan kegiatan kependidikan. Kepala sekolah memiliki tanggung jawab yang besar terhadap dinamika keberlanjutan kegiatan kependidikan. Jenis tanggung jawab yang dipikul oleh kepala sekolah meliputi tanggung jawab sebagai pemimpin, supervisi dan administrator.

Tanggung jawab sebagai pemimpin yaitu kepala sekolah hendaknya menjadi contoh dan tauladan bagi semua staf dan dewan guru, siswa maupun masyarakat. Dirinya dituntut memiliki kepribadian yang baik, seperti disiplin, jujur, mendorong kepada guru dan karyawan serta para siswa yang motivasi kerja dan belajarnya rendah, membantu dan memberikan bantuan moral kepada guru dan karyawan yang memiliki masalah baik mengenai pekerjaan maupun pribadi termasuk rumah tangga, sebagai konseptor dalam menyusun rencana program kerja dan lain-lain.

Sebagai supervisor kegiatan yang dilaksanakan oleh kepala sekolah antara lain mengadakan supervisi kepada guru baik dalam melaksanakan tugas akademik

yaitu kegiatan pembelajaran, mengontrol kelengkapan administrasi guru, membimbing guru yang cara mengajarnya masih di bawah standar yang diharapkan.

Sedangkan sebagai administrator tugas yang dilaksanakan oleh kepala sekolah seperti membuat kelengkapan administrasi kepala sekolah, merancang membuat kelengkapan sarana dan prasarana, fasilitas belajar, menanda tangani surat masuk dan keluar dan lain-lain.

Sulit memisahkan antara ketiga jenis tanggung jawab tersebut. Prinsipnya segala sesuatu yang dianggap belum ada dan atau masih kurang baik untuk pengembangan lembaga, kepala sekolah turun tangan secara langsung baik itu sebenarnya menjadi tugas dan tanggung jawab guru, karyawan maupun penjaga kebersihan atau pesuruh.

Kegiatan kependidikan di sekolah bisa berjalan lancar, dan dinamis apabila terdapat kerja sama berbagai unsur yang ada di sekolah. Kepala sekolah, guru, karyawan dan komite sekolah selaku wakil dari orang tua siswa secara sinergi menjalin hubungan kerja sama dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah disepakati.

b. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pengelolaan pendidikan di sekolah memerlukan tenaga yang berkompeten sesuai dengan bidang keahliannya karena jika suatu urusan atau pekerjaan diserahkan pada orang yang bukan ahlinya maka hasilnya kemungkinan besar tidak maksimal. Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan adalah sumber daya manusia yang sangat diperlukan oleh sekolah dalam mengembangkan manajemen berbasis sekolah. Oleh sebab itu eksistensinya memegang peranan sentral dalam mencapai tujuan sekolah. Adapun data keadaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di SMA Dwi Saka Jakarta adalah sebagai berikut:

Tabel 13 :
Keadaan Tenaga Pendidik SMA Dwi Saka Jakarta
Tahun 2009/2010

Jenis Kelamin	Kualifikasi Pendidikan					Status		Total
	D2	D3	S1	S2	S3	Tetap	Tdk Tetap	
Laki-laki	-	2	1	-	-	1	2	3
Perempuan	-	10	1	-	-	1	10	11
Jumlah	-	12	2	-	-	2	12	14

Tabel 14 :
Keadaan Tenaga Kependidikan SMA Dwi Saka Jakarta
Tahun 2009/2010

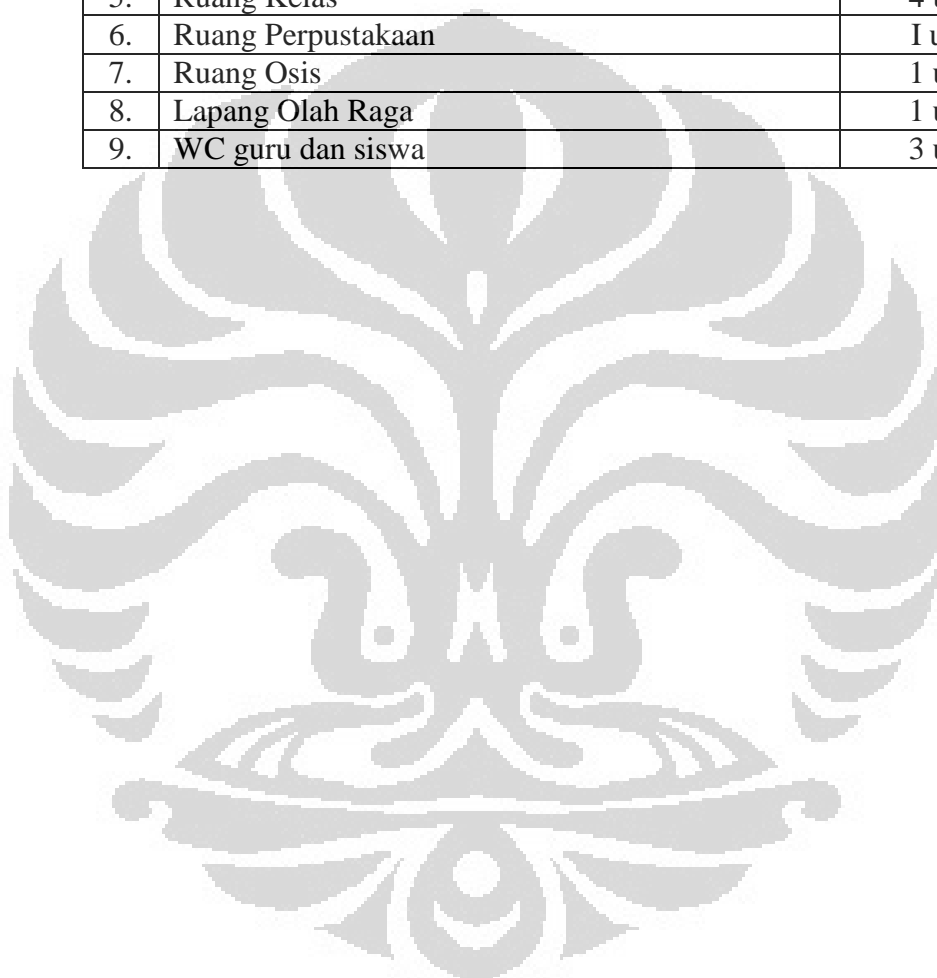
Jenis Kelamin	Kualifikasi Pendidikan					Status		Total
	SD	SMP	SMA	D3	S1	Tetap	Tdk Tetap	
Laki-laki	-	-	-	2	-	1	1	2
Perempuan	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	2	-	1	1	2

4.3.7 Sarana dan Prasarana

Keberhasilan dalam sebuah proses pendidikan bukan hanya ditentukan oleh keahlian dari para pendidiknya, namun juga sangat ditentukan oleh berbagai ragam sarana prasarana yang dimiliki, untuk membantu mengembangkan keahlian dan ilmu pengetahuan yang diberikan kepada para siswa. SMA Dwi Saka Jakarta memiliki berbagai sarana prasarana yang dapat digunakan oleh siswa dan guru dalam mengembangkan ilmu pengetahuan tersebut. Adapun sarana prasarana yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Tabel 15 :
Keadaan Sarana Prasarana SMA Dwi Saka Jakarta
Tahun 2009/2010

No.	Sarana Prasarana	Keterangan
1.	Gedung sekolah	1 unit
2.	Mushala	1 unit
3.	Ruang Kepala Sekolah	1 unit
4.	Ruang Tata Usaha	1 unit
5.	Ruang Kelas	4 unit
6.	Ruang Perpustakaan	1 unit
7.	Ruang Osis	1 unit
8.	Lapang Olah Raga	1 unit
9.	WC guru dan siswa	3 unit



BAB 5

ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menguraikan tentang hasil penelitian Analisis Implementasi Kebijakan Ujian Nasional pada Sekolah Menengah Atas (SMA) dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi suatu kebijakan tersebut, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Hasil Ujian Nasional berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan Nasional bahwa Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2010 pada tingkat SMA dari total peserta 59.898 siswa, yang lulus 54,271 siswa (90,6%) dan yang tidak lulus 5.426 siswa (9,09 persen), menurun dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai 97%, dengan rincian di Kota Jakarta Pusat sebesar 83,547%, Kota Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu 83,34%, Kota Jakarta Barat 95,25%, Kota Jakarta Selatan 92,09%, dan Kota Jakarta Timur 92,82%. Pada sekolah dengan tingkat kelulusannya dalam Ujian Nasional 2009/2010 nol persen (0%) di provinsi DKI Jakarta yaitu; Kota Jakarta Pusat 3 sekolah (88 peserta), Kota Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu 1 sekolah (4 peserta), Kota Jakarta Barat 1 sekolah (25 peserta), Kota Jakarta Selatan 2 sekolah (6 peserta), Kota Jakarta Timur 3 sekolah (20 peserta).

Untuk itu pemerintah daerah DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya, diantaranya dengan pembangunan sarana prasarana pendidikan dan meningkatkan kualitas guru dengan melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 dan melalui diklat-diklat. Kasubdis SMA Dinas Dikmenti DKI Jakarta, Amsani Idris mengatakan: upaya meningkatkan mutu dan kualitas guru dilakukan secara berjenjang, guru yang belum S2 kita dorong untuk meneruskan ke jenjang S2, apalagi kalau mereka itu memiliki kemampuan yang lebih sehingga bisa mendapatkan beasiswa. Sebagaimana yang diutarakan oleh Edward III sumber daya memiliki posisi sangat penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Tanpa kecukupan sumber daya, apa yang direncanakan tidak akan sama dengan apa yang akhirnya diterapkan.

Adapun gambaran data keadaan jumlah guru Sekolah Menengah Atas (SMA) di Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

Tabel 16 :
Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA)
Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009/2010

Pendidikan	SMA		
	Negeri	Swasta	Jumlah
SLTA Keg.	4	32	36
SLTA B. Keg.	3	59	62
PGSLP/D-1	6	32	38
PGSLA/D-2	3	40	43
Sarmud/D-3	284	516	800
Sarjana/S-1	5.561	7.207	12.768
Psc. Sarjana/S-2	566	435	1.001
Doktor/S-3	11	8	19
Jumlah	6.438	8.329	14.767

Sumber data : Disdik DKI Jakarta

Pembiayaan dalam pelaksanaan ujian nasional dibeban pada anggaran APBN dan APBD. Untuk menunjang persiapan pelaksanaan ujian nasional Dinas Pendidikan Provinsi dalam upaya untuk peningkatan perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan pada tahun 2010 telah memberikan bantuan sosial Biaya Operasional Pendidikan pada siswa sebesar Rp. 75.000,-/bulan.

Sebelum pelaksanaan ujian nasional, Kementerian Pendidikan Nasional melalui Badan Standar Nasional Pendidikan telah melakukan sosialisasi di tingkat propinsi dan kabupaten/kota. Untuk memperlancar informasi yang berkaitan

dengan ujian nasional melalui buku pedoman, website dan surat edaran. Upaya telah yang dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi untuk implementasi kebijakan ujian nasional yaitu melakukan sosialisasi pelaksanaan ujian nasional dengan mengundang para pelaksana di tingkat kabupaten/kota dan sekolah. Tujuan sosialisasi ini adalah untuk memberi pemahaman tentang penyelenggaraan UASBN untuk SD/MI, SDLB, dan UN untuk SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, dan SMK kepada Penyelenggara UN dan UASBN Tingkat Provinsi, Kab/Kota dan pihak terkait.

Adapun sumber bahan sosialisasi adalah (1) Permendiknas No. 74 Tahun 2009 tentang Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) Sekolah/Madrasah (SD/MI/SDLB) Tahun Pelajaran 2009/2010; (2) Permendiknas No 75 Tahun 2009 tentang Ujian Nasional (UN) SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, dan SMK Tahun Pelajaran 2009/2010; (3) Permendiknas No 84 Tahun 2009 tentang Perubahan Permendiknas Nomor 75 Tahun 2009 tentang Ujian Nasional (UN) SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, dan SMK Tahun Pelajaran 2009/2010; (4) POS UN SMA/MA Tahun Pelajaran 2009/2010 (5) POS SMP/MTs, SMPLB, SMALB, dan SMK Tahun Pelajaran 2009/2010; (6) POS UASBN Tahun Pelajaran 2009/2010.

Untuk faktor struktur organisasi yang menyangkut Standard Operating Procedures dan koordinasi, Dinas Pendidikan DKI Jakarta dalam mengimplementasi kebijakan ujian nasional sebagai acuannya adalah Prosedur Operasional Standar yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Bersama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 01 Tahun 2010 Nomor Kw.09.04/Hk.00.7/86/2010 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional, Ujian Nasional Dan Ujian Sekolah/Madrasah Tahun Pelajaran 2009/2010.

Sekolah penyelenggara ujian nasional yaitu (1) Sekolah/Madrasah yang dapat menyelenggarakan UN dan Ujian Sekolah/Madrasah adalah sekolah/madrasah yang berakreditasi, memiliki peserta UN minimal 20 (dua puluh) peserta didik, dan memiliki fasilitas ruang yang layak kalau yang ditetapkan oleh Kepala Dinas/Kepala Kanwil Departemen Agama untuk Madrasah. (2)

Sekolah/Madrasah yang tidak ditetapkan sebagai penyelenggara UN dan atau ujian sekolah/madrasah bergabung pada sekolah/madrasah yang ditetapkan sebagai penyelenggara UN dan atau Ujian sekolah/madrasah; (3) Jumlah sekolah penyelenggara sebanyak 1.127 sekolah, terdiri dari tingkat SMA sebanyak 477 sekolah, MA sebanyak 81 sekolah, SMK sebanyak 560 sekolah, dan SMALB sebanyak 9 sekolah.

Adapun jumlah calon peserta Ujian Nasional SMA/MA/SMK/SMALB/MA di DKI Jakarta Tahun Pelajaran 2009/2010 sebanyak 59.775 siswa dengan rincian : Jakarta Pusat 6.257 siswa, Jakarta Utara 7.898 siswa, Jakarta Barat 9.891 siswa, Jakarta Selatan 13.385, Jakarta Timur 17.663 siswa.

5.1 Implementasi Kebijakan Ujian Nasional

Setelah penulis mengadakan penelitian di SMA Negeri 68 yang merupakan sekolah unggulan dengan fasilitas yang memenuhi standar nasional pendidikan, kemudian di SMA Triwibawa Jakarta sebagai sekolah swasta yang memiliki fasilitas yang memadai dengan kondisi kemampuan siswanya menengah ke atas dilihat dari kemampuan ekonomi orangtuanya, serta SMA Dwi Saka Jakarta, yang merupakan sekolah swasta dengan fasilitas yang memperhatikan serta keberadaan siswanya yang kebanyakan anak yatim piatu.

Penelitian ini dilakukan dengan mencoba menganalisis kebijakan Ujian Nasional di sekolah dengan berpijak pada empat faktor (komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi) yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan Ujian Nasional. Faktor komunikasi merupakan prasyarat pertama bagi implementasi kebijakan Ujian Nasional, karena suatu kebijakan dapat berhasil dengan baik ketika para pembuat kebijakan mentransmisikan petunjuk kebijakan dengan jelas akurat dan tepat kepada pelaksana kebijakan. Keberhasilan Ujian Nasional sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pembuat kebijakan dalam mengkomunikasikan kebijakan tersebut, dikarenakan Ujian Nasional merupakan kebijakan yang memiliki kompleksitas tinggi sehingga diperlukan komunikasi yang efektif baik dari segi pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan maupun sasaran kebijakan.

Sumber daya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan sekolah yang efektif. Sumber daya yang meliputi; sumber daya manusia, informasi, kewenangan dan sumber daya yang ada (dana, sarana prasarana), ketersediaan sumber daya tersebut sangat mempengaruhi dalam implementasi Ujian Nasional. Karena tanpa sumber daya, kebijakan Ujian Nasional tidak dapat diterapkan. Dalam melaksanakan kebijakan Ujian Nasional di sekolah diperlukan sumber daya manusia yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas, kecukupan jumlah dan *skill* petugas pengelola sangat diperlukan dalam melaksanakan pelayanan pelaksanaan Ujian Nasional di sekolah, pengawasan Ujian Nasional serta pengadministrasian hasil Ujian Nasional. Selain itu sumber daya informasi dan kewenangan tak kalah pentingnya dengan SDM, dikarenakan kebijakan Ujian Nasional di sekolah merupakan kewenangan pemerintah pusat dan daerah sehingga memerlukan koordinasi yang baik dan tupoksi masing-masing pihak.

Keberhasilan implementasi kebijakan Ujian Nasional di sekolah juga dipengaruhi oleh bagaimana karakteristik implementor dan *resipient* dengan berbagai permasalahan yang dihadapinya. Sikap atau disposisi memegang peranan penting dalam menerima dan melaksanakan suatu kebijakan, jika para *implementor* memperhatikan suatu kebijakan khusus, maka dimungkinkan bagi *implementor* dapat melaksanakan suatu kebijakan sebagaimana yang dimaksudkan para pembuat keputusan. Namun ketika sikap atau perspektif *implementor* ini berbeda dari para pembuat keputusan, maka proses implementasi kebijakan menjadi rumit dan gagal. Begitupun yang akan terjadi dalam menerapkan kebijakan Ujian Nasional di sekolah, diperlukan kesediaan para pelaksana kebijakan untuk menerima dan melaksanakan sesuai dengan para pembuat kebijakan.

Struktur birokrasi mengandung dua karakteristik utama yaitu Prosedur Pengoperasian Standar (*Standard Operating Procedure/ SOP*) dan *Fragmentasi*. Struktur organisasi-organisasi yang melaksanakan kebijakan Ujian Nasional sangat mempengaruhi keberhasilan kebijakan tersebut. Dengan menggunakan SOP atau petunjuk pelaksanaan kebijakan Ujian Nasional dapat menyeragamkan tindakan-tindakan para pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan yang

kompleks dan tersebar luas dalam penerapan kebijakan. Selain itu kebijakan Ujian Nasional merupakan kewenangan pemerintah pusat dan daerah sehingga terjadi penyebaran tanggung jawab baik tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Dalam implementasi kebijakan Ujian Nasional di sekolah diperlukan struktur birokrasi yang sistematis, dalam rangka mendukung keberhasilan kebijakan tersebut. Hal ini berkaitan dengan bagaimana tanggung jawab pelaksana dalam mendistribusikan soal, bagaimana prosedur pengawasan pelaksanaan Ujian Nasional termasuk di dalamnya pemilihan petugas yang menjadi Panitia maupun para pengawas yang kompeten baik dari sekolah maupun dari dinas pendidikan.

Berkaitan dengan kebijakan Ujian Nasional di sekolah yang dilakukan oleh sekolah melalui aktivitas koordinasi dengan dinas pendidikan, paling tidak terdapat dua persoalan mendasar dalam proses implementasinya yaitu kebijakannya sendiri dan lingkungan kebijakan. Dari aspek kebijakannya sendiri dapat dikaji bahwa Ujian Nasional di sekolah tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka perluasan dan pemerataan pendidikan menengah. Dalam hal ini pendekatan kebijakan adalah pendekatan dari atas (*top down policy*) yang dimaksudkan untuk merubah perilaku lingkungan kebijakan. Kebijakan Ujian Nasional di sekolah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara Indonesia yang telah memasuki usia sekolah untuk memperoleh pendidikan menengah.

Kebijakan Ujian Nasional di sekolah merupakan fokus kebijakan pemerintah pusat dalam meningkatkan mutu pendidikan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan Nasional yang pada implementasinya dikembangkan di dinas pendidikan serta secara operasional dilakukan di sekolah. Secara umum merupakan kewenangan dan tanggungjawab sektoral pemerintah pusat dengan melibatkan dinas pendidikan provinsi, kota/kabupaten dan sekolah. Dimana dalam implementasinya di daerah provinsi dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, sedangkan di daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan kabupaten/kota, masing-masing sebagai perpanjangan tangan Kementerian Pendidikan Nasional di daerah provinsi dan di daerah kabupten/kota dan sekolah sebagai penyelenggara langsung pelaksanaan Ujian Nasional.

5.1.1 Permasalahan Implementasi Kebijakan Ujian Nasional di Sekolah

Permasalahan yang muncul berkaitan dengan kebijakan Ujian Nasional di sekolah antara lain adalah adanya kesenjangan koordinasi antara dinas pendidikan provinsi dengan pemerintah provinsi di tingkat provinsi dan antara dinas pendidikan kabupaten/kota dengan pemerintah daerah kabupaten/kota di kabupaten/kota dengan sekolah, kesenjangan terjadi ketika melakukan komunikasi serta pengadministrasian, sehingga seringkali terjadi kekurangan soal, kekurangan lembar jawaban yang sebenarnya sudah dilaporkan melalui data-data Ujian Nasional yang dibuat sekolah dan di setorkan ke dinas pendidikan masing-masing kota dan kabupaten, untuk selanjutnya di kumpulkan di dinas pendidikan provinsi dan dilaporkan ke pusat, dengan pola demikian seharusnya terjadi koordinasi yang baik, namun kurang terampilnya sumber daya manusia serta tidak rasionalnya petugas yang terlibat memungkinkan terjadinya permasalahan tersebut.

Hal lain terjadi berkaitan dengan kultur birokrasi organisasi pemerintah daerah dengan dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota sekalipun memiliki hubungan struktural dengan pemerintah daerah, tapi masing-masing Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dirasakan sulit berkoordinasi sekolah secara langsung. Dengan demikian maka keterkaitan itu harus berjalan secara sinergi dan seimbang, artinya pemerintah pusat dan provinsi bisa memberi bantuan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota agar mereka lebih leluasa dan tidak menghadapi hambatan dalam melakukan upaya-upaya optimalisasi sesuai dengan potensi dan kearifan lokal masing-masing kabupaten/kota dalam pencapaian perluasan dan pemerataan pendidikan menengah.

Peningkatan peran dan alih tanggung jawab dalam implementasi kebijakan Ujian Nasional di sekolah tersebut akan sangat dipengaruhi oleh kondisi-kondisi internal dan eksternal pemerintahan daerah sebagai fokus tempat terselenggaranya sekolah dimaksud, sehingga keberhasilan pemerataan dan perluasan pendidikan menengah termaksud akan sangat ditentukan pula oleh optimalisasi dan upaya-upaya strategis dan sinergis dari pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap faktor-faktor yang mempengaruhinya yang didukung oleh dukungan dana yang

memadai dari pemerintah, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Hal ini tidak langsung bisa berjalan seperti apa yang diharapkan atau semudah seperti apa yang dibayangkan, karena akan terkait dengan faktor-faktor ekonomi, sosial, politik, budaya dan karakteristik wilayah serta faktor-faktor lain yang berkaitan dengan individu kepemimpinan daerah dan respon *stakeholders* pendidikan.

Dimana berdasarkan karakteristik masalahnya, kebijakan Ujian Nasional di sekolah tersebut mempunyai tingkat kesukaran teknis yang relatif tidak kecil untuk di berbagai daerah termasuk dipersulit dengan keragaman karakteristik wilayah dan perilaku kelompok sasaran yang ruang lingkup perubahan perilaku yang dinginkannya sangat besar, sehingga kebijakan tersebut menjadi tidak mudah untuk diimplementasikan dalam pencapaian sarannya.

Ketidakhadiran tersebut muncul berkaitan dengan variabel-variabel yang berasal dari kebijakan itu sendiri dan bertambah besar oleh pengaruh-pengaruh variabel dari lingkungan luar kebijakan. Variabel-variabel yang berasal dari kebijakan itu sendiri adalah ketidakmampuan kebijakan dalam menstrukturkan secara tepat proses implementasi, antara lain : (1) adanya permasalahan yang kurang tegas dan *inkonsistensi* dalam menetapkan prosedur teknis dan petunjuk pelaksanaan operasional kebijakan Ujian Nasional, antara pusat, provinsi hingga ke rayon sekolah; (2) tidak tepatnya pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya; (3) longgarnya keterpaduan hirarkhis dalam dan diantara lembaga-lembaga pelaksana; (4) tidak tepatnya rekrutmen pejabat pelaksana; dan (5) adanya akses formal pihak luar. hal ini sering kali muncul dalam pendistribusian dan biaya pelaksanaan yang sering kali tiap daerah berbeda. Misalnya biaya untuk operasional yang terlambat, nominasi yang kurang untuk para pengawas dan sebagainya.

Sedangkan variabel-variabel dari luar kebijakan yang mempengaruhi implementasi kebijakan, antara lain : (1) kondisi dan lokasi sekolah yang berbeda dilihat dari letak sekolah ada yang di kota ada yang di pinggiran, sehingga menghambat transportasi; (2) sikap tidak patuh dan tingkat kepedulian yang rendah dari kelompok sasaran; dan (3) rendahnya komitmen, moral dan kemampuan pejabat-pejabat pelaksana; (4) target pencapaian nilai Ujian Nasional

yang dicanangkan oleh pemerintah dirasakan membebani sekolah dan (5) tuntutan masyarakat dalam hal ini orang tua menekan keberhasilan belajar siswa pada Ujian Nasional sebagai sesuatu yang harus, kegagalan seperti sesuatu yang berdosa.

Kondisi-kondisi tersebut ditunjang oleh permasalahan perbedaan persepsi antara masyarakat, sekolah di dalamnya guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan, dinas pendidikan dan pemerintah tentang kebijakan Ujian Nasional di sekolah, hal lain berkaitan dengan kekhawatiran orang tua (masyarakat) akan kemampuan sekolah dalam menjaga kualitas pembelajaran yang dilakukan guru, kualitas pelayanan pendidikan, kualitas lulusan. Berkaitan dengan pelaku, munculnya persepsi yang dalam di lingkungan sekolah berkaitan dengan tatacara penyaluran dan pendistribusian soal yang seringkali terlambat dan kurang ke sekolah, atau waktu pengambilan berkas yang terbatas, artinya berkas Ujian Nasional seringkali disimpan di rayon dan diambil ketika akan melaksanakan Ujian Nasional, tanpa mempertimbangkan jarak tempuh dan waktu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, diperoleh informasi bahwa kepala sekolah dan guru merasa terbebani dengan adanya Ujian Nasional yang kriteria kelulusannya dianggap tinggi, guru merasa tidak dihargai keberhasilan anak yang selama 3 tahun di bina hanya ditentukan oleh beberapa jam dan beberapa mata pelajaran yang di Ujian Nasional kan.

5.2 Hasil Penelitian

5.2.1 Keadaan Informan dan Responden Penelitian

Dalam penelitian ini karakteristik informannya adalah Dinas Pendidikan Kota Jakarta Pusat, Kepala Sekolah dan Guru, yang menjadi informan berjumlah 1 orang dari dinas pendidikan, 3 orang kepala sekolah dan 12 orang guru yang mata pelajaannya di Ujian Nasional-kan

Pengambilan sampel ini secara purposif, mendadak dan atas rekomendasi kepala sekolah yang bersangkutan, dalam mengumpulkan datanya peneliti melakukan wawancara. Sementara untuk informan dari dinas pendidikan diwakili oleh staf yang terlibat dalam pelaksanaan Ujian Nasional, pengumpulan data diperoleh melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi.

Berdasarkan hasil wawancara, diskusi dengan informan diperoleh informasi secara umum pada SMA Negeri 68 lebih siap dalam penyelenggaraan ujian nasional. Sedangkan SMA Triwibawa Jakarta dan SMA Dwi Saka Jakarta siap tidak siap harus siap, karena mereka berkomitmen untuk mensukseskan kebijakan Ujian Nasional. Untuk kondisi ekonomi orang tua siswa SMA Negeri 68 Jakarta, pekerjaan yang ditekuni orang tua siswa cukup bervariasi mulai dari pegawai negeri, karyawan swasta, wiraswasta, pedagang, sampai dengan buruh, dan lain-lain. Kalangan masyarakat demikian secara tidak langsung berpengaruh dalam melakukan persiapan Ujian Nasional di sekolah masing-masing. Untuk pemberian jam tambahan pendalaman materi, try out dalam rangka mensukseskan Ujian Nasional ditunjang oleh pendanaan dari para orang tua dan pemerintah daerah.

Sedangkan kondisi SMA Triwibawa Jakarta jauh berbeda baik dari segi guru, sarana prasarana maupun latar belakang siswa sebagaimana yang disampaikan Abdul Haris, selaku kepala sekolah SMA Triwibawa Jakarta.

“...Ibunya kebanyakan kuli nyuci. Paling hebat kerja di perusahaan. Warga sekitar sini. Makanya saya katakan, Kepala Sekolahnya kumis, anak-anak didiknya tinggal di daerah kumis; kumuh dan miskin. Tinggalnya di real estate kompleks DPR, Daerah Pinggiran Rel. Kalau mau sekolah saja, mereka kita giring dulu untuk belajar. Belum pulang, mereka sudah mau pulang. Belum dioptimalkan saja kita adakan pendalaman materi, kemudian kita ikut-sertakan try out sampai dua kali, tapi grafik belajar mereka sangat minim. Sehingga kami pernah menawarkan pada mereka lewat orangtuanya, “Kalau saja putra-putri Bapak-Ibu belum mampu mengikuti ujian, silakan ditunda dulu sehingga tahun depan bisa ada peluang ikut ujian.” Mereka tetap menghendaki ikut ujian. Mereka bilang, “Kalau tidak lulus Ujian Nasional, kita ikut Paket C saja.” Akhirnya alhamdulillah Pemerintah mengadakan Ujian Ulang tempo hari. Hampir 70% mereka lulus, untuk Ujian Ulang. Itu pun kami paksakan”.

Demikian juga kondisi yang terjadi di SMA Dwi Saka Jakarta menurut Syafi'i, selaku kepala sekolah, Bangunan dengan papan nama SMA Dwi Saka, yang menempel di sebelah pintu masuk, itu lebih mirip kamar mandi umum di permukiman kumuh. Ruang guru yang ada di sebelah kanan pintu masuk hanya diisi satu bangku kayu panjang. Ruang kelasnya hanya lantai semen yang bolong di sana-sini. Sekat dindingnya tidak penuh. Satu-satunya pemandangan yang cukup menyegarkan mata hanya catnya yang berwarna hijau muda.

Para siswanya bekas pemakai narkoba, pemulung, hingga anak yatim-piatu, dan mayoritas mereka murid "buangan" dari sekolah negeri. Namun para guru dituntut mampu mendidik mereka dengan kurikulum dan standar yang sama dengan sekolah negeri. Alhasil, 25 siswa dan 16 siswi kelas XII yang diajar oleh 16 guru tak lulus ujian nasional. Padahal tahun lalu hanya lima orang yang gagal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Syafi'i kepala sekolah SMA Dwi Saka Jakarta. Pihak sekolah dengan segala kondisi yang ada berusaha seoptimal mungkin untuk mensukseskan pelaksanaan ujian nasional.

"...Sekolah sudah kayak begini. Saya datang dari Bekasi, pakai transport. Kalau saya pribadi lebih mengalah. Saya ngomong ke orangtua murid. Tetapi ngomong doang, murid tidak ada yang. orangtua istilahnya sudah tinggal besok ujian kita punguti PM biayanya Rp 150 ribu sebagai ganti uang transport dan snack atau makan siang, tetap saja yang bayar 4-5 orang. Akhirnya mau-mau saja orangtua, tapi kenyataannya yang bayar 3-4 orang. Akhirnya kita dan Yayasan mencari-cari untuk nomboki guru-guru. Pada saat gajian, Yayasan mencari utangan. Guru tidak mau tahu. Pas tanggal muda, guru berani menghadap saya. Minta honor. Saya punya rezeki, saya kasih. Ini sudah enam tahun (sejak 2005) jadi Kepala Sekolah. Pemerintah tetap kita harapkan memberi bantuan."

Kebijakan Ujian Nasional di SMA Negeri 68 Jakarta, SMA Triwibawa Jakarta dan SMA Dwi Saka Jakarta dilaksanakan mulai tahun ajaran 2003/2004. Untuk di SMA Negeri 68 Ujian Nasional dilaksanakan di lokasi sekolah secara langsung, sementara untuk di SMA Triwibawa dan SMA Dwi Saka awalnya

mengindik ke sekolah lain, gambaran peserta Ujian Nasional untuk ketiga sekolah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 177
Daftar Peserta Ujian SMA N 68 Jakarta,
SMA Triwibawa Jakarta, SMA Dwi Saka Jakarta

Tahun Ajaran	Peserta UN (siswa)		
	SMAN 68	SMA Triwibawa	SMA Dwi Saka
2009/2010	276	34	36

Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2010 pada tingkat SMA dari total peserta 59.898 siswa, yang lulus 54,271 siswa (90,6%) dan yang tidak lulus 5.426 siswa (9,09 persen), menurun dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai 97%, dengan rincian di Kota Jakarta Pusat sebesar 83,547%, Kota Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu 83,34%, Kota Jakarta Barat 95,25%, Kota Jakarta Selatan 92,09%, dan Kota Jakarta Timur 92,82%. Pada sekolah dengan tingkat kelulusannya dalam Ujian Nasional 2009/2010 nol persen (0%) sekolah kelulusan 0% di provinsi DKI Jakarta yaitu; Kota Jakarta Pusat 3 sekolah (88 peserta), Kota Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu 1 sekolah (4 peserta), Kota Jakarta Barat 1 sekolah (25 peserta), Kota Jakarta Selatan 2 sekolah (6 peserta), Kota Jakarta Timur 3 sekolah (20 peserta). Berikut tabel daftar sekolah, jenjang SMA berdasarkan jumlah nilai Ujian Nasional setelah dilakukan ujian ulangan di ketiga Sekolah Menengha Atas yaitu, SMAN 68 Jakarta, SMA Triwibawa Jakarta, dan SMA Dwi Saka Jakarta tahun pelajaran 2009/2010.

Tabel 188
Daftar Nilai Ujian Nasional
SMAN 68 Jakarta, SMA Triwibawa, SMA Dwi Saka
Tahun Pelajaran 2009/2010

Nama Sekolah	IPS				IPS			
	Rerata	Peserta	TL	%	Rerata	Peserta	TL	%
SMAN 68	8,20	171	-	--	7,76	105	-	-
SMA Triwibawa	-	-	-	-	5,61	36	20	55,56
SMA Dwi Saka	-	-	-	-	5,42	34	26	76,47

5.2.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Ujian Nasional pada Jenjang Sekolah Menengah Atas

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Nugroho (2008:436) yang telah dikemukakan sebelumnya pada bab pendahuluan bahwa rencana adalah 20% keberhasilan, implementasi adalah 60% sisanya, 20% sisanya adalah bagaimana mengendalikan implementasi. Pada bagian ini menjelaskan mengenai analisis implementasi kebijakan Ujian Nasional di sekolah dilihat dari persiapan dan pelaksanaan Ujian Nasional di SMAN 68 Jakarta, SMA Triwibawa Jakarta dan SMA Dwi Saka Jakarta. Analisis disusun berdasarkan hasil pengumpulan data yang diperoleh dari wawancara dengan informan dinas pendidikan, kepala sekolah dan guru yang terlibat langsung dalam kepanitiaan kegiatan Ujian Nasional di sekolah masing-masing. Analisis implementasi kebijakan dilakukan dengan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C Edward III.

Adapun dalam hal ini yang akan dianalisis adalah Kebijakan Ujian Nasional di sekolah SMAN 68 Jakarta dengan fasilitas yang memadai, SMA Triwibawa Jakarta sekolah swasta dan SMA Dwi Saka Jakarta sekolah yang siswanya kebanyakan anak yatim, ketiga karakteristik sekolah yang berbeda, Harapan yang ingin diwujudkan dalam analisa ini adalah mengetahui apakah kebijakan Ujian Nasional di sekolah memiliki kesesuaian dengan konsep yang dikemukakan George C Edward III, berusaha membangun kritik demi mencapai implementasi kebijakan publik yang lebih baik.

Sebelum menganalisis hasil penelitian terlebih dahulu diuraikan tahapan penelitian kualitatifnya pada tahap pertama peneliti telah mengumpulkan data mentah melalui wawancara, dokumentasi dan sumber literatur yang ada, kemudian dirubah dalam bentuk transkrip yaitu bentuk tulisan kemudian dibuat koding setelah dikoding, dibuat kategorisasi data, triangulasi data kemudian disimpulkan.

a. Faktor Komunikasi

Menurut Hovland, Janis & Kelley Komunikasi adalah suatu proses melalui mana seseorang (komunikator) menyampaikan stimulus (biasanya dalam bentuk kata-kata) dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang-orang lainnya, sedangkan Berelson & Steiner menjelaskan bahwa komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar, angka-angka, dan lain-lain (Riswandi, 2006). Sedangkan Harold Lasswell menyebutkan komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang menjelaskan “siapa” “mengatakan apa” “dengan saluran apa”, “kepada siapa” , dan “dengan akibat apa” atau “hasil apa”. (*who says what in which channel to whom and with what effect*). Paradigma Lasswell tersebut menunjukkan bahwa komunikasi meliputi lima unsur, yakni: komunikator, pesan, media, komunikan dan efek. Laswell menggunakan lima pertanyaan yang perlu ditanyakan dan dijawab dalam proses komunikasi, yaitu: siapa yang berbicara, apa isi pesan atau isi komunikasi, menggunakan media apa, siapa yang mendengarkan, dan pertanyaan terakhir adalah apa efek dari komunikasi tersebut.

Berkaitan dengan kebijakan George C Edward III menyatakan bahwa *communication* adalah penyampaian pesan/informasi mengenai kebijakan dan pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Pesan tersebut harus jelas, akurat, dan konsisten sehingga pelaksana kebijakan tahu apa yang harus dilakukan. Menurut George C Edward III dalam analisis implementasi kebijakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi yaitu: *transmission* atau cara penyampaian pesan, *clarity* atau kejelasan pesan.

Analisis dimulai dari faktor komunikasi, implementasi kebijakan Ujian Nasional di sekolah telah berjalan secara efektif, data tentang jadwal pembagian kelas penugasan pengawas standar kelulusan serta petunjuk teknis sudah dirancang sedemikian rupa sehingga mudah dipahami oleh sekolah sebagai penyelenggara Ujian Nasional. Kebijakan tersebut dirancang oleh pemerintah, yaitu Kementerian Pendidikan Nasional dan jajaran dibawahnya termasuk sub dinas pendidikan kota sampai dengan ke sekolah. Pelaksana kebijakan adalah aparat pemerintahan kota, antara dinas pendidikan menengah kota. Sedangkan

obyek yang diatur adalah pemetaan wilayah, pembagian tugas mengelola Ujian Nasional masing-masing, pendistribusian soal, pengawasan dan pelaksanaan teknis.

Dalam penelitian ini ditemukan alur komunikasi antara beberapa pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan Ujian Nasional ini adalah sebagai berikut :

Gambar 3 :
Alur Komunikasi Pelaksanaan Ujian Nasional

Pusat 1. BSNP 2. Kemdiknas 3. Kemenag 4. MR-PTN	Provinsi 1. Gubernur 2. PTN 3. Dinas Pendidikan 4. Kanwil Kemenag 5. Instansi Terkait	Kab/Kota 1. Bupati/Walikota 2. PT 3. Dinas Pendidikan 4. Kantor Kemenag	Satuan Pendidikan 1. PT 2. Kepala Sekolah 3. Guru 4. Pengawas
--	---	--	--

Sumber : Badan Standar Nasional Pendidikan

Dalam program penyelenggaraan Ujian Nasional ini dibuat oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional atau sebelumnya bernama Departemen Pendidikan Nasional disosialisasikan kepada pihak lain yang berkepentingan melalui sosialisasi program. Sosialisasi dilakukan secara berjenjang atau tingkatan, yaitu: sosialisasi tingkat pusat, sosialisasi tingkat provinsi, sosialisasi tingkat kabupaten/kota, sosialisasi tingkat rayon dan sosialisasi tingkat sekolah.

Sosialisasi tingkat pusat dilakukan untuk menginformasikan program penyelenggaraan ujian nasional melalui workshop maupun media massa kepada pemerintah provinsi dan dinas pendidikan dengan tujuan sosialisasi ini adalah untuk memberi pemahaman tentang penyelenggaraan UASBN untuk SD/MI, SDLB, dan UN untuk SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, dan SMK kepada Penyelenggara UN dan UASBN Tingkat Provinsi, Kab/Kota dan pihak terkait. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional dan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dengan mengundang gubernur dan kepala dinas pendidikan.

Sosialisasi tingkat propinsi, sosialisasi dilakukan oleh dinas pendidikan propinsi untuk menginformasikan program penyelenggaraan ujian nasional kepada suku dinas pendidikan kabupaten/kota melalui surat edaran dan workshop.

Sosialisasi tingkat kota, sosialisasi dilakukan oleh dinas pendidikan kota Jakarta Pusat untuk menginformasikan program penyelenggaraan ujian nasional kepada sekolah dalam hal ini yang di undang adalah Kepala Sekolah dan pihak yang terkait melalui kegiatan workshop, surat edaran dan media massa.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, cara penyampaian atau transmisi program penyelenggaraan ujian nasional dilakukan secara langsung misalnya pelatihan, workshop, seminar dan lain sebagainya, seperti yang jelaskan oleh Pono Fadlullah, Kepala Sekolah SMAN 68 Jakarta.

Penjelasan tersebut juga dikemukakan oleh Pono Fadlullah, selaku Kepala Sekolah SMAN 68 Jakarta :

“ .. Kami memang tim pengkaji juklak dan juknis sehingga setelah juklak dan juknis terusun, kami sosialisasikan bertingkat, dari pihak panitia penyelenggara, lalu turun kepada kepala sekolah, lalu guru bidang studi yang diujikan nasional dan semua masyarakat. Mass media juga perlu dipahami secara umum. Dari Dinas Pendidikan kemudian kepala bidang, kepala bagian, kepala sekolah, guru-guru bidang studi yang diujikan, lalu ke orangtua murid juga disosialisasikan “

Jika ada perubahan ujian nasional informasinya didapat melalui antara lain, sebagaimana yang dikatakan oleh Pono Fadlullah:

“..Dari panitia penyelenggara tingkat dinas, karena tingkat dinas berkewajiban membuat juklak dan juknis sekaligus mensosialisasikan. Untuk sekarang cepat sekali. Kita bisa akses ke internet di website dan email yang disajikan. Kita bisa buka kapan saja.”

Penjelasan tersebut juga disampaikan oleh Abdul Haris, dari SMA Triwibawa Jakarta selaku kepala sekolah:

“...untuk sosialisasi ujian nasional dilakukan secara berjenjang, sosialisasi yang diadakan oleh dinas pendidikan jakarta pusat, dan rayon kemudian sosialisasi di sekolah, Seperti pada hari ini ada pertemuan di SMK 27. Tahun lalu juga di SMK 27 Jakarta Pusat.”

Sedangkan penjelasan dari Syafi'i selaku Kepala Sekolah SMA Dwi Saka sangat singkat, beliau hanya mengatakan:

“..Terus terang kami tidak punya jaringan seperti sekolah-sekolah lain. Kami dapat info dari teman-teman. sosialisai lewat rapat-rapat. Rayon, walaupun ada perubahan sosialisasi. Dari teman, kepala sekolah. Apalagi saya dari sekolah seperti ini, harus super aktif ke teman-teman “

Pesan kepada sekolah yang menjadi objek penelitian pada dasarnya sudah disampaikan dengan jelas, pola penyampaian pesan yang dilakukan Pemerintah adalah melalui sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung, secara langsung biasanya pada saat kegiatan sosialisasi perubahan pelaksanaan Ujian Nasional, jadwal Ujian Nasional kriteria kelulusan serta juklak juknis yang harus diikuti, melalui rapat-rapat K3S (Kelompok Kerja Kepala sekolah) dengan Dinas pendidikan yang diadakan kantor dinas, dimana perwakilan dari sekolah diundang adalah kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Secara tidak langsung biasanya melalui telepon dan surat edaran.

Dari Dinas Pendidikan Jakarta Pusat, menjelaskan bahwa selama ini Dinas Pendidikan Jakarta Pusat telah melakukan sosialisasi terhadap kepala sekolah, guru, maupun siswa

“...Ada dua jalan yang ditempuh, Secara langsung, Dinas Pendidikan mensosialisasikan kepada kepala sekolah guru dan siswa pada event tertentu yang dikemas dalam bentuk kegiatan yaitu; Pengendalian dan Koordinasi Pelaksanaan UN” Secara tidak langsung: yaitu melalui media cetak dan elektronik termasuk internet dan televisi.”

Gambar 4 :
Sosialisasi Ujian Nasional oleh Dinas Pendidikan Jakarta Pusat



Sumber : Website SMKN 27 Jakarta

Sedangkan kepada orang tua dan siswa di SMAN 68 Jakarta telah melakukan komunikasi baik dengan orang tua siswa maupun siswa kelas XII. Kegiatan serupa juga telah dilakukan baik SMA Dwi Saka Jakarta maupun SMA Triwibawa Jakarta dengan tujuan memberikan pengarahan dan penjelasan serta motivasi secara mendalam agar para siswa maupun orang tua siswa memahami dan siap serta tidak merasa khawatir dalam menghadapi pelaksanaan ujian nasional.

Gambar 5 :
Panitia dan Pengawas Ujian Nasional di SMAN 68 Jakarta



sumber : SMAN 68 Jakarta

Sebagaimana yang telah jelaskan oleh Sentialam Manurung Guru Bahasa Inggris SMAN 68 Jakarta:

“..Pada umumnya anak-anak sekarang tidak begitu khawatir, karena mereka anak-anak yang sudah termotivasi. Mereka sudah punya rencana ke depan. Kalau dibanding dengan orang lain, jauh lebih siap. Jarang kita menemukan anak seperti itu. Bahkan sebetulnya mereka malah ingin menggarap soal lebih banyak. Tanpa kita suruh mereka mengerjakannya.”

Untuk melakukan komunikasi dengan siswa, pihak sekolah selalu siap setiap waktu, antara lain dengan melakukan diskusi, sebagaimana yang telah jelaskan oleh S.N. Sugardini, guru Biologi SMAN 68 Jakarta:

“..Di kelas, apa yang dibutuhkan mereka, apa yang tidak diketahui mereka, apa yang mereka ingin tahu..Tergantung guru masing-masing. saya sebagai guru biologi setiap saat seperti itu. Tidak ada, tetapi kami menyiapkan waktu dan kesempatan. Kalau anak butuh kami, kami siap melakukan.”

Penjelasan tersebut juga disampaikan oleh Faridawati, guru Sosiologi SMA Dwi Saka Jakarta untuk melakukan komunikasi dengan siswa, sehingga siswa termotivasi dan tidak merasa takut dalam menghadapi ujian nasional:

“..Satu, harus siap. Paling tidak apa yang sudah diberikan dipelajari. Kemudian, tidak usah takut, hadapi saja, yang penting kita usaha. Terus banyak beribadah. Puasa, kalau bisa, pada saat menghadapi ujian. Itu pesan saya ke anak.”

Informasi dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.

Dua hal yang penting dibahas berkaitan dengan informasi sebagai yang berpengaruh terhadap sumber daya adalah informasi yang berkaitan dengan bagaimana kebijakan harus dilakukan. Informasi selanjutnya berkaitan dengan aturan atau ketentuan yang harus diketahui berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan. Pada dasarnya informasi yang disampaikan secara berjenjang baik dikalangan instansi pemerintahan yang terkait dengan implementasi kebijakan ujian nasional di sekolah, maupun dari instansi pemerintah (pembuat kebijakan) sampai dengan sekolah (subyek dan obyek kebijakan) dimana terjadi alur komunikasi tiga tahap. Informasi diberikan berdasarkan peraturan yang ada yakni petunjuk pelaksana/petunjuk teknis ujian nasional berupa buku panduan yang disebarkan keseluruh sekolah.

Untuk media informasi yang digunakan di tingkat Dinas Pendidikan adalah melalui sosialisasi dan rapat yang diadakan secara periodik, dilengkapi dengan surat edaran, bahkan sampai dengan media komunikasi tidak langsung seperti penggunaan telepon dan *faksimile*.serta website yang dimiliki oleh dinas pendidikan. Seperti yang dijelaskan oleh Dinas Pendidikan Jakarta Pusat.

“Cetak dan elektronik.....Kurang lebih 4 (empat) bulan sebelum pelaksanaan UN”

Hal tersebut juga dijelaskan oleh Pono Fadlullah, Kepala Sekolah SMAN 68 Jakarta.

“...Kami memang tim pengkaji juklak dan juknis sehingga setelah juklak dan juknis terusun, kami sosialisasikan bertingkat, dari pihak panitia penyelenggara, lalu turun kepada kepala sekolah, lalu guru bidang studi yang diujikan nasional dan semua masyarakat. Mass media juga perlu dipahami secara umum. Dari Dinas Pendidikan kemudian kepala bidang, kepala bagian, kepala sekolah, guru-guru bidang studi yang diujikan, lalu ke orangtua murid juga disosialisasikan.”

Penjelasan tersebut dipertegas oleh Abdul Haris, selaku Kepala Sekolah SMA Triwibawa Jakarta.

“...Dari Rayon, kemudian BSNP.”

Sementara untuk tingkat satuan pendidikan melalui sosialisasi atau pertemuan di sekolah arena dianggap penyampaian informasi yang paling efektif, sosialisasi masyarakat melalui rapat atau pertemuan antara orang tua dengan pihak sekolah. Salah satu indikator yang menunjukkan ketersediaan informasi adalah dengan dimilikinya buku panduan ujian nasional, buku tersebut dicetak di pusat dan didistribusikan secara berjenjang ke provinsi, dilanjutkan ke kabupaten/kota, dan akhirnya ke sekolah.

Kepemilikan panduan ujian nasional oleh sekolah akan berpengaruh terhadap kemampuan sekolah mengelola kegiatan ujian nasional sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Panduan ujian nasional yang telah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama setiap tahun. Namun pada sub bab ini peneliti hanya menerangkan secara umum saja, karena di sub bab sebelumnya pada pembahasan komunikasi telah meliputi pembahasan mengenai informasi, supaya tidak terjadi pengulangan pembahasan hal yang sama.

Dalam menyampaikan informasi kebijakan ujian nasional pihak sekolah disamping mengundang orang tua, siswa dan stakeholder, juga melalui papan

pengumuman yang ada di sekolah. Sebagaimana yang jelaskan oleh Abdul Haris, selaku Kepala Sekolah Triwibawa.

“..pihak sekolah mengundang para orang tua dan siswa kelas XII, menjelaskan bagaimana pelaksanaan ujian nasional, kemudian pihak sekolah menawarkan sharing untuk saling mendukung agar pelaksanaan ujian nasional berjalan sesuai yang diharapkan,..... antara lain menawarkan try out beserta pembiayaannya.”

Paparan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan ujian nasional di SMAN 68 Jakarta sebagai kebijakan dilihat dari segi komunikasi berjalan sudah baik, sedangkan di SMA Triwibawa dan SMA Dwi Saka Jakarta masih membutuhkan perbaikan terutama berkaitan dengan parameter keberhasilan siswa dalam kelulusan ujian nasional.

b. Faktor Sumber Daya

Keberadaan faktor sumber daya dalam rangka implementasi kebijakan ujian nasional memegang peranan sangat peting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Tanpa kecukupan sumber daya, apa yang direncanakan tidak akan sama dengan apa yang akhirnya diterapkan.

Pelaksanaan kebijakan ujian nasional di sekolah cukup memadai dilihat dari sumber daya yang dimiliki sekolah, karena mereka yang menjadi panitia ujian nasional adalah orang-orang yang terlatih berdasarkan pengalaman menjadi panitia, sementara untuk di dinas pendidikan masih membutuhkan peningkatan, karena mereka yang terlibat biasanya disebabkan karena jabatan atau mutasi jabatan, sehingga pengalaman mengelola pelaksanaan ujian nasional dalam aspek manajerial masih lemah. Selain itu, pegawai yang terlibat langsung dalam pelaksanaan ujian nasional masih belum memadai jika dibandingkan dengan jumlah sekolah yang harus dikelola.

Dari sisi *skills* atau kemampuan pelaksana kebijakan, sub dinas pendidikan kota tidak memiliki keluhan yang cukup substansif, dikarenakan koordinasi yang baik antara pusat, dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kota dan

sekolah. Pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional mengadakan sosialisasi dengan mengundang dinas pendidikan provinsi dan dinas kota yang bertujuan untuk pelatihan, mencari solusi masalah yang berkaitan dengan kebijakan ujian nasional dari segi ketepatan sasaran, ketepatan jumlah, ketepatan waktu, ketepatan penggunaan. Selain itu dinas pendidikan provinsi juga sering mengadakan rapat tentang ujian nasional dengan pihak sekolah yang berguna untuk menambah pengetahuan, pengalaman atau wawasan dan persamaan persepsi guna perbaikan implementasi kebijakan ujian nasional di sekolah.

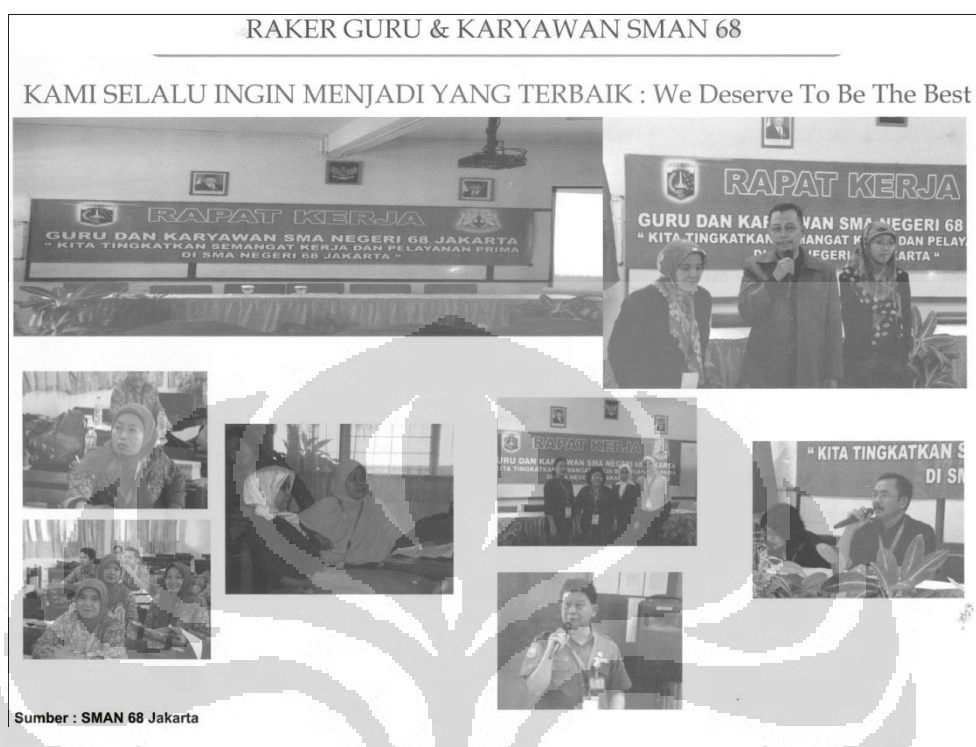
1). Tenaga Pelaksana

Sumber daya yang dimiliki Dinas Pendidikan Jakarta Pusat sudah cukup memadai dalam menyelenggarakan ujian nasional, Sebagaimana yang dijelaskan oleh salah satu petugas dinas pendidikan jakarta pusat

“Petugas terdiri dari: Petugas Provinsi: direkrut dari bagian bidang yang langsung menangani UN (SMA/SMK/SD,SMP) Petugas kotamadya: seluruh kepala seksi, kasubag dan Pejabat fungsiona Umum Senior Pos Rayon: Petugas dari sekretariat rayon sekolah Sekolah: Guru dan Karyawan Sekolah.”

Sementara untuk jumlah dan kualifikasi di tingkat sekolah menengah sebagai subyek dan obyek dari implementasi kebijakan ujian nasional di sekolah untuk sekolah negeri sangat memadai karena jumlah gurunya cukup banyak, dalam hal ini SMAN 68 Jakarta yaitu sebanyak 67 guru sementara untuk sekolah swasta masih sangat minim yaitu SMA Triwibawa sebanyak 19 guru dan SMA Dwi Saka sebanyak 14 guru, berdasarkan hasil temuan peneliti dari tiga sekolah yang diteliti dengan karakteristik yang berbeda, bahwa pihak yang terlibat dalam kegiatan pelaksanaan ujian nasional untuk sekolah negeri dan swasta sangat berbeda.

Gambar 6 :
Raker Guru dan Karyawan SMAN 68 Jakarta



Dalam implementasi kebijakan ujian nasional di SMAN 68 Jakarta, guru mata pelajaran yang di ujian nasionalkan sangat memadai karena sesuai dengan latar belakang pendidikan guru yang dimiliki dan pengalaman telah dimiliki. Disamping itu pihak sekolah sering mengikutsertakan para guru mata pelajaran yang di ujian nasionalkan untuk mengikuti baik seminar, workshop maupun diklat khusus dalam menghadapi persiapan ujian nasional. Seperti yang disampaikan oleh Pono Fadlullah, selaku Kepala Sekolah SMAN 68 Jakarta:

“...Rekrutmennya guru-guru yang sesuai bidangnya dan sudah pernah jadi panitia. Kita tunjuk untuk kita SK-kan sehingga bisa melakukan tugas dengan sangat bertanggung jawab.”

Pendapat tersebut juga dipertegas oleh Syafi'i Kepala Sekolah SMA Triwibawa Jakarta.

“..Dari guru-guru yang nota benenya mereka tidak ditugaskan untuk mengawas silang ke luar. Panitianya ada lima orang; saya, satu penanggung jawab, Wakil Kepala Sekolah, guru.”

Syafi'i juga mengatakan bahwa.

“...diadakan pelatihan di tingkat dinas pendidikan, rayon dan di sekolah”

Perdapat tersebut diperjelas oleh Syafi'i, selaku Kepala Sekolah SMA Dwi Saka Jakarta.

“..Saya punya staf 17 orang. Kita kumpulkan nama-nama. Kita bikin panitia yang tidak boleh ke mana-mana. lima orang. lima orang kita kirim, liam orang kita panitia, lima orang duduk manis di rumah karena sudah sepuh.”

2) Kewenangan

Wewenang, didefinisikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. kebijakan Ujian Nasional di sekolah memiliki struktur pelaksana bertingkat. Artinya terdapat beberapa jenjang instansi yang saling berhubungan, baik hubungan pertanggungjawaban secara vertikal maupun hubungan koordinasi secara horizontal.

Kebijakan tidak akan bisa diterapkan jika tidak disertai pendelegasian kewenangan kepada pelaksana. Setiap tahap kegiatan implementasi Ujian Nasional di sekolah yang dilakukan di wilayah adalah sebagai berikut :

- 1) Pada tahap perencanaan, kewenangan diberikan kepada pusat dalam hal ini Kemendiknas.
- 2) Pada tahap pelaksanaan terdapat beberapa pihak yang diberi kewenangan berbeda, yakni dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kab/kota dan sekolah sebagai pelaksana.

Kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Jakarta Pusat, seperti yang dikemukakan oleh salah satu staf pelaksana ujian nasional dari dinas pendidikan.

“Tergantung dari tugas pokok yang tertuang dalam petunjuk teknis pelaksanaan UN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan”

Sedangkan kewenangan yang dimiliki oleh pihak sekolah dalam hal ini SMAN 68 Jakarta, SMA Triwibawa dan SMA Dwi Saka, seperti yang dijelaskan oleh Pono Fadlullah, Kepala Sekolah SMAN 68 Jakarta.

“...Melaksanakan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) sesuai yang telah diatur dalam surat tugas itu.”

Sedangkan penjelasan yang dikemukakan oleh Abdul Haris, Kepala Sekolah SMA Triwibawa Jakarta.

“..Membantu saja. Misalnya menyiapkan ruangan ujian, ruangan pengawas, peralatan sarana-prasarana yang dibutuhkan seperti kertas, blangko, antar-jemput soal ke Rayon.”

Kemudian juga dipertegas oleh Syai'i, Kepala Sekolah SMA Dwi Saka Jakarta.

“..Kewenangannya, ikut apa yang telah ditugaskan oleh Dinas ke kami, terutama mengantarkan anak-anak supaya ujian dan bisa lulus. Misalnya Senin kita Ujian Nasional, hari Sabtu saya briefing teman-teman pengawas. Paling itu kewenangan saya; anak-anak saya bisa ujian mandiri, tidak numpang.”

Dari uraian mengenai kewenangan yang dimiliki masing-masing pembuat dan pelaksana kebijakan terlihat adanya kesesuaian antara kewenangan dengan tugas yang dibebankan kepada pihak yang terlibat. Dalam pelaksanaan sehari-hari

pendelegasian wewenang tersebut berjalan dengan lancar. Tidak ditemui keluhan dari pelaksana kebijakan mengenai kurangnya kewenangan yang diberikan.

3) Fasilitas Sarana Prasarana

Faktor sarana dan prasarana tidak dapat diabaikan dalam upaya implementasi kebijakan ujian nasional. Keberhasilan pelaksanaan ujian nasional tidak hanya ditentukan oleh waktu pelaksanaan ujian, namun dipengaruhi oleh proses yang terjadi dalam pembelajaran, proses pembelajaran akan dipengaruhi oleh keberadaan sarana yang dimiliki sekolah, sarana yang dimiliki sekolah membuat anak bisa melakukan aktivitas pembelajaran tanpa ada hambatan.

Secara teoritis sarana dan prasarana atau disebut sebagai fasilitas sekolah mencakup, gedung, lahan dan peralatan pelajaran. Aspek penting dari gedung tersebut adalah kualitas fisik dan kenyamanan ruang kelas di mana "*core bussiness*" pendidikan di sekolah diselenggarakan. Aspek lain dari gedung adalah kualitas fisik dan kenyamanan ruang manajemen ruangan yang baik, ruang kerja guru, ruang kebersamaan (*common room*), dan fasilitas gedung lainnya seperti kafeteria, toilet, dan ruang pentas. Lahan sekolah yang baik ditata sedemikian rupa sehingga menciptakan kenyamanan bagi penghuninya. Fasilitas lain seperti: buku-buku pelajaran dan sumber belajar lainnya yang relevan, alat-alat pelajaran dan peraga yang mendukung kurikulum sekolah sangat diperhatikan. Seluruh peralatan pengajaran tersebut, digunakan secara optimal sesuai dengan fungsinya masing-masing. Keberadaan fasilitas yang demikian akan mendorong anak untuk belajar lebih baik.

Menurut Mulyasa (2004) sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat dan media pengajaran. Adapun yang dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti halaman, kebun, taman sekolah, dan jalan menuju sekolah.

Untuk mendukung terlaksananya kegiatan belajar mengajar SMAN 68 Jakarta menyediakan fasilitas-fasilitas: Bangunan gedung dengan 24 ruang kelas

ber-AC dilengkapi dengan LCD, Ruang perpustakaan, Laboratorium Fisika, Kimia, Biologi, Bahasa, IPS, Ruang musik, PMR dan Kantin.

Disamping itu untuk menunjang tercapainya pelaksanaan kebijakan ujian nasional, seperti yang diungkapkan oleh Pono Fadlullah, Kepala Sekolah SMAN 68 Jakarta.

”Banyak, dari sarana prasarana, perangkat soalnya, dari pemindaianya, penilaiannya dan sistem regulasi. Kami punya juklak dan juknis Pos (Procedur Operational Standard). Harus kita patuhi.”

Gambar 7 :
Sarana Prasarana SMAN 68 Jakarta



Sumber : SMAN 68 Jakarta

Keadaan sarana prasarana SMA Triwibawa Jakarta sekolah swasta yang memiliki fasilitas yang cukup baik dibandingkan dengan SMA Dwi Saka Jakarta, antara lain, memiliki sarana proses pembelajaran yang memadai laboratorium dan sarana ekstrakurikuler yang memadai, meskipun demikian fasilitas sekolah tersebut masih ada di bawah SMA Negeri 68.

Gambar 8 :
Sarana Prasarana SMA Triwibawa Jakarta



Sumber : SMA Triwibawa Jakarta Pusat

Sedangkan SMA Dwi Saka Jakarta, sekolah swasta dengan fasilitas yang memprihatinkan, sekolah ini memiliki sarana dan prasarana yang seadanya, sekalipun demikian motivasi guru dan anak untuk belajar cukup baik, seperti yang telah dijelaskan oleh Syai'i selaku Kepala Sekolah SMA Dwi Saka Jakarta.

"...Untuk meja-kursi, 31 cukup. Ruangan saya bikin dua ruang. Ruang I 16, ruang II 15. Ruangan bisa kita pakai sesuai dengan petunjuk teknis yang diedarkan Dinas. Sarana lain, karena pengawas dari sekolah lain, sebulan sebelum ujian kita cat. Yang bolong ditambah."

Gambar 9 :
Sarana Prasarana SMA Dwi Saka Jakarta



Melihat kondisi sekolah yang penulis teliti menunjukkan bahwa kebijakan sarana dan prasarana sekolah harus menjadi perhatian sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang salah satu parameternya adalah pencapaian nilai ujian nasional.

4) Sumber Keuangan

Aspek finansial juga merupakan aspek yang sangat penting dalam menukung implementasi kebijakan ujian nasional. Kementerian Pendidikan Nasional melalui APBN telah mengalokasikan ratusan milyar untuk melaksanakan implementasi kebijakan ujian nasional. Begitu juga pemerintah daerah melalui APBD. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan narasumber dari Dinas Pendidikan Jakarta Pusat tentang pendanaan operasional untuk ujian nasional..

“...Pengandaan soal, dari APBN, Transportasi (soal) ke sekolah APBN dan APBD dan SPJ pengawasan dari dinas APBD”

Sumber dana dalam pelaksanaan implementasi pada tingkat sekolah, seperti yang telah dijelaskan oleh Pono Fadlullah.

“..tidak ada pungutan dari siswa.....Dropping dana untuk negeri dari Dinas Pendidikan Provinsi. Pusat tidak ada. Dana dari APBN , tapi sangat kecil. Kita harus nombok dari uang Komite sekolah. Karena penjaga ujian kita kasih transport, makan, kita enak-enakin.”

Sedangkan hasil wawancara peneliti dengan Abdul Haris, selaku Kepala Sekolah SMA Triwibawa.

“...Ada. dari tingkat Provinsi dan Pusat. Tahun lalu hanya sedikit. Hanya ada Rp 27 ribu per siswa dari Pusat. Dari tingkat 1 (provinsi) Rp 32.700. Sangat tidak cukup.....pengeluarannya antara lain,Persiapan saja kita harus menatar, memberikan pembinaan kepada guru-guru tentang teknik menyusun kisi-kisi. Mereka ikut bedah soal ke MGMP. Mereka harus menyusun naskah ujian. Naskah ujian kita bayar. Sekolah yang bayar, sudah ada anggarannya. Kemudian membeli kertas, mau nge-print naskah. Beli tinta. Tenaga yang nge-print. Turunnya dana setelah pelaksanaan. Kita harus nalangi dulu. Itu yang jadi kendala. Kita terpaksa minta bantuan dari Yayasan bagaimana caranya sehingga Yayasan punya inisiatif. Dipanggilah orangtua, siapa yang bisa membantu. Subsidi silang. Untuk pelaksanaan UN, ada pungutan ke siswa? Tidak ada. Cuma adanya sistem silang itu. Kita panggil orangtua yang penghasilannya di atas Rp 2 juta. Ada saja yang membantu. Tidak ditetapkan besarnya berapa.

Penjelasan tersebut dipertegas oleh Syafi'i dari Kepala Sekolah SMA Dwi Saka Jakarta.

“..Ada. Dari tingkat Provinsi dan Pusat. Tahun lalu hanya sedikit,. hanya ada Rp 27 ribu per siswa dari Pusat. Dari tingkat 1 (provinsi) Rp 32.700. Sangat tidak cukup.Pengeluarannya untuk persiapan saja kita harus

menatar, memberikan pembinaan kepada guru-guru tentang teknik menyusun kisi-kisi. Mereka ikut bedah soal ke MGMP. Mereka harus menyusun naskah ujian. Naskah ujian kita bayar. Sekolah yang bayar, sudah ada anggarannya. Kemudian membeli kertas, mau nge-print naskah. Beli tinta. Tenaga yang nge-print. Turunnya dana setelah pelaksanaan. Kita harus nalangi dulu. Itu yang jadi kendala. Kita terpaksa minta bantuan dari Yayasan bagaimana caranya sehingga Yayasan punya inisiatif. Dipanggillah orangtua, siapa yang bisa membantu. Subsidi silang.”

Beliau juga mengatakan bahwa untuk pelaksanaan Ujian Nasional tidak ada pungutan siswa.

“..Tidak ada. Cuma adanya sistem silang itu. Kita panggil orangtua yang penghasilannya di atas Rp 2 juta. Ada saja yang membantu. Tidak ditetapkan besarnya berapa.”

Sekolah seharusnya memiliki dana yang cukup untuk menyelenggarakan pendidikan. Sekolah menggunakan dana yang tersedia untuk terlaksananya proses belajar mengajar yang bermutu. Sekolah harus menyediakan dana pendidikan secara terus menerus sesuai dengan kebutuhan sekolah. Untuk itu, sekolah berkewajiban menghimpun, mengelola, dan mengalokasikan dana untuk mencapai tujuan sekolah. Dalam menghimpun dana, sekolah perlu memperhatikan semua potensi sumber dana yang ada seperti subsidi pemerintah, sumbangan masyarakat dan orang tua peserta didik, hibah, dan sumbangan lainnya. Pengelolaan dana pendidikan di sekolah harus dilakukan secara transparan, efisien, dan akuntabel sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah. Dana pendidikan di sekolah dialokasikan berdasarkan prinsip keadilan dan pemerataan yaitu tidak diskriminatif terhadap anggaran biaya yang diperlukan untuk masing-masing kegiatan sekolah.

Dalam konteks penelitian ini, sumber dana dan pembiayaan yang dimiliki oleh sekolah yang penulis teliti berbeda satu sama lainnya. Untuk SMA Negeri 68 sumber dana untuk biaya operasional pendidikan diperoleh dari negara dan orang

tua yang menyumbangkan, dari negara banyak digunakan untuk menggaji guru dan karyawan serta untuk membangun fasilitas sekolah, sementara dari orang tua adalah sebagai pelengkap kebutuhan operasional sekolah dan pembangunan ruang kelas baru. Sementara dana SMA Triwibawa Jakarta yang merupakan sekolah swasta diperoleh murni dari sumbangan orang tua untuk biaya operasional sekolah. Sementara itu untuk SMA Dwi Saka Jakarta sumber dana sangat terbatas, banyak orang tua yang tidak mampu membayar biaya pendidikan.

Misalnya untuk pendalam materi, pihak sekolah sangat kesulitan untuk mendapatkan sumber dana, hal tersebut melihat kondisi para orang tua siswa yang kondisinya tidak memungkinkan, disisi lain pihak sekolah menginginkan keberhasilan para siswanya. Seperti yang ungkapkan oleh Syafi'i Kepala Sekolah SMA Dwi Saka.

"...Sekolah sudah kayak begini. Tetap saya memungut. Saya datang dari Bekasi, pakai transport. Kalau saya pribadi lebih mengalah. Saya ngomong ke orangtua murid. Tetapi ngomong doang, murid tidak ada yang... orangtua istilahnya...sudah tinggal besok ujian kita punguti PM biayanya Rp 150 ribu sebagai ganti uang transport dan snack atau makan siang, tetap saja yang bayar 4-5 orang. Akhirnya mau-mau saja orangtua, tapi kenyataannya yang bayar 3-4 orang. Akhirnya kita dan Yayasan mencari-cari untuk nomboki guru-guru. Pada saat gajian, Yayasan mencari utangan. Guru tidak mau tahu. Pas tanggal muda, guru berani menghadap saya. Minta honor. Saya punya rezeki, saya kasih. Ini sudah enam tahun (sejak 2005) jadi Kepala Sekolah. Pemerintah tetap kita harapkan memberi bantuan."

Kondisi yang ada di SMA Dwi Saka Jakarta tidak jauh berbeda dengan yang dialami SMA Triwibawa Jakarta sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Haris, Kepala Sekolah SMA Triwibawa Jakarta.

"...Ibunya kebanyakan kuli nyuci. Paling hebat kerja di perusahaan. Warga sekitar sini. Makanya saya katakan, Kepala Sekolahnya kumis, anak-anak didiknya tinggal di daerah kumis; kumuh dan miskin."

Tinggalnya di real estate kompleks DPR, Daerah Pinggiran Rel. Kalau mau sekolah saja, mereka kita giring dulu untuk belajar. Belum pulang, mereka sudah mau pulang. Belum dioptimalkan saja kita adakan pendalaman materi, kemudian kita ikut-sertakan try out sampai dua kali, tapi grafik belajar mereka sangat minim. Sehingga kami pernah menawarkan pada mereka lewat orangtuanya, “Kalau saja putra-putri Bapak-Ibu belum mampu mengikuti ujian, silakan ditunda dulu sehingga tahun depan bisa ada peluang ikut ujian.” Mereka tetap menghendaki ikut ujian. Mereka bilang, “Kalau tidak lulus Ujian Nasional, kita ikut Paket C saja.” Akhirnya alhamdulillah Pemerintah mengadakan Ujian Ulang tempo hari. Hampir 70% mereka lulus, untuk Ujian Ulang. Itu pun kami paksakan.”

Dilihat dari kondisi yang kontras demikian, menunjukkan untuk proses pembiayaan masih ditemukan kendala terutama di SMA Dwi Saka Jakarta, kondisi demikian akan mempengaruhi kualitas pendidikan di sekolah tersebut. Sementara kebijakan untuk biaya ujian nasional pemerintah menggelontorkan dana sehingga proses pelaksanaan ujian nasional tidak terhambat, hanya masalahnya berkaitan dengan biaya operasional untuk mencapai keberhasilan proses pembelajaran.

c. Faktor Sikap/Disposisi

Variabel lain yang dipandang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan adalah sikap implementor terhadap tugas dan tanggung jawab yang diembannya, misalnya pada tataran sekolah, maupun pada tataran dinas pendidikan kabupaten/kota dan provinsi. Kecakapan saja tidak cukup, tanpa adanya kesediaan dan komitmen dari para implementor dalam menjalankan kebijakan publik. Sikap merupakan karakteristik yang dimiliki oleh para implementor, misalnya komitmen, jujur, dan demokratis.

Menurut Edward III dalam Winarno (2005:142-143) mengemukakan, kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika

para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan, maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius

Lebih jauh Edward III menyebut dua hal penting berkenaan dengan disposisi, pertama adalah sikap para staf dan yang kedua mengenai insentif bagi pelaksana kebijakan. Sikap para pelaksana merupakan hambatan serius bagi implementasi kebijakan. Jika staf yang ada tidak dapat mengimplementasikan kebijakan seperti keinginan para pembuat kebijakan, perlu diganti dengan staf yang lebih responsive terhadap pimpinan.

Berdasarkan studi dokumentasi dan wawancara mendalam, bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah dan satuan pendidikan, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional dan Dinas Pendidikan Kota Jakarta Pusat dan sekolah, memiliki sikap positif yaitu kesediaan dan komitmen terhadap penyelenggaraan ujian nasional. Salah satu bentuk komitmen untuk mensukseskan penyelenggaraan ujian nasional, dinas pendidikan memberikan bantuan operasional pendidikan, sarana prasarana, pendidikan dan pelatihan guru kepada sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.

Dalam upaya mempersiapkan ujian nasional, dinas pendidikan telah mengadakan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk mengadakan try out dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pra Ujian Nasional tahun 2010, yang diselenggarakan atas kerja sama Universitas Gunadarma dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Berdasarkan wawancara, bahwa kepala sekolah dan guru memiliki sikap positif terhadap keberadaan ujian nasional hal ini diimplementasikan dengan mengadakan bimbingan tambahan materi pelajaran, mengadakan try out serta bimbingan mental bagi para siswa dalam menghadapi ujian nasional, seperti yang dijelaskan oleh narasumber dari guru dan kepala sekolah SMAN 68 Jakarta. Pada kesempatan ini peneliti mewawancarai kepada Pono Fadlullah, selaku kepala

sekolah, beliau menjelaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan ujian nasional siap berkomitmen untuk mensukseskannya.

“ Materi kelas XII sudah diselesaikan di semester 5, semester 6 drill terus untuk TO (Try Out). TO itu dievaluasi guna diberikan analisis materi yang masih lemah untuk diulang lagi, terus TO lagi, diulang lagi, TO lagi.”....Tri out tahun lalu 6 atau 7 kali., yang mengadakan macam-macam. Ada sekolah sendiri, ada bimbingan belajar, perguruan tinggi, MKKS....kemarin ada kendala, kemarin tidak lulus 11 orang karena anak terjebak kepada bocoran soal dan tidak siap menghadapi ujian sehingga dia mengandalkan bocoran. Tidak ada kebocoran ujian nasional, justru karena dia percaya bocoran itu makanya tidak lulus.”

Selain memberikan try out, juga memberikan bimbingan mental untuk memotivasi para siswa dalam mempersiapkan ujian nasional, seperti yang jelaskan oleh Sentialam Manurung, guru mata pelajaran bahas inggris.

“..Memberikan materi yang sesuai SKL yang akan diujikan, jangan lari dari situ. ..Pelajaran tambahan tidak ada, tapi tetap kita beritahukan ke anak bahwa setiap mereka mengalami kendala, kita siap untuk melayani mereka, dengan datang ke ruang guru. Dan biasanya mereka datang. Sudah merupakan kebudayaan. Jadi mereka tidak sungkan lagi untuk datang. Di luar pun mereka boleh datang ke kita.. Tidak. Cuma menjadi satu kendala, saya, kan, mengajar Bahasa. Kita mengajarkan jenis teks ada bermacam-macam. Oke anak itu mengenal teks, Cuma tingkat kesulitan dari teks itu, kan, tidak bisa kita raba. Misalnya dia kutip teks, misalnya dari Jakarta Post, dibikin lagi teks yang dari Times. Jauh lebih sulit yang dari Times. Meskipun misalnya jenisnya...item, tapi tingkat kesulitannya, di situlah pembuat soal harus jeli. Seperti apa sih sebetulnya yang biasa untuk SMA. Kadang-kadang sepertinya dia sudah melakukan, diujikan atau misalnya diberikan satu teks yang recount. Recount itu, kan, pengalaman. Tapi pengalaman itu, diambilnya dari teks dari mana,

tingkat kesulitannya yang tidak sama. Kita juga sudah memberikan suatu strategi, apapun yang membaca sebanyak-banyaknya.”

Penjelasan oleh Endang Sri Hartini, guru mata pelajaran Ekonomi SMA Negeri 68 Jakarta.

“..Biasanya bapak-ibu guru mempersiapkan anaknya untuk melakukan review. Review materi dari kelas 1 sampai kelas 3. Kemudian melakukan try out. Ketiga, bintal (Pembinaan Mental)-nya diperbaiki atau disiapkan untuk menghadapi Ujian Nasional..... Untuk bimbingan mental... Macam-macam. Minimal dari mulai mengalihkan suasana dari rutinitas ke sesuatu yang baru sehingga dia punya motivasi yang baru lagi untuk melakukan yang lebih baik, itu bisa beraneka. Tiap tahun mungkin bisa tidak sama, bukan hanya sekedar misalnya bintal Rohisnya dalam bentuk tausiyah-tausiyah keagamaan, tetapi bisa juga dengan pendekatan psikologis

Penjelasan oleh Happy Grace Pardede, guru mata pelajaran Ekonomi SMA Negeri 68 Jakarta.

“..Kita membuat latihan-latihan soal. Try Out-nya, kan, banyak. Try Out dibahas. Ada pendalaman materi, selain ada tambahan jam, hari Sabtu. Latihan soal-soal dari kelas 1 sampai kelas 3.”

Sedangkan untuk memotivasi para siswa beliau menjelaskan.

“..Tanpa kita motivasi mereka, dengan kita semangat mengajar, mereka termotivasi sendiri. Tidak terlalu berat memotivasi mereka. Kalau kelas 3 ya, mereka dengan sendirinya sudah giat. Karena anak-anak SMA 68 beda ya lingkungannya. Mereka sebenarnya sudah semangat tanpa kita terlalu menyemangati. Kita lihat, misalnya, kita masuk ke kelas, mereka sudah sedang melakukan latihan soal-soal. Tanpa kita gerakkan mereka sudah latihan soal-soal. Memang kelas 3 semangat sekali.”

Sedangkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah dan guru SMA Triwibawa Jakarta, antara lain, sebagaimana yang diungkapkan oleh Abdull Haris, selaku kepala sekolah sebagai berikut:

“...Pesiapannya kurang maksimal. Latar belakangnya soal input. Inputnya siswa kita ini adalah sisa daripada sisa. Artinya dia sudah daftar di sekolah yang dianggap favorit tidak lolos, turun lagi tidak lolos juga, paling terakhir kita. Dasar inputnya tidak memadai. Motivasi belajar mereka juga kurang. Ketiga, kenapa hal demikian bisa terjadi, faktor pendorong penyemangat mereka karena latar belakang pendidikan orangtua mereka minim..... Ibunya kebanyakan kuli nyuci. Paling hebat kerja di perusahaan. Selain try out dan pendalaman materi kita senantiasa beri motivasi. Pokoknya tiada hari tanpa mengingatkan anak-anak bahwasanya ujian akhir di depan mata. “Tiada hari tanpa belajar. Tiap hari kalian masuk walaupun belum ujian, itu ujian. Anggap saja gurumu itu adalah pengawas.” Tetap kita berikan semangat, sehingga ketika tidak lulus di ujian pertama, karena semangat, akhirnya mereka punya motivasi untuk ikut ujian lagi. Akhirnya 70% mereka lulus. Kemudian dilanjutkan sisanya kami paksakan, kami daftarkan untuk ikut Paket C. Begitu pelaksanaan ujian Paket C, kami hubungi. Kaget juga orangtuanya, kok masih ada perhatian sekolah. Tanpa dipungut biaya, silakan berangkat.”

Penjelasan oleh Bambang Setiabudi, guru mata pelajaran Geografi SMA Triwibawa Jakarta.

“...Dari semester awal dengan latihan-latihan soal, pengemblengan latihan soal UN, pendalaman materi sampai menjelang UN. Jadi tidak kurang dari sekolah, sudah maksimal, bagaimana supaya anak bisa lulus, Diajarkan cara-caranya. Menelaah soal misalnya dari bentuk soal seperti ini bagaimana mengerjakannya. Guru telah memberi sosialisasi dengan baik. Tidak ada istilah belum ada sosialisasi atau program belajar. Di sini

sekuat tenaga. Pendalaman materi setiap hari. Dari masuk sekolah jam 7 dan pulang 12.30. Jam 14 siswa masuk kembali sampai jam 16. Itu berlangsung sampai Ujian Nasional. Kalau saya perhatikan, soal ujian nasional dari nomor 1 sampai 20 diambil dari kelas X. Kemudian 20-30 kelas XI. 30-40 soal kelas XII. Ujian Nasional soal yang paling banyak keluar kelas X.”

Penjelasan oleh Lia Masruroh, guru mata pelajaran Bahasa Inggris SMA Triwibawa Jakarta.

“..Selama ini, sejak awal mereka kelas 3, saya sudah coba mulai cari latihan UN, fotokopi soal, bahas soal-soal. Bahasa Inggris itu ada dua poin dari UN; listening dan reading. Jadi membiasakan mereka mengerjakan soal listening-nya, pakai soal-soal tahun lalu. Kalau reading-ya fokus ke jenis-jenis reading.

Sementara itu peneliti juga telah berhasil mewawancarai kepala sekolah dan guru SMA Dwi Saka untuk menggali komitmen pihak sekolah dalam penyelenggaraan kebijakan ujian nasional, dimana kondisi sarana prasarannya begitu mengkhawatirkan. Berikut hasil wawancara peneliti dengan kepala sekolah bapak Syafi'i.

“..Dari tahun ke tahun kita selalu mengadakan pendalaman materi (PM). Kita kasih waktu empat bulan. Bulan April ujian, awal Desember sampai Maret selalu PM. Kedua, kita selalu menekankan ke guru-guru enam bidang studi UN, terus dan terus kita kasih materi ujian. Ketiga, guru-guru yang Ujian Sekolah seperti PPKN, komputer, agama, seni budaya, mohon mengalah. Tapi semua Allah yang atur. Kan kemarin 0% lulus. Untung Pemerintah menyelenggarakan UN Ulang, hasilnya lumayan separuh tertolong. Selain yang lulus ujian ulang ikut Paket. Masih ada dua orang yang tidak lulus. Untuk tahun 2010/2011 juga sama, meningkatkan PM. Saya juga selalu tekankan ke siswa untuk mengontak

Allah, nomornya 44342. Shalat.....Kamis besok saat try out terakhir, kita adakan doa bersama dan maulid. Selain PM, anak-anak kita motivasi untuk beli buku Panduan Ujian Nasional. Paling cuma separuh yang mau. Doa bersama ada..”

Penjelasan oleh Loesye E.N. Papilaya, guru mata pelajaran Guru Bahasa Indonesia SMA Dwi Saka Jakarta.

“...Kita tahu bahwa sekolah ini sekolah sederhana. Keterbatasan banyak hal. Pertama, buku pegangan anak. Kedua, fasilitas, seperti di sekeolah lain punya kamus dan buku-buku sastra. Kalau yang lainnya tidak masalah...Ada, itu bimbel. Maret ujian, bimbel dimulai bulan November. Materi yang diberikan berdasarkan SKL. Biasanya SKL alat untuk memberitahu apa yang diujikan, diadakan Seminggu sekali. Di sini bimbel pagi, kalau sore belajar.”

Sedangkan untuk memberikan motivasi kepada para siswa beliau menjelaskan sebagai berikut:

“...Kita kalau mau berhasil, kan, harus usaha. Saya bilang ke anak-anak, kalau mau berhasil, usaha. Kalau usaha ada pengorbanan. Pengorbanannya banyak. Seperti biaya. Kedua, keinginan kamu sendiri. Kamu mau-tidak belajar dan berhasil. Kita perlu memotivasi mereka dengan mendorong mereka melihat sisi positif. Memang perlu memberi motivasi. Waktu bimbel pertama, kan, pagi, yang datang paling berapa orang. Dari sekian anak yang datang sekian. Begitu kita memberikan motivasi-motivasi yang sifatnya membangun, mereka dari teman ke teman cerita, lumayanlah yang datang.”

Penjelasan oleh Faridawati, guru mata pelajaran Guru Sosiologi SMA Dwi Saka Jakarta.

“..Kita, kan, pendalaman materi. Materi kelas 1 dan 2. Kita memberikan batasan-batasan kepada siswa, yang mau keluar itu apa, Seminggu satu

kali. Kalau saya kebetulan dapat jadwalnya hari Kamis.” Sedangkan untuk memotivasi siswa, saya katakan kepada para siswa, Satu, harus siap. Paling tidak apa yang sudah diberikan dipelajari. Kemudian, tidak usah takut, hadapi saja, yang penting kita usaha. Terus banyak beribadah. Puasa, kalau bisa, pada saat menghadapi ujian. Itu pesan saya ke anak.”

Penyelenggaraan dan pelaksanaan ujian nasional memerlukan kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Dari tiga sekolah yang diteliti, berkaitan dengan pandangan dan sikap aktor/stakeholders terhadap implementasi kebijakan, terutama menyangkut proses implementasi kebijakan ujian nasional di sekolah, maka temuan hasil studi dokumentasi dan wawancara secara mendalam menunjukkan implementasi kebijakan ujian nasional bahwa aspek disposisi telah dilaksanakan dengan optimal, baik dilihat dari sisi dukungan, pemahaman, komitmen dan transparansi secara umum menunjukkan kondisi yang cukup baik.

d. Faktor Struktur Birokrasi

Menurut Edwards III dalam Winarno (2005:150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni *Standard Operational Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Berdasarkan hasil penelitian Edward III yang dirangkum oleh Winarno (2005:152) menjelaskan bahwa SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi.

Namun demikian, disamping menghambat implementasi kebijakan, SOP juga mempunyai manfaat. Organisasi-organisasi dengan prosedur-prosedur perencanaan yang luwes dan kontrol yang besar atas program yang bersifat fleksibel mungkin lebih dapat menyesuaikan tanggung jawab yang baru daripada birokrasi-birokrasi tanpa mempunyai ciri-ciri seperti ini.

Sifat kedua dari struktur birokrasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan adalah fragmentasi. Edward III dalam Winarno (2005:155) menjelaskan bahwa fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda, sehingga memerlukan koordinasi. Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan.

Fragmentasi mengakibatkan pandangan-pandangan yang sempit dari banyak lembaga birokrasi. Hal ini akan menimbulkan konsekuensi pokok yang merugikan bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Berikut hambatan-hambatan yang terjadi dalam fragmentasi birokrasi berhubungan dengan implementasi kebijakan publik (Budi Winarno, 2005:153-154): *Pertama*, tidak ada otoritas yang kuat dalam implementasi kebijakan karena terpecahnya fungsi-fungsi tertentu ke dalam lembaga atau badan yang berbeda-beda. Disamping itu, masing-masing badan mempunyai yurisdiksi yang terbatas atas suatu bidang, maka tugas-tugas yang penting mungkin akan terlantarkan dalam berbagai agenda birokrasi yang menumpuk. *Kedua*, pandangan yang sempit dari badan yang mungkin juga akan menghambat perubahan. Jika suatu badan mempunyai fleksibilitas yang rendah dalam misi-misinya, maka badan itu akan berusaha mempertahankan esensinya dan besar kemungkinan akan menentang kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan perubahan.

Dari hasil studi dokumentasi dan wawancara, bahwa sekolah dalam implementasi kebijakan ujian nasional berdasarkan Prosedur Operasional Standar (POS) yang telah ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan Nasional maupun Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, seperti yang telah disampaikan oleh Dinas Pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa guru dan kepala sekolah, bahwa pembagian tugas dan kewenangan (fragmentasi) menunjukkan banyak pihak yang terlibat dalam implementasi tersebut, namun puncak koordinasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tetap berada ditangan dinas pendidikan provinsi dan suku dinas pendidikan kota. Pihak-pihak selain dinas pendidikan provinsi dan sub dinas pendidikan kota, yang terlibat dalam implementasi kebijakan bertindak

hanya atas tugas dinas. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Pono Fadlullah, Kepala Sekolah SMAN 68 Jakarta.

“..Rekrutmennya guru-guru yang sesuai bidangnya dan sudah pernah jadi panitia. Kita tunjuk untuk kita SK-kan sehingga bisa melakukan tugas dengan sangat bertanggung jawab.”.....Perosilnya Minimal tujuh. Kewenangannya melaksanakan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) sesuai yang telah diatur dalam surat tugas itu.

Penjelasan tersebut juga dipertegas oleh Abdul Haris, Kepala Sekolah SMA Triwibawa Jakarta.

“Dari guru-guru yang nota benenya mereka tidak ditugaskan untuk mengawas silang ke luar. Panitianya ada lima orang; saya, satu penanggung jawab, Wakil Kepala Sekolah, guru.” Kewenangan dan pelaporannya Membantu saja. Misalnya menyiapkan ruangan ujian, ruangan pengawas, peralatan sarana-prasarana yang dibutuhkan seperti kertas, blangko, antar-jemput soal ke Rayon.

Sedangkan penjelasan kewenangan implementasi ujian nasional juga telah dikemukakan oleh Syaii'i, Kepala Sekolah SMA Dwi Saka.

“..Saya punya staf 17 orang. Kita kumpulkan nama-nama. Kita bikin panitia yang tidak boleh ke mana-mana. Lima orang. Lima orang kita kirim, liam orang kita panitia, lima orang duduk manis di rumah karena sudah sepuh.....untuk kewenangannya panitianya, Kewenangannya, ikut apa yang telah ditugaskan oleh Dinas ke kami, terutama mengantarkan anak-anak supaya ujian dan bisa lulus.Misalnya Senin kita Ujian Nasional, hari Sabtunya saya briefing teman-teman pengawas. Paling itu kewenangan saya; anak-anak saya bisa ujian mandiri, tidak numpang. Pelaporannya, tiap hari hasil dari ujian kita lihat lalu kita kirim ke Rayon. Yang jadi kendala, ambil soal dan kirim soal pakai roda empat. Jadi menyewa taksi.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, struktur birokrasi pada instansi pemerintah tidak mengalami hambatan. Kemudian untuk struktur birokrasi dari ketiga sekolah baik secara umum tidak mengalami hambatan, dalam pelaksanaan ujian nasional di tingkat sekolah selalu mengikutsertakan seluruh elemen sekolah, sehingga dapat disimpulkan pelaksanaan ujian nasional dari segi struktur birokrasi berjalan efektif.

Tabel 19 : Ringkasan

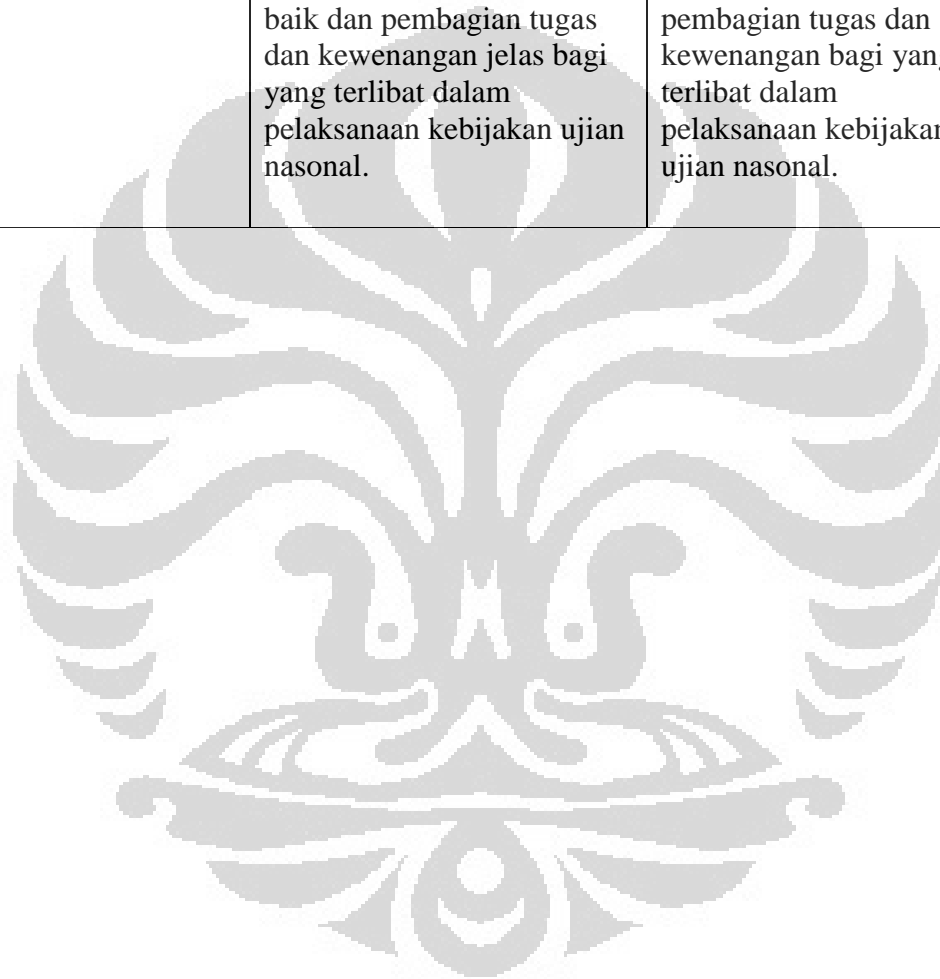
Faktor	Uraian	Sumber Data
1. Komunikasi	Faktor komunikasi di SMAN 68 Jakarta sudah berjalan dengan baik. Sedangkan untuk SMA Triwibawa Jakarta dan SMA Dwi Saka Jakarta, belum terjalin dengan optimal, hal ini ditunjukkan dengan masih minimnya sarana prasana yang kurang memadai serta masih kurang kesadarannya para siswa dan orangtua siswa yang seringkali tidak menghadiri saat sosialisasi kebijakan ujian nasional, hal ini berkaitan dengan latar belakang para siswa dan kondisi sosial ekonomi orang tua siswa.	Wawancara Dokumentasi
2. Sumber Daya	Dukungan sumber daya (tenaga pendidik, tenaga kependidikan, sarana prasarana, dan sumber keuangan) di SMAN 68 Jakarta sudah memadai. Sedangkan di SMA Triwibawa Jakarta dan SMA Dwi Saka Jakarta sangat bertolak belakang, hal ini ditunjukkan dengan adanya kondisi sumber daya masih sangat terbatas.	Wawancara Dokumentasi
3. Sikap/Disposisi	Pada ketiga sekolah telah menunjukkan sikap yang baik terhadap kebijakan ujian nasional, hal ini ditunjukkan sikap kesediaan dan berkomitmen sekolah dalam mensukseskan kebijakan ujian nasional. Pihak sekolah telah mengadakan pendalaman materi, (try out), memberikan motivasi dan bimbingan mental kepada para siswanya dalam mempersiapkan menghadapi ujian nasional.	Wawancara Dokumentasi
4. Struktur Organisasi	Struktur birokrasi baik di dinas pendidikan maupun sekolah sudah berjalan dengan baik, hal ini ditunjukkan adanya pembagian tugas dan kewenangan dengan melibatkan berbagai pihak dalam implementasi kebijakan.	Wawancara Dokumentasi

Tabel 20 :
Perbandingan Hasil Analisis Kebijakan Ujian Nasional Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA)
Yang Menjadi Obyek Penelitian

Variabel	Faktor	SMAN 68 Jakarta	SMA Triwibawa Jakarta	SMA Dwi Saka Jakarta
Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Ujian Nasional Pada Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Jakarta Pusat	Komunikasi	Komunikasi sudah berjalan efektif. Hal ini oleh pesan yang disampaikan jelas, tepat dan konsisten, diantaranya komunikasi disampaikan melalui sosialisasi, surat edaran, juknis, media massa.	Komunikasi tidak berjalan efektif. Hal ini ditunjukkan adanya surat edaran dari dinas pendidikan yang datang terlambat, dan masih minimnya sarana prasana pendukung komunikasi	Komunikasi tidak berjalan efektif. Hal ini ditunjukkan adanya surat edaran dari dinas pendidikan yang datang terlambat, dan masih minimnya sarana prasana pendukung komunikasi
	Sumber Daya	Sumber daya yang dimiliki sekolah sudah memadai yaitu: pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pembiayaan, dan siswa	Sumber daya yang dimiliki belum memadai yaitu pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pembiayaan yang masih minim.	Sumber daya yang dimiliki belum memadai yaitu pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pembiayaan yang masih minim.

	Sikap/Disposisi	<p>Dari segi sikap tidak mengalami hambatan, hal ini dibuktikan dengan sikap pemerintah daerah memberikan dana pendamping dalam pelaksanaan ujian nasional melalui dana biaya operasional pendidikan. Sikap sekolah ditunjukkan dengan mempersiapkan siswanya melalui pendalaman materi, (try out), memberikan motivasi dan bimbingan mental untuk menghadapi ujian nasional.</p>	<p>Dari segi sikap tidak mengalami hambatan, hal ini dibuktikan dengan sikap pemerintah daerah memberikan dana pendamping dalam pelaksanaan ujian nasional melalui dana biaya operasional pendidikan. Sikap sekolah ditunjukkan dengan mempersiapkan siswanya melalui pendalaman materi, (try out), memberikan motivasi dan bimbingan mental untuk menghadapi ujian nasional.</p>	<p>Dari segi sikap tidak mengalami hambatan, hal ini dibuktikan dengan sikap pemerintah daerah memberikan dana pendamping dalam pelaksanaan ujian nasional melalui dana biaya operasional pendidikan. Sikap sekolah ditunjukkan dengan mempersiapkan siswanya melalui pendalaman materi, (try out), memberikan motivasi dan bimbingan mental untuk menghadapi ujian nasional.</p>
	Struktur Organisasi	<p>Struktur birokrasi baik di dinas pendidikan maupun sekolah sudah berjalan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan adanya Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Nasional (UN) Sekolah Menengah Atas sehingga koordinasi berjalan</p>	<p>Struktur birokrasi baik di dinas pendidikan maupun sekolah sudah berjalan dengan baik, hal ini ditunjukkan adanya Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Nasional (UN) Sekolah Menengah Atas sehingga jelas</p>	<p>Struktur birokrasi baik di dinas pendidikan maupun sekolah sudah berjalan dengan baik, hal ini ditunjukkan adanya Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Nasional (UN) Sekolah Menengah Atas sehingga jelas</p>

		baik dan pembagian tugas dan kewenangan jelas bagi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan ujian nasional.	pembagian tugas dan kewenangan bagi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan ujian nasional.	pembagian tugas dan kewenangan bagi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan ujian nasional.
--	--	--	---	---



BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai dua hal yang menjadi inti dari permasalahan yang penulis bahas pada bab-bab sebelumnya, yaitu kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan Ujian Nasional pada Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di Jakarta Pusat secara umum masih terdapat kendala pada faktor sumber daya. Namun demikian bukan berarti implementasi kebijakan ujian nasional tidak mencapai tujuan yang diharapkan.
2. Faktor-faktor yang dipertimbangkan yang mempengaruhi implementasi adalah faktor komunikasi, faktor sumberdaya, faktor disposisi dan faktor struktur birokrasi. Dari hasil analisis diketahui bahwa hambatan yang ada dalam faktor komunikasi, sehingga membatasi informasi tentang rancangan kebijakan yang diterima personel pelaksana di tingkat sekolah, merupakan penyebab utama adanya kendala dalam implementasi, keterbatasan informasi berdampak pada sejauh mana pemahaman, persepsi, kompetensi dan komitmen kepala sekolah, guru dan pihak sekolah lainnya yang terlibat dalam implementasi kebijakan ujian nasional pada masing-masing sekolah, sehingga secara keseluruhan implementasi tidak memenuhi kesesuaian dengan rancangan yang telah ditetapkan.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka peneliti menyarankan beberapa saran berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan ujian nasional tersebut, yaitu:

1. Perlu adanya forum komunikasi antar dinas pendidikan dan sekolah untuk memperlancar arus komunikasi, sehingga implementasi kebijakan ujian nasional dapat berjalan sesuai dengan tujuan,
2. Kelengkapan sarana prasarana merupakan unsur sangat menentukan keberhasilan sekolah, untuk itu baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus memberi dukungan pendanaan,.
3. Perlu ditingkatkannya pendidikan dan pelatihan bagi para guru dan perbaikan sarana prasarana dan dukungan pendanaan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sehingga sekolah dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan baik untuk mencapai peningkatan mutu pendidikan.



DAFTAR REFERENSI

Buku

- Anderson, James E. (2000). *Public Policy Making*, Baston:Houghton Mifflin
- Anderson, Prue dan Morgan, George. (2009). *Developing Tests and Questionnaires for a National Assessment of Educational Achievement*. Washington, DC: The World Bank.
- Arikunto, Suharsimi. (2009). *Dasar- Dasar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta, Bumi Aksara, Edisi Revisi, Cet. 10.
- Arifin, Zaenal. (2009). *Evaluasi Pembelajaran*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Balitbang Diknas. (2007). *Panduan Kebijakan Pemanfaatan Hasil UN Untuk Perbaikan Mutu Pendidikan*, Jakarta, Depdiknas Jakarta.
- Daryanto. (2008). *Evaluasi Pendidikan*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*,. Edisi Kedua. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Dunn, W.N. (2001). *Public Policy Analysis: an Intruduction*. Terjemahan Muhajir Darwin : Yogyakarta : Hanindia Graha Widya.
- Dye, Thomas R. (1995). *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice Hall.
- Easton, David. (1965). *A Framework for Political Analysis*, John Wiley and Sons Inc, New York.
- Edwards III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington D.C. Congressional Quarterly Inc.
- Eko, dkk. (2005). *UAN: Mengapa Perlu ?* Bekasi, Al-Kautsar Prima Indocamp.
- Greany, Vincent dan Kellaghan, Thomas. (2008). *Assessing National Achievement Levels in Education*. Washington, DC: The World Bank.
- Grindle, Merilee S. (ed) (1980), *Politics and Policy Implementation in the Third World*, Princeton University Press, New Jersey.
- Gronlund dan Linn. (1990). *Measurement and Evaluasi In Teaching*, Sixth Edition, New York: Macmillan Publishing Company.
- Hayat, Bahrul dan Yusuf, Suhendra. (2010). *Benchmark Internasional Mutu Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Hill, Peter. (2010). *Examination Systems: Asia-Pacific Secondary Education System Review, Series No. 1*. Bangkok: UNESCO.
- Howlett, Michael, dan M. Ramesh. (1995). *Studying Public Policy, Policy Cycles and Policy Subsystem*, Oxford, Oxford University Press.
- Hughes, Owen E. (1994). *Public Administration and Management: An Introduction*. London: The Macmillan Press.
- Irawan, Prasetya. (2006). *Penelitian Kualitatif & Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: DIA FISIP UI.
- Islamy, Irfan M, (2001). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Kellaghan, Thomas, Vincent Greaney dan T. Schott Murray. (2009). *Using the Result of a National Assessment of Educational Achievement*. Washington, DC: The World Bank.
- Laswell, Harold, dan Abraham Kaplan. (1970). *Power And Society*, New Heaven, Yale University Press.
- Lester, James P., dan Joseph Steward Jr. (2000). *Public Policy. An Evolutionary Approach*, Belmont, Wadsworth.
- Mazmanian, Daniel H dan Paul A. Sabatier.(1983). *Implementation an Public Policy*. New York: Herper Collins.
- Nakamura, Robert. T, dan F. Smallwood. (1980). *The Politics of Policy Implementation*, New York, St. Martin Press.
- Nasution, S. (1988). *Metode Penelitian Naturalistik–Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Neuman, W. Lawrence. (2006). *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches*, 6th ed. USA:Allyn and Bacon.
- Peters, B. Guy. (1993). *American Public Policy*, 3rd Ed., New Jersey, Chatam House.
- Peterson, Steven A. (2003). *Public Policy*, dalam Jack Rabin, 2003, *Encyclopedia of Public Administration and Public Policy*, New York & Basel, Marcel Dekker.
- Pressman J., and Aaron Wildavsky.(1973), *Implementation*, Berkely University of California Press.
- Purwanto. (2009). *Evaluasi Hasil Belajar*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

- Riant Nugroho D. (2009). *Public Policy*, Edisi Revisi, Jakarta, Elex Media Komputindo.
- Riant Nugroho, H.A.R. Tilaar. (2009). *Kebijakan Pendidikan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cet.II
- Santoso, Amir. (1988), "Analisis Kebijakan Publik: Suatu Pengantar", *Jurnal Ilmu Politik*, No. 3, Jakarta.
- Subarsono, AG. (2005). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cetakan Ke-3.
- Surapranata, Sumarna dan Muhammad Hatta. 2004. *Penilaian Portofolio Implementasi Kurikulum 2004*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya:
- Syafaruddin. (2008). *Efektivitas Kebijakan Pendidikan*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pikiran George Edwards*. Yogyakarta, YPAPI
- Wahab, Solichin Abdul. (1997). *Analisis Kebijaksanaan Negara dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara
- Wahab, Solichin Abdul. (2001). *Analisis Kebijaksanaan Negara dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara
- Wibawa, Samodra. (1994). *Kebijakan Publik : Proses dan Analisis*, Intermedia, Jakarta.
- Winarno, Budi. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Media Pressindo.
- Winarno, S. (1980). *Pengantar Interaksi Mengajar-Belajar: Dasar Teknik dan Metodologi Pengajaran*, Bandung, Tarsito.
- Van Meter, Donald S and Van Horn, Carl E, (1975). *The Policy Implementation Process, A Conceptual Frame Work*, Sage Publication Inc.

Jurnal

- Maman. (2009). *Revitalisasi Sistem Ujian Nasional*, *Jurnal Ilmiah* Vol. VI No. 1 Januari 2009, (<http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/6109101116.pdf>)
- Siskandar (2008). *Studi Evaluasi Penyelenggaraan Ujian Nasional*, <http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/9208146159.pdf>
- Tanya Jawab Seputar UN 2010, http://bsnp-indonesia.org/id/?page_id=32.

Tim Ujian Nasional Universitas Negeri Malang.(2010). *Kajian Literatur (Konseptual) Ujian Nasional*, <http://lp3um.net/berita/25-kajian-literatur-konseptual-ujian-nasional.html>.

Dokumen Pemerintah

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Permendiknas Nomor 75 Tahun 2009 tentang UN SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, dan SMK Tahun Pelajaran 2009/2010.

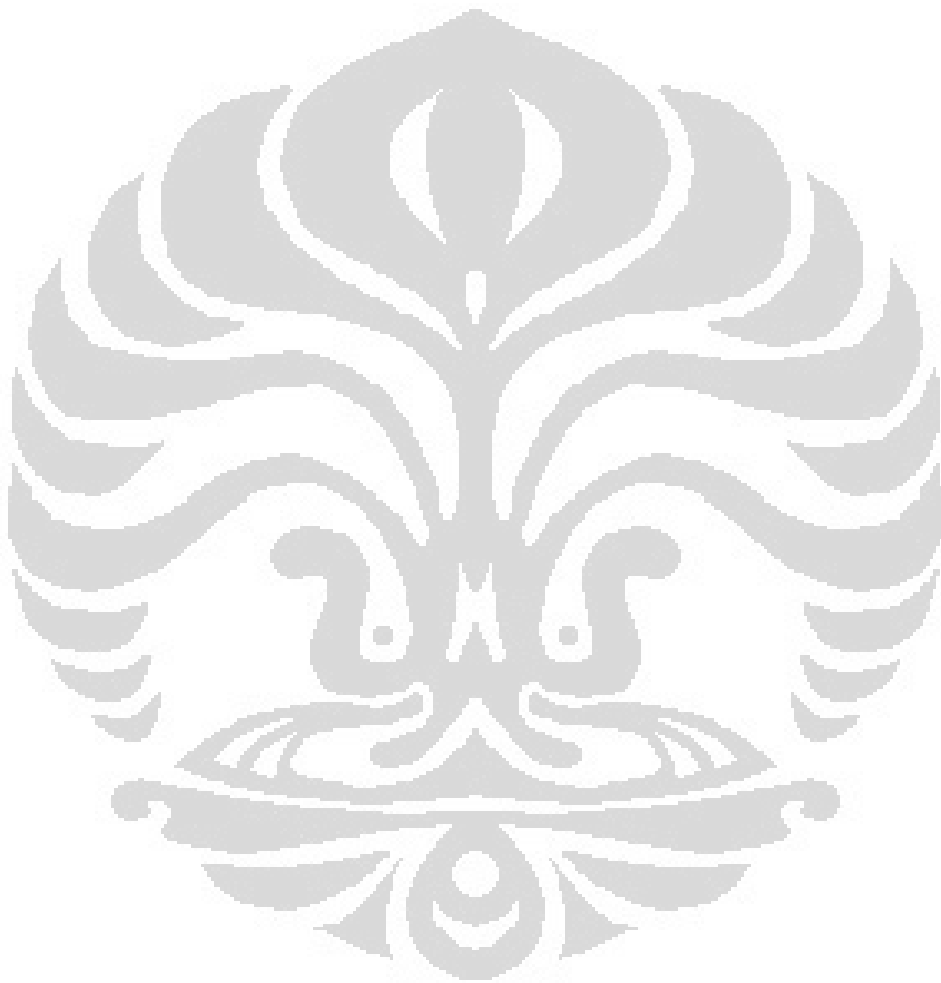
Permendiknas Nomor 3 Tahun 2010 tentang perubahan atas Permendiknas Nomor 84 Tahun 2009 tentang UN SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, dan SMK Tahun Pelajaran 2009/2010.

Keputusan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0023/SK-POS/BSNP/XII/2009 Tentang Prosedur Operasi Standar (Pos) Ujian Nasional Sekolah Menengah Atas Madrasah Aliyah (SMA/MA) Tahun Pelajaran 2009/2010.

Peraturan Bersama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 01 Tahun 2010 Nomor KW.09.04/HK.00.7/86/2010 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional, Ujian Nasional dan Ujian Sekolah/Madrasah Tahun Pelajaran 2009/2010.

Putusan MA tentang penyelenggaraan ujian nasional (UN) yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 377/PDT/2007/PT.DKI, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 228/Pdt.G/2006/PN. JKT.PST.

LAMPIRAN



PEDOMAN WAWANCARA

A. Kepala Dinas Pendidikan Kota Jakarta Pusat

1. Bagaimana cara kebijakan UN disosialisasikan oleh dinas pendidikan?
2. Siapa yang memegang kebijakan/ditugaskan dalam melaksanakan kebijakan berkaitan dengan ujian nasional?
3. Media apa yang digunakan untuk sosialisasi sosialisasi?
4. Berapa lama kegiatan sosialisasi ujian nasional dilaksanakan ?
5. Apa yang bapak ketahui tentang kebijakan ujian nasional?
6. Bagaimanan rekrutmen petugas pelaksanaan kegiatan ujian nasional?
7. Sejauh mana kewenangan yang dimiliki oleh petugas ?
8. Berapa banyak petugas yang terlibat langsung dalam kegiatan ujian nasional?
9. Jelaskan sarana dan prasarana yang menunjang kelancaran pelaksanaan ujian nasional ?
10. Bagaimana mekanisme pendistribusian berkas?
11. Siapa yang terlibat dalam pendistribusian berkas?
12. Apakah masih kebocoran ujian nasional?
13. Jika ada bagaimana solusinya?
14. Bagaimana mekanisme pendistribusian berkas?
15. Siapa yang terlibat dalam pendistribusian berkas?
16. Bagaimana mekanisme pelaporan pelaksanaan ujian nasional?
17. Dari mana sumber dana pelaksanaan untuk:
 - Penggandaan soal, jika ada
 - Transportasi (soal) ke sekolah
 - SPJ pengawasan dari dinas

PEDOMAN WAWANCARA

B. Kepala Sekolah

1. Apakah bapak/ibu memahami hal-hal yang berkaitan dengan persiapan, dan pelaksanaan ujian nasional di sekolah?
2. Apakah bapak/ibu mengetahui sosialisasi ujian nasional jika ada perubahan ?
3. Melalui media apa ibu/bapak memperoleh informasi tentang ujian nasional?
4. Apakah selama ini bapak/ibu menemukan permasalahan/kesulitan dalam melaksanakan kegiatan ujian nasional di Sekolah
5. Bagaimana rekrutmen panitia kegiatan ujian nasional?
6. Berapa banyak personil yang dilibatkan dalam kepanitiaan dan petugas pengawas ujian nasional?
7. Sejauh mana kewenangan yang dimiliki sebagai pelaksana kegiatan ujian nasional di sekolah?
8. Bagaimana sarana prasarana apa yang menjadi penunjang pelaksanaan ujian nasional?
9. Apakah masih kebocoran ujian nasional?
10. Jika ya bagaimana solusinya?
11. Bagaimana mekanisme pelaporan pelaksanaan ujian nasional?
12. Bagaimana proses pendanaan ujian nasional?
13. Apakah ada pungutan ke siswa? Jika ada berapa besarnya dan apa rinciannya?
14. Apakah ada sumber dana dari pusat/daerah?
15. Apakah untuk persiapan ujian nasional diadakan pemantapan/pengayaan/Tri Out?
16. Jika diadakan, dari mana sumber dana tersebut? dan berapa besarnya untuk masing-masing siswa?

PEDOMAN WAWANCARA

C. Guru

1. Persiapan apa yang telah Anda lakukan agar siswa maksimal dalam menghadapi UN tahun lalu
2. Apa ada pelajaran tambahan yang diberikan?
3. Saat pelajaran tambahan, materi apa saja yang diberikan selain soal-soal kelas 1 sampai kelas 3?
4. Apakah siswa diajarkan cara taktis mengerjakan soal, misalnya mengerjakan soal yang lebih gampang dulu?
5. Ada kendala yang dihadapi saat mempersiapkan siswa dan bagaimana cara mengatasinya?
6. Menghadapi UN, anak-anak ada perasaan cemas dan gelisah. Bagaimana cara Anda memotivasi anak-anak?
7. Apa ada hal lain selain itu?
8. Apa harapan terhadap pelaksanaan ujian nasional?

TRANSKIP WAWANCARA

Informan : Dinas Pendidikan Jakarta Pusat

Bagaimana Anda memandang secara umum pelaksanaan ujian nasional tahun 2010?

UN secara umum berjalan dengan lancar dan sukses, terbukti dengan tingkat kelulusan yang sangat tinggi (untuk tingkat menengah mencapai 98%)

Bagaimana cara kebijakan ujian nasional disosialisasikan oleh dinas pendidikan?

Ada 2 jalan yang ditempuh:

Secara langsung : Dinas Pendidikan mensosialisasikan kepada kepala Sekolah guru dan Siswa pada event tertentu yang dikemas dalam bentuk kegiatan yaitu; Pengendalian dan Koordinasi Pelaksanaan UN”

Secara tidak Langsung: yaitu melalui media cetak dan elektronik termasuk internet dan televisi.

Siapa yang memegang kebijakan/ditugaskan dalam melaksanakan kebijakan berkaitan dengan ujian nasional?

Yang melaksanakan sosialisasi adalah stakeholder pendidikan di Provinsi DKI Jakarta

Media apa yang digunakan untuk sosialisasi sosialisasi?

Cetak dan elektronik

Apa yang bapak ketahui tentang kebijakan ujian nasional?

UN merupakan kebijakan pemerintah, salah satunya sebagai alat pemetaan pendidikan,

Berapa lama kegiatan sosialisasi UN dilaksanakan ?

Kurang lebih 4 (empat) bulan sebelum pelaksanaan UN

Apa yang bapak ketahui tentang kebijakan ujian nasional

Kebijakan ujian nasional merupakan, salah satu alat untuk pemetaan pendidikan.

Bagaimanan rekrutmen petugas pelaksanaan kegiatan ujian nasional

Petugas terdiri dari: Petugas Prpvinsi: direkrut dari bagian bidang yang langsung menangani UN (SMA/SMK/SD,SMP), Petugas kotamadya: seluruh kepala seksi, kasubag dan Pejabat fungsiona Umum Senior, Pos Rayon: Petugas dari sekretariat rayon sekolah, Sekolah: Guru dan Karyawan Sekolah

Berapa jumlah personel

Sesuai dengan kebutuhan

Sejauh mana kewenangan yang dimiliki oleh petugas ?

Mengaju pada juklak/juknis

Jelaskan sarana dan prasarana yang menunjang kelancaran pelaksanaan ujian nasional ?

Komputer, Scanner, dll

Tergantung daritugas pokok yang tertuang dalam petunjuk teknis pelaksanaan UN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan

Bagaimana mekanisme pendistribusian berkas?

Berkas dikirim dari percetakan langsung ke Pos Rayon, kemudian sekolah mengambil berkas langsung ke Pos Rayon

Siapa yang terlibat dalam pendistribusian berkas?

Seluruh petugas ditambah polisi, keamanan dan pemantau independen

Apakah masih kebocoran ujian nasional;?

Tidak

Bagaimana mekanisme pelaporan pelaksanaan ujian nasional

Pelaporan dilakukan oleh sekolah, dikirim ke rayon, kemudian rayon merekap dan dikirimkan ke Dinas Pendidikan tembusan ke Suku Dinas Pendidikan Kota

Apakah Dinas Pendidikan memberikan dana operasional pelaksanaan ujian nasional ke sekolah?

Ya

Dari mana sumber dana pelaksanaan untuk:

- a. *Penggandaan soal, jika ada*
Jawab: APBN
- b. *Transportasi (soal) ke sekolah*
Jawab: APBN dan APBD
- c. *SPJ pengawasan dari dinas*
Jawab: APBD

TRANSKIP WAWANCARA

Nara Sumber : Drs. Pono Fadlullah, M.Hum
Jabatan : Kepala Sekolah
Sekolah : SMA Negeri 68 Jakarta
Lokasi : Ruang Guru
Waktu : Rabu siang, 23 Februari 2011

Dalam rangka mempersiapkan siswa optimal dalam menghadapi Ujian Nasional, apa yang telah dilakukan sekolah?

Materi kelas XII sudah diselesaikan di semester 5, semester 6 drill terus untuk TO (Try Out). TO itu dievaluasi guna diberikan analisis materi yang masih lemah untuk diulang lagi, terus TO lagi, diulang lagi, TO lagi.

Try Out berapa kali?

Tahun lalu 6 atau 7 kali.

Yang mengadakan sekolah sendiri?

Macam-macam. Ada sekolah sendiri, ada bimbingan belajar, perguruan tinggi, MKKS. Dari perguruan tinggi wkt itu Dinas Pendidikan menjalin kerjasama dengan Guna Dharma utk persiapan pra UN.

Ada kendala dalam pelaksanaan ujian kemarin?

Ada kendala, kemarin tidak lulus 11 orang karena anak terjebak kepada bocoran soal dan tidak siap menghadapi ujian sehingga dia mengandalkan bocoran.

Jadi kemarin ada kebocoran?

Tidak. Itu sebenarnya prediksi saja. Justru karena dia percaya bocoran itu makanya tidak lulus.

Jadi bocoran itu dari luar ya?

Dari luar.

Itu Ujian Utama, kan? Saat Ujian Ulangan lulus semua?

Ya, lulus semua.

Solusinya bagaimana, Pak?

Solusi terbagus ya pada ujian kedua itu. Kita siapkan lagi ujian kedua, jangan percaya pada bocoran. Lalu konsentrasi pada materi yang diujikan, utamanya yang belum lulus, harus lulus.

Dapat informasi tentang UN dari mana (sosialisasi)?

Kami memang tim pengkaji juklak dan juknis sehingga setelah juklak dan juknis terusun, kami sosialisasikan bertingkat, dari pihak panitia penyelenggara, lalu turun kepada kepala sekolah, lalu guru bidang studi yang diujikan nasional dan semua masyarakat. Mass media juga perlu dipahami secara umum. Dari Dinas

Pendidikan kemudian kepala bidang, kepala bagian, kepala sekolah, guru-guru bidang studi yang diujikan, lalu ke orangtua murid juga disosialisasikan.

Jika ada perubahan UN, informasinya didapat dari mana?

Dari panitia penyelenggara tingkat dinas. Karena tingkat dinas berkewajiban membuat juklak dan juknis sekaligus mensosialisasikan. Untuk sekarang cepat sekali. Kita bisa akses ke internet di website dan email yang disajikan. Kita bisa buka kapan saja. Sedangkan informasi tentang UN kepada orangtua siswa dan siswa kelas XII pihak sekolah mengadakan sosialisasi untuk memberikan informasi tentang UN sesuai dengan juklak dan juknis.

Ada panitia tingkat sekolah. Bagaimana rekrutmennya?

Rekrutmennya guru-guru yang sesuai bidangnya dan sudah pernah jadi panitia. Kita tunjuk untuk kita SK-kan sehingga bisa melakukan tugas dengan sangat bertanggung jawab.

Ada berapa personel?

Minimal tujuh.

Kewenangan mereka apa?

Melaksanakan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) sesuai yang telah diatur dalam surat tugas itu.

Apa sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan UN?

Banyak, dari sarana-prasarana, perangkat soalnya, dari pemindaianya, penilaiannya dan sistem regulasi. Kami punya juklak dan juknis Pos (Procedur Operational Standard). Harus kita patuhi.

Itu dibuat oleh sekolah?

Tim khusus yang ditunjuk oleh Dinas dan disahkan oleh Dinas. Soalnya dari BSNP membuat aturan bagaimana sistem penagwasan, sistem pemindaianya.

Kalau kebocoran tidak ada?

Mutlak tidak ada. Kalau ada bocoran, justru itu prediksi yang menyesatkan. Berikut kuncinya juga ada. Mungkin sekali nomor 1 cocok atau nomor 2 cocok, tapi itu gambling.

Apa itu beredar?

Beredar, itu memang dijual.

Beredar di sekolah ini?

Kami punya pengalaman di bimbel. Kalau dulu yang laku memasarkan di Jakarta Pusat ini sekitar Senen, Gunung Agung sekitar perempatan itu, diburu anak-anak. Di Jakarta Selatan, Blok M dan sekitarnya. Di Jakarta Timur, Cililitan, PGC dan sekitarnya. Di Jakarta Barat, Grogol. Sekitar Terminal Tanjung Priok. Bikin soal bocoran itu gampang sekali. Soal tahun lalu diubah tahunnya sekarang, difotokopi, orang sudah percaya. Persis dan banyak yang beli. Anak yang malas, setengah-setengah tidak percaya diri, dia berapapun mau beli.

Bagaimana mekanisme pelaporannya?

Pelaporannya sangat cepat, online, terbuka, dan semuanya bisa tahu di bagian-bagian tertentu. Kita menggunakan sistem online. Dengan dibantu teknologi canggih ini sangat mudah. Pengumuman pun nanti online. Nggak perlu repot-repot, kumpul di sekolah untuk coret-coret.

Ketika soal dikumpul, disegel lagi, lalu bagaimana? Apa dibawa ke rayon?

Di sistem yang ditunjuk dalam pos nanti. Kita ikuti saja. Kalau dikirm ke rayon kita ikuti. Lembar jawabannya ke perguruan tinggi yang ditunjuk, misalnya UNJ.

Kalau Rayon sini di mana?

SMAN 77.

Biasanya ada dana operaasional seperti makanan kecil buat panitia. Pendanaannya dari mana?

Dropping dana untuk negeri dari Dinas Pendidikan Provinsi. Pusat tidak ada. Dana dari APBN , tapi sangat kecil. Kita harus nombok dari uang Komite sekolah. Karena penjaga ujian kita kasih transport, makan, kita enak-enakin.

Berapa dana dari Dinas Pendidikan per siswa?

Saya lupa.

Apa ada pungutan kepada siswa dalam pelaksanaan UN?

Tidak ada.

Selain acara yang dapat memotivasi siswa seperti try out, ada lagi?

Kita mengundang motivator.

Acara lain seperti berdoa bersama?

Ada. Bahkan anak-anak Rohis mabit (malam bina iman dan takwa) di sini. Menginap sambil belajar dan shalat tahajud di malam hari ketika malam Minggu.

Ada harapan terhadap pelaksanaan Ujian Nasional agar tiap tahun meningkat?

Mudah-mudahan saja untuk SMA 68 siswa-siswinya hasilnya meningkat

Nara Sumber : Dra. Sentialam Manurung
Jabatan : Guru Bahasa Inggris
Sekolah : SMA Negeri 68 Jakarta
Lokasi : Ruang Guru
Waktu : Rabu siang, 23 Februari 2011

Dalam rangka mengoptimalkan siswa menghadapi Ujian Nasional (UN) tahun lalu, apa yang telah Anda lakukan?

Memberikan materi yang sesuai SKL yang akan diujikan, jangan lari dari situ.

Ada pelajaran tambahan yang diberikan?

Pelajaran tambahan tidak ada, tapi tetap kita beritahukan ke anak bahwa setiap mereka mengalami kendala, kita siap untuk melayani mereka, dengan datang ke ruang guru. Dan biasanya mereka datang. Sudah merupakan kebudayaan. Jadi mereka tidak sungkan lagi untuk datang. Di luar pun mereka boleh datang ke kita.

Ada pemberitahuan bagaimana menjawab soal dengan taktis?

Ada juga misalnya untuk menghemat waktu, kalau yang ditanyakan mengenai cerita, acapkali dia sudah tahu, jadi tidak perlu lagi fokus dengan teks. Boleh langsung dijawab yang dia tahu.

Siswa kadang ada perasaan khawatir dan cemas. Anda menemukan itu?

Pada umumnya anak-anak sekarang tidak begitu khawatir, karena mereka anak-anak yang sudah termotivasi. Mereka sudah punya rencana ke depan. Kalau dibanding dengan orang lain, jauh lebih siap. Jarang kita menemukan anak seperti itu. Bahkan sebetulnya mereka malah ingin menggarap soal lebih banyak. Tanpa kita suruh mereka mengerjakannya.

Dalam memotivasi siswa, apa Anda menemui kendala?

Tidak. Cuma menjadi satu kendala, saya, kan, mengajar Bahasa. Kita mengajarkan jenis teks ada bermacam-macam. Oke anak itu mengenal teks, Cuma tingkat kesulitan dari teks itu, kan, tidak bisa kita raba. Misalnya dia kutip teks, misalnya dari Jakarta Post, dibikin lagi teks yang dari Times. Jauh lebih sulit yang dari Times. Meskipun misalnya jenisnya...item, tapi tingkat kesulitannya, di situlah pembuat soal harus jeli. Seperti apa sih sebetulnya yang biasa untuk SMA. Kadang-kadang sepertinya dia sudah melakukan, diujikan atau misalnya diberikan satu teks yang recount. Recount itu, kan, pengalaman. Tapi pengalaman itu, diambilnya dari teks dari mana, tingkat kesulitannya yang tidak sama. Kita juga sudah memberikan suatu strategi, apapun yang membaca sebanyak-banyaknya.

Nara Sumber : Endang Sri Hartini, M. Si
Jabatan : Guru Ekonomi
Sekolah : SMA Negeri 68 Jakarta
Lokasi : Ruang Guru
Waktu : Rabu siang, 23 Februari 2011

Persiapan apa yang telah Anda lakukan agar siswa maksimal dalam menghadapi UN tahun lalu?

Biasanya bapak-ibu guru mempersiapkan anaknya untuk melakukan review. Review materi dari kelas 1 sampai kelas 3. Kemudian melakukan try out. Ketiga, bintal (Pembinaan Mental)-nya diperbaiki atau disiapkan untuk menghadapi Ujian Nasional.

Bentuk bintalnya seperti apa?

Macam-macam. Minimal dari mulai mengalihkan suasana dari rutinitas ke sesuatu yang baru sehingga dia punya motivasi yang baru lagi untuk melakukan yang lebih baik, itu bisa beraneka. Tiap tahun mungkin bisa tidak sama, bukan hanya sekadar misalnya bintal Rohisnya dalam bentuk tausiyah-tausiyah keagamaan, tetapi bisa juga dengan pendekatan psikologis.

Apakah Anda mendatangi siswa satu per satu?

Tidak. Biasanya guru bidang studinya. Tetapi kalau mau menyeluruh, sekolah yang mengadakan kegiatan.

Acaranya apa, misalnya doa bersama?

Bisa seperti itu.

Ada pelajaran tambahan atau pendalaman materi?

Pendalaman materi ada, tambahan jam.

Dimulai kapan?

Tahun lalu mulai dari semester dua.

Dalam satu minggu berapa hari?

Paling satu minggu bisa tambah sekitar empat jam, paling banyak untuk semua bidang studi.

Kalau begitu ada berapa hari?

Didistribusikan ke hari-hari lain atau hari Sabtu. Saya kemarin pelajaran Ekonomi didistribusikan ke hari-hari yang lain. Ada juga yang hari Sabtu. Tergantung kebutuhan. Artinya bukan empat jam untuk tiap bidang studi. Jadi dalam satu minggu ditambahkan empat jam. Itu bisa bergantian. Belum tentu Ekonomi di minggu ini ada, di minggu depan tidak ada. Mesti selang-seling.

Materi apa yang diberikan dalam pendalaman materi?

Sesuai dengan SKL.

Apakah bahas juga materi-materi tahun lalu?

Orientasi kita, kan, tidak cuma UN. Orientasi kita juga untuk masuk perguruan tinggi. Jadi soal kita ambil dari mana saja. Yang penting orientasinya ke SKL, fokusnya.

Jadi tidak sekadar materi soal UN?

Salah satu di antaranya itu.

Yang lainnya?

Bimbel, materi dari pasar, atau materi dari sekolah lain (change), ada juga MKKS mengadakan. Dari mana saja boleh.

Apakah siswa diajarkan untuk menjawab pertanyaan dengan taktis, misalnya kerjakan yang lebih mudah dulu?

Saya kira setiap guru pasti akan menyiapkan anaknya secara totalitas, jadi hal seperti itu sudah diberikan.

Kadang siswa ada perasaan takut dan cemas dalam menghadapi UN. Bagaimana Anda memotivasi siswa?

Justru itu gunanya bintal tadi. Kita tidak lagi mempersiapkan setelah ujian, tetapi sebelum ujian. Kita siapkan supaya dia tidak ada soal. Usaha maksimal sebelum ujian. Setelah itu harus terima kenyataan. Karena sudah dilakukan yang terbaik.

Menemui kendala saat mempersiapkan siswa?

Ya pasti ada. Kendala itu tidak akan sama dari tahun ke tahun. Situasi siswa secara menyeluruh tidak akan sama dari tahun ke tahun. Kalau ditanya treatment-nya apa, tergantung situasi.

Kendala yang Anda hadapi?

Ya itu, memotivasi siswa agar mau belajar secara mandiri saja. Kalau dia sudah punya motivasi yang tinggi untuk belajar mandiri, sudah aman.

Ada siswa yang enggan untuk ikut pengayaan?

Ada. Dia tidak punya motivasi untuk belajar mandiri. Jadi bukan cuma belajar saja, tapi belajar mandiri. Artinya, tidak mungkin cukup guru menjelaskan semua hal. Maka dia yang harus menggali. Seberapa jauh gali yang dia bisa, tergantung ke motivasi dirinya masing-masing. Target-target yang dia ingin capai, kita, kan, hanya bisa mengarahkan dia, memfasilitasi dia, menemani dia, tapi sebatas dia tidak berusaha atau berusaha tidak maksimal, ya sebanyak itu pula yang dia dapat.

Nara Sumber : Dra. Happy Grace Pardede
Jabatan : Guru Kimia
Sekolah : SMA Negeri 68 Jakarta
Lokasi : Ruang Guru
Waktu : Rabu siang, 23 Februari 2011

Persiapan apa yang sudah Anda lakukan untuk mempersiapkan siswa agar optimal menghadapi UN tahun lalu?

Kita membuat latihan-latihan soal. Try Out-nya, kan, banyak. Try Out dibahas. Ada pendalaman materi, selain ada tambahan jam, hari Sabtu. Latihan soal-soal dari kelas 1 sampai kelas 3.

Ada kendala yang dihadapi saat mempersiapkan siswa?

Tidak ada, biasa-biasa saja, lancar-lancar saja karena kebetulan guru-gurunya bagus. Jadi pas kelas 3 tidak beban.

Saat pelajaran tambahan, materi apa saja yang diberikan selain soal-soal kelas 1 sampai kelas 3?

Cuma itu saja. Semua soal kita ambil dari Try Out, soal-soal SNMPTN, soal-soal UN tahun lalu. Anak-anak boleh tanya soal-soal dari luar. Karena ada juga anak-anak di luar belajar, bimbel (bimbingan belajar). Pokoknya kita latihan soal dari kelas 1 sampai kelas 3. Biasanya kita lempar ke anak-anak, mana yang masih kurang, bab mana. Misalnya mereka minta Bab Larutan, lalu kita bahas soal Larutan secara garis besar.

Menghadapi UN, anak-anak ada perasaan cemas dan gelisah. Bagaimana cara Anda memotivasi anak-anak?

Tanpa kita motivasi mereka, dengan kita semangat mengajar, mereka termotivasi sendiri. Tidak terlalu berat memotivasi mereka. Kalau kelas 3 ya, mereka dengan sendirinya sudah giat. Karena anak-anak SMA 68 beda ya lingkungannya. Mereka sebenarnya sudah semangat tanpa kita terlalu menyemangati. Kita lihat, misalnya, kita masuk ke kelas, mereka sudah sedang melakukan latihan soal-soal. Tanpa kita gerakkan mereka sudah latihan soal-soal. Memang kelas 3 semangat sekali.

Sepertinya secara keseluruhan siswa-siswi SMA 68 sudah semangat ya? Bahwa harus giat kapan pun?

Iya, betul. Mereka sendiri sudah saling memacu temannya. Karena lingkungannya seperti itu ya jadi semuanya terpacu.

Apakah siswa diajarkan cara taktis mengerjakan soal, misalnya mengerjakan soal yang lebih gampang dulu?

Oya, itu pasti. Pasti itu semua kita lakukan juga.

Apa ada hal lain selain itu? Terutama kimia, kan, menghafal rumus?

Misalnya soal-soal yang keluar biasanya begini. Jadi dalam satu bab, kalau bab seperti ini soalnya begini, kita kasih tahu. Terus kalau cara gampang, kamu harusnya seperti ini, kita kasih tahu semua cara mengerjakan. Apa-apa yang perlu diperhatikan.

Nara Sumber : Dra. S.N. Sugardini
Jabatan : Guru Biologi
Sekolah : SMA Negeri 68 Jakarta
Lokasi : Ruang Guru
Waktu : Rabu siang, 23 Februari 2011

Untuk mempersiapkan siswa agar maksimal menghadapi Ujian Nasional, apa yang telah Anda lakukan?

Diskusi mengenai semua materi yang diujikan, try out, pendalaman materi.

Apa yang didiskusikan?

Di kelas, apa yang dibutuhkan mereka, apa yang tidak diketahui mereka, apa yang mereka ingin tahu.

Diskusi dilakukan saat pelajaran atau khusus?

Tergantung guru masing-masing. saya sebagai guru biologi setiap saat seperti itu.

Ada pelajaran tambahan?

Tidak ada, tetapi kami menyiapkan waktu dan kesempatan. Kalau anak butuh kami, kami siap melakukan.

Kemarin apa ada anak?

Banyak.

Berarti Anda sudah menyediakan diri untuk itu?

Iya. Guru SMAN 68 semua siap.

Biologi, kan, ada pelajaran praktik. Dalam pengayaan apakah juga di laboratoorium?

Pasti ada. Kita secara keseluruhan try out. Hasil try out didiskusikan. Kalau ada anak yang membutuhkan tambahan, mereka datang ke kita.

Materi pelajaran tambahan yang diberikan apa?

Sesuai yang dibutuhkan anak.

Apakah soal-soal tahun lalu diberikan?

Kita tidak memberikan soal-soal tahun lalu, tapi guru-guru SMAN 68 kreatif. Kita bikin soal-soal yang baru saja. Karena soal tahun lalu belum tentu sesuai dengan SKL sama seperti sekarang. Jadi kita sesuaikan dengan SKL saja.

Anda memberikan cara jawab soal secara taktis?

Jelas. Misalnya soal nomor 1 mengenai soal, kalau yang sudah tahu coreti dulu yang sudah tahu. Berarti kalau yang tidak ada pasti hubungan option antara A, B, C, atau D, pasti ada kunci-kunci di mana nomor A salah, pasti ada faktor salah yang masuk option. Sudah diajarkan, harus.

Menghadapi UN, pasti ada siswa yang cemas dan takut. Bagaimana Anda menghadapi itu?

Siswa SMA 68 tidak pernah (cemas dan takut) karena tiap masuk kita motivasi. Semangat, jangan sakit, makan makanan sehat. Sebelum ujian, hari Minggu jangan belajar, rekreasi dengan orangtua. Berdoa, sharing dengan orangtua. Kita harus memberi semangat itu. Mulai Januari lalu kita try out. Tiap dua minggu sekali kita try out. Hasil try out kita diskusikan. Sebelum try out kita diskusi. Anak-anak tidak ada rasa takut dan percaya diri banget. Anak ujian, kita diamkan, tidak ada yang menengok kiri-kanan, karena kemarin kita tekankan besok yang mengawas guru luar, jangan sampai mereka apriori terhadap sikapmu. Siswa SMA 68 tidak ada yang takut ujian, kecuali satu-dua orang yang punya sifat kayak begitu, susah berubah.

Dalam mempersiapkan siswa, ada kendala?

Tidak ada.



TRANSKIP WAWANCARA

Nara Sumber : Abdul Haris, SE
Jabatan : Kepala Sekolah
Sekolah : SMA Triwibawa.
Lokasi : Ruang Kepala Sekolah
Waktu : Senin siang, 21 Februari 2011

Bagaimana persiapan pelaksanaan Ujian Nasional tahun lalu?

Persiapannya kurang maksimal. Latar belakangnya soal input. Inputnya siswa kita ini adalah sisa daripada sisa. Artinya dia sudah daftar di sekolah yang dianggap favorit tidak lolos, turun lagi tidak lolos juga, paling terakhir kita. Dasar inputnya tidak memadai. Motivasi belajar mereka juga kurang. Ketiga, kenapa hal demikian bisa terjadi, faktor pendorong penyemangat mereka karena latar belakang pendidikan orangtua mereka minim.

Rata-rata apa mata pencaharian mereka?

Ibunya kebanyakan kuli nyuci. Paling hebat kerja di perusahaan.

Warga sekitar sini ya?

Warga sekitar sini. Makanya saya katakan, Kepala Sekolahnya kumis, anak-anak didiknya tinggal di daerah kumis; kumuh dan miskin. Tinggalnya di real estate kompleks DPR, Daerah Pinggiran Rel. Kalau mau sekolah saja, mereka kita giring dulu untuk belajar. Belum pulang, mereka sudah mau pulang. Belum dioptimalkan saja kita adakan pendalaman materi, kemudian kita ikut-sertakan try out sampai dua kali, tapi grafik belajar mereka sangat minim. Sehingga kami pernah menawarkan pada mereka lewat orangtuanya, "Kalau saja putra-putri Bapak-Ibu belum mampu mengikuti ujian, silakan ditunda dulu sehingga tahun depan bisa ada peluang ikut ujian." Mereka tetap menghendaki ikut ujian. Mereka bilang, "Kalau tidak lulus Ujian Nasional, kita ikut Paket C saja." Akhirnya alhamdulillah Pemerintah mengadakan Ujian Ulang tempo hari. Hampir 70% mereka lulus, untuk Ujian Ulang. Itu pun kami paksakan. Jadi kendalanya ya, untuk mengumpulkan siswa mempersiapkan UN.

Selain try out dan pendalaman materi, ada lagi yang sifatnya motivatif?

Kita senantiasa beri motivasi. Pokoknya tiada hari tanpa mengingatkan anak-anak bahwasanya ujian akhir di depan mata. "Tiada hari tanpa belajar. Tiap hari kalian masuk walaupun belum ujian, itu ujian. Anggap saja gurumu itu adalah pengawas." Tetap kita berikan semangat, sehingga ketika tidak lulus di ujian pertama, karena semangat, akhirnya mereka punya motivasi untuk ikut ujian lagi. Akhirnya 70% mereka lulus. Kemudian dilanjutkan sisanya kami paksakan, kami daftarkan untuk ikut Paket C. Begitu pelaksanaan ujian Paket C, kami hubungi. Kaget juga orangtuanya, kok masih ada perhatian sekolah. Tanpa dipungut biaya, silakan berangkat.

Yang mengadakan siapa?

Rayon, di SMK 35. Kami siapkan transportnya, angkutannya. Berangkat, tinggal duduk manis di sana. Kami tunggu. Ditunggu oleh Kepala Sekolah dari pagi sampai siang. Alhamdulillah lulus semua. Cuma yang jadi laporan kami cuma 70% itu. Tiga puluh enam peserta ujian, alhamdulillah lulus semua. Bagaimana caranya kita harus berusaha, kita selamatkan anak-anak, selamatkan nama sekolah. Ada kesempatan, kita masuk. Alhamdulillah rekan-rekan dan Yayasan mendukung. Akhirnya semangat kita muncul.

Saya sebenarnya agak frustasi juga. Saya sudah 20 tahun mengabdikan, kaget juga. Saya Kepala Sekolah baru tiga tahun. Saya mengabdikan di sini kurang lebih 26 tahun. Dua puluh tiga tahun saya Wakil Kesiswaan. Saya tahu persis ciri anak-anak, A sampai Z. Bahkan sampai ke rumah-rumah mereka, saya tahu. Rumahnya kasihan, tinggal di emperan. Ini lagi digusur-gusur. Di pinggir rel. Saya bilang, "Kalian jangan sampai terkendala ujian. Kalau kalian mau belajar malam pakai kelas, silakan. Tapi jangan jadikan tempat untuk bermain, tapi untuk diskusi dan belajar." Saya sudah minta izin ke Yayasan.

Untuk pelaksanaan UN, apa saja yang disiapkan?

Pertama untuk kesiapan tentu pembentukan panitia. Kemudian kita mengusulkan pengawas silang melalui rayon. Kita mengikuti rapat sosialisasi dan kita kumpulkan orangtua siswa dan siswa untuk mendapatkan sosialisasi mengenai tata cara Ujian Nasional. Kemudian kami kedatangan oleh tim independen, dari kampus UNJ. Berikutnya tiap hari kami dimonitor oleh tim monitoring, dari Sudin Pendidikan, dari Dinas Kebudayaan Jakarta, dari Rayon, pengawas paket. Sebenarnya apa saat pelaksanaan lancar saja, tapi karena otak anak-anak terbatas. Mereka tidak senang soal yang adanya wacana karena mereka malas baca. Mereka tidak senang soal yang menghitung. Mereka senang menghafal.

Informasi mengenai UN dari mana?

Dari Rayon, kemudian BSNP.

Ada pertemuan-pertemuan (sosialisasi)?

Seperti pada hari ini ada pertemuan di SMK 27. Tahun lalu juga di SMK 27.

Misalnya ada perubahasn sosialisasi UN?

Kami dapat informasi dari Rayon. Kami juga aktif jadi anggota MGMP.

Apa Informasi yang disampaikan oleh pihak sekolah?

Pihak sekolah mengundang para orang tua dan siswa kelas XII, menjelaskan bagaimana pelaksanaan ujian nasional, kemudian pihak sekolah menawarkan sharing untuk saling mendukung agar pelaksanaan ujian nasional berjalan sesuai yang diharapkan,....."antara lain menawarkan try out beserta pembiayaannya.

Rekrutmen panitia bagaimana?

Dari guru-guru yang nota benenya mereka tidak ditugaskan untuk mengawas silang ke luar. Panitianya ada lima orang; saya, satu penanggung jawab, Wakil Kepala Sekolah, guru.

Kewenangan panitia apa saja, Pak?

Membantu saja. Misalnya menyiapkan ruangan ujian, ruangan pengawas, peralatan sarana-prasarana yang dibutuhkan seperti kertas, blangko, antar-jemput soal ke Rayon.

Ada kebocoran soal?

Tidak ada. Tim independennya pun stand by di ruangan.

Mekanisme pelaporan?

Ada format blangko laporan harian. Laporan harian dibuat per bidang studi. Laporan kumulatif. Pada hari itu juga dikirim ke Rayon berbarengan kita mengantarkan lembar jawaban. Rayonnya di SMK 35 di Karet Tengsin, di belakang kuburan Karet.

Ada dana operasional?

Ada. Dari tingkat Provinsi dan Pusat. Tahun lalu hanya sedikit. Hanya ada Rp 27 ribu per siswa dari Pusat. Dari tingkat 1 (provinsi) Rp 32.700. Sangat tidak cukup.

Untuk apa saja pengeluarannya?

Persiapan saja kita harus menatar, memberikan pembinaan kepada guru-guru tentang teknik menyusun kisi-kisi. Mereka ikut bedah soal ke MGMP. Mereka harus menyusun naskah ujian. Naskah ujian kita bayar. Sekolah yang bayar, sudah ada anggarannya. Kemudian membeli kertas, mau nge-print naskah. Beli tinta. Tenaga yang nge-print. Turunnya dana setelah pelaksanaan. Kita harus nalangi dulu. Itu yang jadi kendala. Kita terpaksa minta bantuan dari Yayasan bagaimana caranya sehingga Yayasan punya inisiatif. Dipanggilah orangtua, siapa yang bisa membantu. Subsidi silang.

Untuk pelaksanaan UN, ada pungutan ke siswa?

Tidak ada. Cuma adanya sistem silang itu. Kita panggil orangtua yang penghasilannya di atas Rp 2 juta. Ada saja yang membantu. Tidak ditetapkan besarnya berapa.

Selain try out dan pendalaman materi, ada-tidak acara yang memberi motivasi siswa?

Tiap upacara kita laksanakan. Kita berikan pengarahan kemudian doa bersama. Baik di awal dan akhir upacara, diselipkan doa untuk kesuksesan siswa kelas 3.

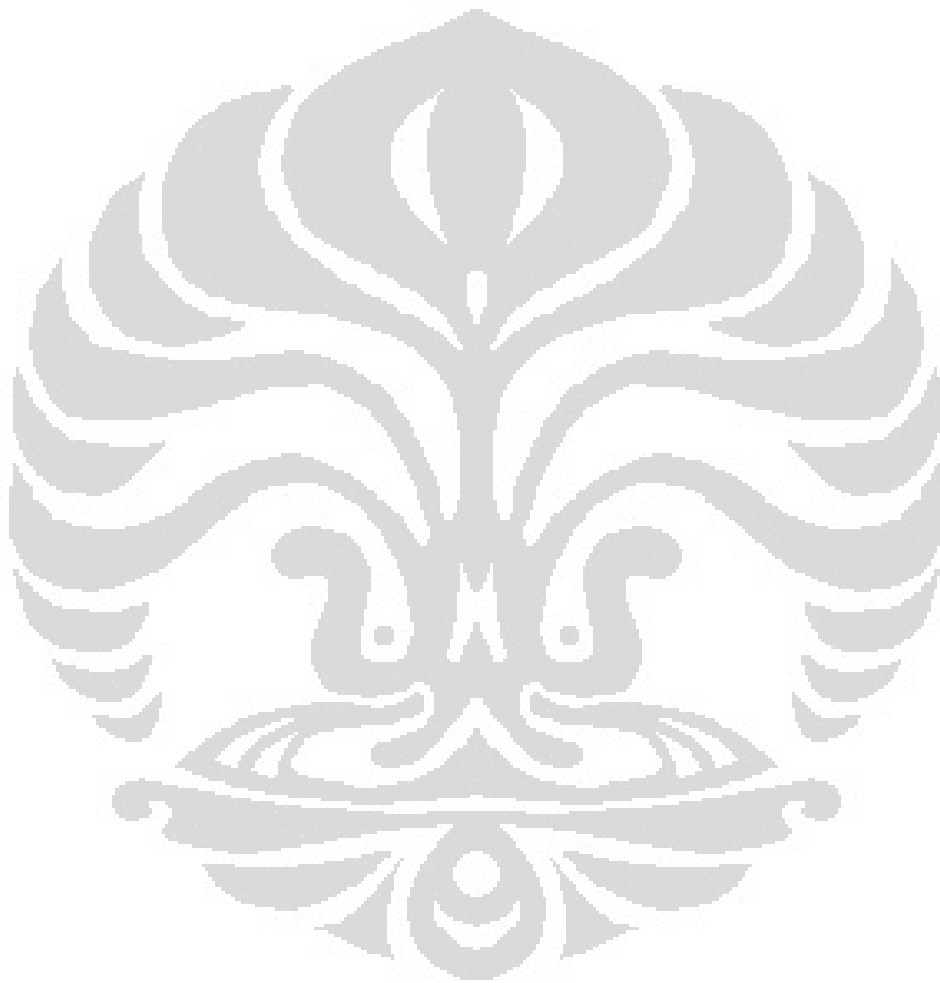
Harapan Anda supaya pelaksanaan Ujian Nasional lebih baik?

Pertama, pelaksanaan pembuatan soal, kalau bisa, kita mendapatkan petunjuk dari BSNP, tetapi pembuatan soal dilakukan oleh sekolah masing-masing. Sebab standarisasi sekolah berbeda-beda. Triwibawa ini sekolah, benar di kota Jakarta, tetapi selangkah saja ke sekolah lain sudah jauh. Karena inputnya tadi, kemudian ekonomi mereka. Berikutnya adalah meningkatkan bantuan subsidi dari

pemerintah agar`sekolah seperti ini diperhatikan dan dibantu. Selama ini kami hanya mendapatkan yang namanya BKMM. BKMM, kan, tidak seluruh siswa. Dari 112 siswa, hanya dapat 16 siswa. Itu pun disaring oleh kami yang benar-yatim-piatu dan miskin.

Bantuan dari dinas?

Kami hanya dapat bantuan dari Dinas dalam bentuk BKMM.



Nara Sumber : Bambang Setiabudi, S.Pd
Jabatan : Guru Geografi
Sekolah : SMA Triwibawa.
Lokasi : Ruang Kepala Sekolah
Waktu : Senin siang, 21 Februari 2011

Ada kendala dalam mempersiapkan siswa-siswi menghadapi Ujian Nasional?

Anak sendiri kurang ada minat belajar. Ini yang mengakibatkan anak tidak lulus Ujian Nasional. Dari sekolah yang namanya mendorong supaya 100% lulus terus ditingkatkan. Dari pendalaman materi sampai menjelang Ujian Nasional. Kemudian latihan-latihan soal UN, semuanya yang dilaksanakan oleh sekolah berjalan baik. Cuma dorongan dari orangtua dan diri sendiri murid kurang.

Pendalaman materinya mulai kapan?

Dari semester awal dengan latihan-latihan soal, penggemblengan latihan soal UN, pendalaman materi sampai menjelang UN. Jadi tidak kurang dari sekolah, sudah maksimal, bagaimana supaya anak bisa lulus.

Ada upaya memberitahu siswa menjawab soal dengan taktis?

Itu selalu ada. Diajarkan cara-caranya. Menelaah soal misalnya dari bentuk soal seperti ini bagaimana mengerjakannya. Guru telah memberi sosialisasi dengan baik. Tidak ada istilah belum ada sosialisasi atau program belajar. Di sini sekuat tenaga.

Kapan pelaksanaan pendalaman materi?

Setiap hari. Dari masuk sekolah jam 7 dan pulang 12.30. Jam 14 siswa masuk kembali sampai jam 16. Itu berlangsung sampai Ujian Nasional. Kalau saya perhatikan, soal ujian nasional dari nomor 1 sampai 20 diambil dari kelas X. Kemudian 20-30 kelas XI. 30-40 soal kelas XII. Ujian Nasional soal yang paling banyak keluar kelas X.

Materinya didapat dari mana?

Ada dari buku panduan Ujian Nasional. Kemudian dari Kementerian Pendidikan Nasional. Buku-buku perpustakaan. Materi bukunya cukup banyak.

Apa siswa ditekankan hanya belajar di kelas saja atau ada tugas-tugas di rumah?

Selalu ada. Pekerjaan Rumah (PR) rutin selalu ada. Kalau dikerjakan di sekolah waktunya kurang. Siswa diberikan PR besoknya dikumpulkan, dikoreksi, lalu penilaian.

Ada materi dari internet?

Saya dapat dari internet tentang kisi-kisi Ujian Nasional lalu saya kasih fotokopi. Siswa disuruh belajar dipandu saya sesuai dengan kisi-kisi. Tahun kemarin saya selalu mengikuti MGMP Geografi-Sosiologi di SMA Negeri 1, selalu dapat kisi-kisi UN, kemudian saya bagikan ke siswa, saya pandu, saya ajarkan dari pertama sampai akhir.

Mengalami kendala dalam memberi materi ke siswa?

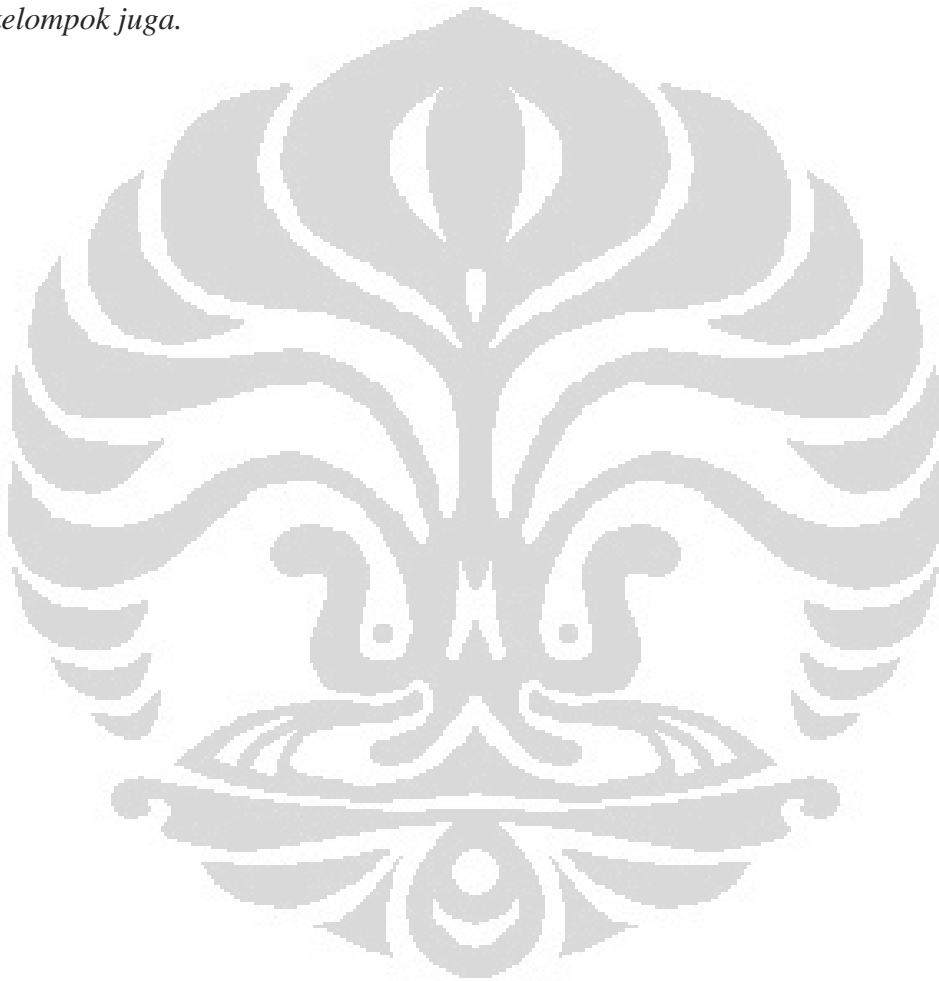
Kendala pasti ada. Namanya siswa 30 lebih, pasti ada yang niat dan tidak niat. Tapi kebanyakan berminat untuk belajar. Yang tidak berminat cuma sedikit.

Target untuk sekarang bagaimana?

Saya targetkan sekarang lebih baik dan bagus. Saya yakin ini lebih bagus dari yang sudah. Saya sudah berjuang dengan semaksimal mungkin. Anak juga sekarang ada minat belajar. Saya yakin pasti ada perubahan besar.

Ada motivasi ke siswa?

Terus, memberi dorongan. Dorongan-dorongan itu dorongan apa saja. Belajar kelompok juga.



Nara Sumber : Lia Masruroh, SS
Jabatan : Guru Bahasa Inggris
Sekolah : SMA Triwibawa Jakarta
Lokasi : Ruang Kepala Sekolah
Waktu : Rabu siang, 23 Februari 2011

Menjelang UN, persiapan apa yang sudah Anda lakukan agar siswa maksimal menghadapi UN?

Selama ini, sejak awal mereka kelas 3, saya sudah coba mulai cari latihan UN, fotokopi soal, bahas soal-soal. Bahasa Inggris itu ada dua poin dari UN; listening dan reading. Jadi membiasakan mereka mengerjakan soal listening-nya, pakai soal-soal tahun lalu. Kalau reading-ya fokus ke jenis-jenis reading.

Ada pelajaran tambahan ke siswa?

Ada.

Materi apa saja yang diberikan?

Bahas soal, dengarkan kaset soal listening.

Apa soal-soal tahun lalu dibahas?

Sudah. Kalau yang saya lihat soal UN itu tidak lagi bahas soal kelas 1 dan kelas 2 lagi. Itu khusus di listening dan reading. Listening itu ungkapan-ungkapannya. Reading itu jenis-jenis teksnya.

Apakah Anda memberikan cara-cara taktis dalam menghadapi soal-soal UN?

Iya. Untuk listening, dengarkan poin intinya di bagian mana, misalnya pertanyaannya seperti apa. Minimal mereka harus tahu dulu artinya. Kalau mereka sudah tahu artinya, enak, mengerjakannya paham. Kalau untuk reading ada juga trik-triknya. Jadi ambil pokok pikiran dari satu teks seperti apa.

Dalam menghadapi UN kadang siswa mengalami kecemasan dan ketakutan. Bagaimana Anda memotivasi siswa supaya optimal?

Motivasi saya, selama kita yakin belajar sudah maksimal, insya Allah bisa selain usaha dan doa.

Dalam rangka mempersiapkan siswa UN, apa ada kendala yang Anda hadapi?

Kendalanya, mereka Bahasa Inggris agak lemah dalam mengartikan kata. Melihat teks sudah panjang, mereka malas baca dan tidak tahu artinya. Jadi susah buat mereka.

Lalu bagaimana mengahdapinya?

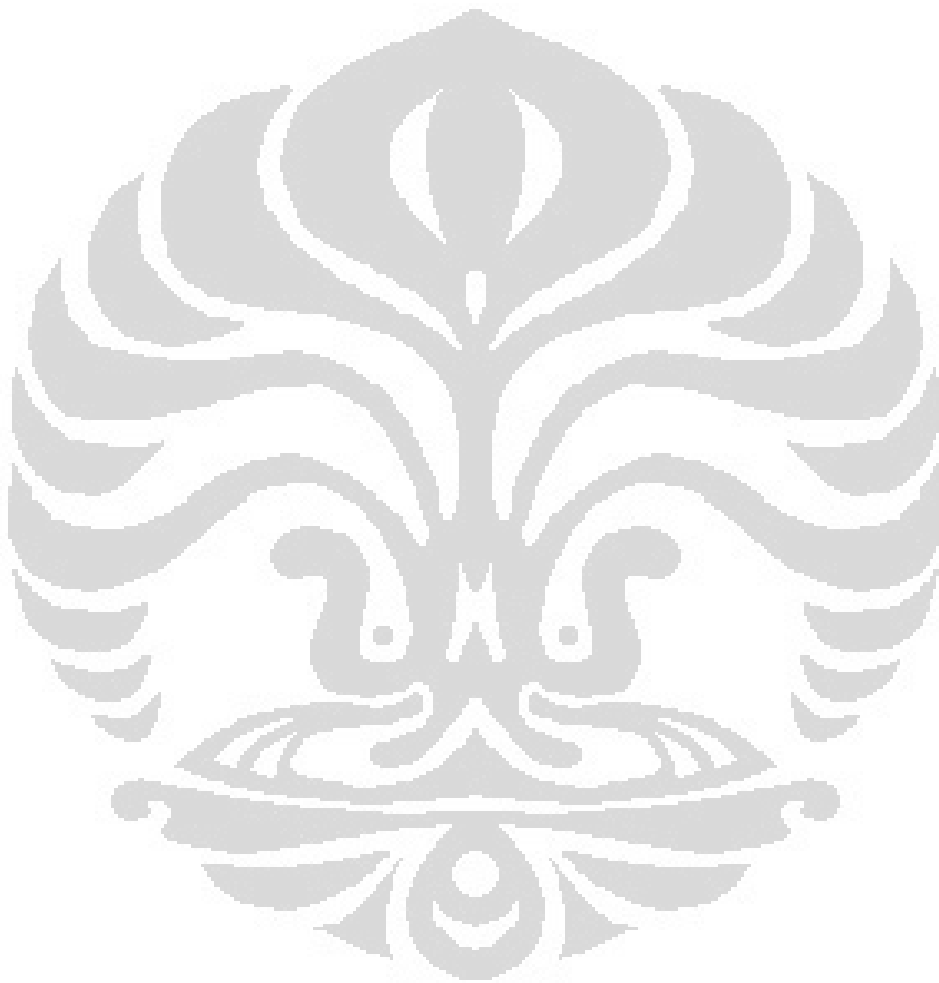
Saya kasih triknya, misalnya pertanyaannya apa, difokuskan ke pertanyaannya. Kalau Bahasa Inggris ada soal pokok pikiran paragraf dua apa, langsung lihat paragraf dua-nya. Nanti cari main idea-nya.

Apa harapan Anda terhadap UN ke depan?

Saya berharap soal UN tidak semakin susah. Soalnya kasihan juga anak-anak banyak bebannya. Mereka tidak cuma harus fokus terhadap satu pelajaran, tapi banyak. Jangan terlalu susah soalnya.

Jadi ada kecenderungan soal semakin susah?

Iya.



TRANSKIP WAWANCARA

Nara Sumber : Drs. Syafi'i
Jabatan : Kepala Sekolah
Sekolah : SMA Dwisaka
Lokasi : Ruang Kepala Sekolah
Waktu : Senin siang, 21 Februari 2011

Bagaimana persiapan menghadapi Ujian Nasional (UN)?

Dari tahun ke tahun kita selalu mengadakan pendalaman materi (PM). Kita kasih waktu empat bulan. Bulan April ujian, awal Desember sampai Maret selalu PM. Kedua, kita selalu menekankan ke guru-guru enam bidang studi UN, terus dan terus kita kasih materi ujian. Ketiga, guru-guru yang Ujian Sekolah seperti PPKN, komputer, agama, seni budaya, mohon mengalah. Tapi semua Allah yang atur. Kan kemarin 0% lulus. Untung Pemerintah menyelenggarakan UN Ulang, hasilnya lumayan separuh tertolong. Selain yang lulus ujian ulang ikut Paket. Masih ada dua orang yang tidak lulus. Untuk tahun 2010/2011 juga sama, meningkatkan PM. Saya juga selalu tekankan ke siswa untuk mengontak Allah, nomornya 44342. Shalat.

Ada kendala yang dihadapi dalam persiapan?

Ada. Dari 31 peserta UN, yang hadir PM selalu anak-anak itu. Paling 10, 11, 12 orang. Yang lainnya tidak pernah nongol. Tapi kalau saya cross check ke rumahnya, sudah jalan. PM jam 8 sampai jam 11. Tiga jam.

PM setiap hari?

Tiap hari. Tapi kalau tanggal merah prei.

Waktu PM, siswa dipungut biaya?

Sekolah sudah kayak begini. Tetap saya memungut. Saya datang dari Bekasi, pakai transport. Kalau saya pribadi lebih mengalah. Saya ngomong ke orangtua murid. Tetapi ngomong doang, murid tidak ada yang... orangtua istilahnya...sudah tinggal besok ujian kita punguti PM biayanya Rp 150 ribu sebagai ganti uang transport dan snack atau makan siang, tetap saja yang bayar 4-5 orang. Akhirnya mau-mau saja orangtua, tapi kenyataannya yang bayar 3-4 orang. Akhirnya kita dan Yayasan mencari-cari untuk nomboki guru-guru. Pada saat gajian, Yayasan mencari utangan. Guru tidak mau tahu. Pas tanggal muda, guru berani menghadap saya. Minta honor. Saya punya rezeki, saya kasih. Ini sudah enam tahun (sejak 2005) jadi Kepala Sekolah. Pemerintah tetap kita harapkan memberi bantuan.

Dapat informasi UN dan perkembangannya dari mana?

Terus terang kami tidak punya jaringan seperti sekolah-sekolah lain. Kami dapat info dari teman-teman.

Kalau informasi langsung?

Rapat-rapat. Rayon.

Kalau ada perubahan sosialisasi?

Dari teman, kepala sekolah. Apalagi saya dari sekolah seperti ini, harus super aktif ke teman-teman.

Bagaimana rekrutmen panitia?

Saya punya staf 17 orang. Kita kumpulkan nama-nama. Kita bikin panitia yang tidak boleh ke mana-mana. Lima orang. Lima orang kita kirim, lima orang kita panitia, lima orang duduk manis di rumah karena sudah sepuh.

Kewenangan panitia apa saja?

Kewenangannya, ikut apa yang telah ditugaskan oleh Dinas ke kami, terutama mengantarkan anak-anak supaya ujian dan bisa lulus. Misalnya Senin kita Ujian Nasional, hari Sabtu saya briefing teman-teman pengawas. Paling itu kewenangan saya; anak-anak saya bisa ujian mandiri, tidak numpang.

Apa sarana-prasarana penunjang pelaksanaan UN?

Untuk meja-kursi, 31 cukup. Ruangan saya bikin dua ruang. Ruang I 16, ruang II 15. Ruangan bisa kita pakai sesuai dengan petunjuk teknis yang diedarkan Dinas. Sarana lain, karena pengawas dari sekolah lain, sebulan sebelum ujian kita cat. Yang bolong ditambah.

Kemarin ada kebocoran ujian?

Tidak ada.

Soal pelaporan, mekanismenya bagaimana?

Pelaporannya, tiap hari hasil dari ujian kita lihat lalu kita kirim ke Rayon. Yang jadi kendala, ambil soal dan kirim soal pakai roda empat. Jadi menyewa taksi.

Ada pendanaan operasional untuk UN?

Ada, membantu, tapi kurang. Rp 100 ribu per anak. Dari APBD kalau tidak salah Rp 16 ribu. Kalau dari APBN sisanya. Itu se-Indonesia sama. Tapi dengan pelaksanaan empat hari, kita sediakan teh, kopi, susu untuk pengawas dan makanan rada enak untuk pengawas.

Ada pungutan ke siswa untuk bayar ujian?

Tetap saya pungut. Uang PM per bulan per anak Rp 150 ribu. Di sini bukan uang ujian, tapi uang akhir tahun ngomong-nya. Uang praktik beli kertas sekian, tetapi uang akhir tahun untuk kelas tiga sekian. Kemarin juga dianggarkan untuk acara perpisahan atas permintaan murid. Totalnya hampir Rp 750 ribu.

Jadi itu bukan untuk bayar Ujian Nasional saja, tapi semuanya?

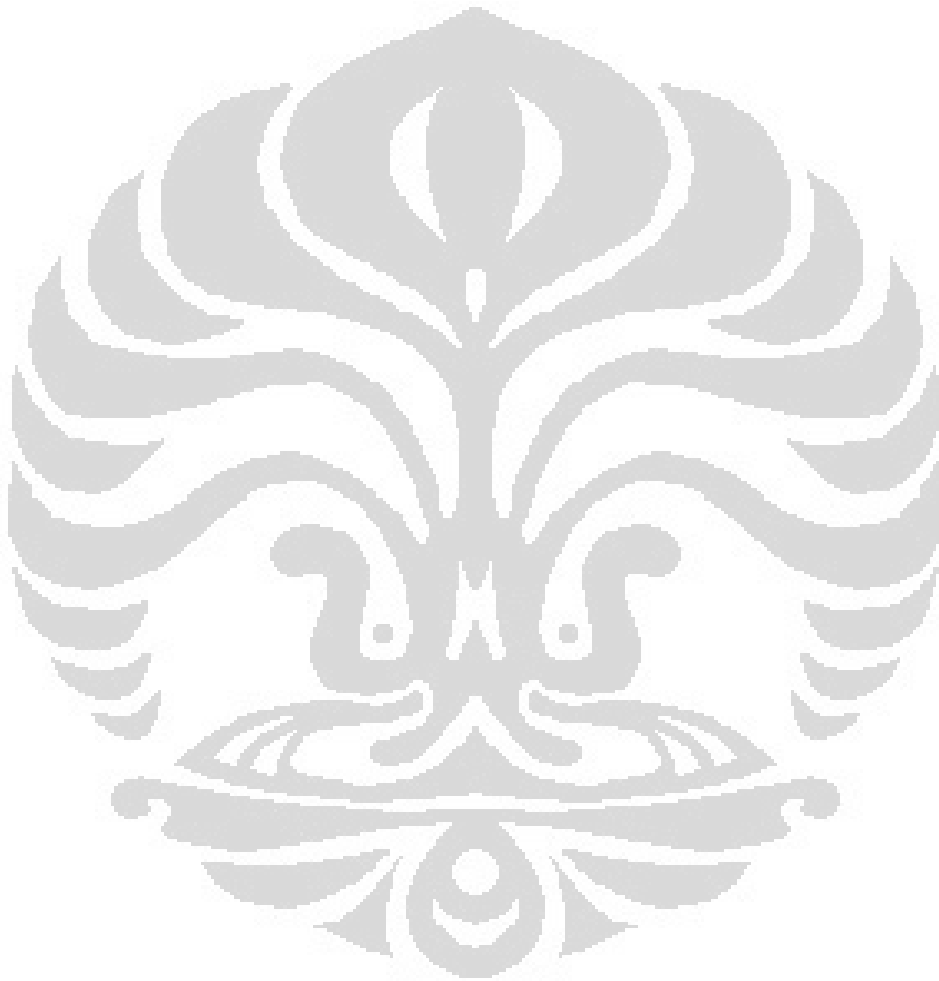
Iya. Sejak enam tahun ini saya pegang (Kepala Sekolah), ada sekitar 40-an ijazah belum diambil. Ada yang kurang uang.

Selain mengadakan try out dan motivasi, ada-tidak kegiatan lain, misalnya doa bersama?

Kamis besok saat try out terakhir, kita adakan doa bersama dan maulid. Selain PM, anak-anak kita motivasi untuk beli buku Panduan Ujian Nasional. Paling cuma separuh yang mau. Doa bersama ada.

Harapan terhadap pelaksanaan Ujian Nasional?

Saya berharap kepada Pemerintah mudah-mudahan ujian tahun besok tidak hanya 40%, tapi 70% dari sekolah. Karena yang bisa mengubah (siswa) sekolah sendiri, bukan Pemerintah. Kelulusan dikembalikan ke sekolah.



Nara Sumber : Loesye E.N. Papilaya, S.Pd
Jabatan : Guru Bahasa Indonesia
Sekolah : SMA Dwi Saka
Lokasi : Ruang Kepala Sekolah
Waktu : Senin siang, 21 Februari 2011

Bagaimana Anda mempersiapkan siswa menghadapi Ujian Nasional?

Kita tahu bahwa sekolah ini sekolah sederhana. Keterbatasan banyak hal. Pertama, buku pegangan anak. Kedua, fasilitas, seperti di sekolah lain punya kamus dan buku-buku sastra. Kalau yang lainnya tidak masalah.

Itu berpengaruh pada Ujian Nasional?

Iya. Anak-anak juga keterbatasan biaya. Bimbel itu semestinya harus enam bulan sebelumnya. Tapi untuk di sini, untuk menarik biaya bimbel agak repot. Bimbel terbatas, paling di sini 2-3 bulan. Kalau sekolah lain enam bulan sebelum UN sudah bimbel.

Di sini ada pendalaman materi?

Ada, itu bimbel. Maret ujian, bimbel dimulai bulan November.

Materi yang diberikan apa saja?

Kita beradarsakan SKL. Biasanya SKL alat untuk memberitahu apa yang diujikan.

Dalam seminggu berapa kali?

Seminggu sekali. Di sini bimbel pagi, kalau sore belajar.

Ada kendala dalam pemberian bimbel?

Pasti ada. Misalnya kalau sekolah bagus sudah punya buku pegangan, kalau di sini patokannya bahan try out. Kalau sekolah lain sudah disediakan buku-buku, buku Detik. Harganya mahal. Kalau anak disuruh beli buku Detik, kita tidak sampai hati karena keterbatasan ekonomi. Mungkin kita kendalanya itu buku-buku pegangan. Soal-soal yang di-try out-kan kita bedah dengan anak-anak. Yang lain anak-anak tidak punya.

Apa anak-anak diajarkan cara taktis mengerjakan soal UN?

Ya, saya biasanya mengajarkan ke anak, kita melihat soal-soal tahun lalu yang keluar apa saja. Yang sering apa, berarti ini yang harus kamu pelajari. Kedua, triknya cari soal yang lebih mudah. Kalau trik yang pertama tadi, kan, cari soal yang sering keluar. Ketiga, kita melihat soal yang sulit dan baru keluar. Yang sekarang sulit dalam Bahasa Indonesia adalah latar belakang tokoh. Anak tak lihat sisi positif dan negatif (tokoh), itu, kan, baru-baru saja. Itulah yang kita bedah.

Bagaimana Anda memberi siswa motivasi agar optimis menghadapi UN?

Kita kalau mau berhasil, kan, harus usaha. Saya bilang ke anak-anak, kalau mau berhasil, usaha. Kalau usaha ada pengorbanan. Pengorbanannya banyak. Seperti biaya. Kedua, keinginan kamu sendiri. Kamu mau-tidak belajar dan berhasil. Kita

perlu memotivasi mereka dengan mendorong mereka melihat sisi positif. Memang perlu memberi motivasi.

Setelah itu siswa termotivasi?

Waktu bimbel pertama, kan, pagi, yang datang paling berapa orang. Dari sekian anak yang datang sekian. Begitu kita memberikan motivasi-motivasi yang sifatnya membangun, mereka dari teman ke teman cerita, lumayanlah yang datang.

Anda punya harapan terhadap pelaksanaan UN?

UN bukan berarti menjebak anak, maksudnya mau menjebak anak agar tidak lulus dengan banyak cara yang mungkin buat mereka mudah tapi buat anak tidak mudah. Jadi tujuan nasional itu apa. Kalau memang tujuannya mau mengukur, jadi tidak menjatuhkan. Bukan untuk menjebak anak terus tidak lulus. Ada yang namanya ujian ulang, ujian Paket C, bukan itu. Kita mebuat anak selama tiga tahun belajar, ada akhir dia belajar itu, "O kita punya keterbatasan sampai sini." Tapi bukan berarti dengan tiga tahun dia sekolah terus berusaha, "Kamu itu tidak bisa apa-apa, dengan hasil ujian begini kamu bisa kelihatan tidak bisa apa-apa." Bukan itu, tapi membuat anak berharap dengan Ujian Nasional, "Saya punya kemampuan sampai sini. Berarti kalau punya kemampuan segini saya bisa kuliah, dong. Kalau kemampuan segini bisa kerja, dong." Jadi Ujian Nasional bukan semacam, kalau anak-anak bilang, momok menakutkan. Buatlah Ujian Nasional semacam anak-anak berusaha untuk, "Eh saya mau dong dengan tiga tahun saya belajar hasilnya begini." Membuat anak semangat untuk ujian. Tidak membuat anak, "Aduh bagaimana dong kalau tidak lulus?" Justru di sinilah letak kelemahan Ujian Nasional; bukan buat anak menjadi semangat, tapi takut dan mendorong mereka untuk melakukan hal negatif. Misalnya beli kunci, karena mereka ketakutan tidak bakal lulus. Memang betul pemerintah memberi kisi-kisi dan standar kelulusan. Tapi mendengar kata-kata teman mereka dan kakak-kakak yang dulu kayaknya menyeramkan. Ada yang tidak lulus justru itu yang harus kita buat tidak terjadi. Tapi membuat anak itu, "Ah Ujian Nasional sama seperti ulangan umum, ulangan harian." Memang mereka harus dimotivasi untuk belajar, tapi Ujian Nasional bukan akhir hidup mereka. Mereka masih punya jangka panjang, pendidikan masih jauh.

Nara Sumber : Dra. Faridawati
Jabatan : Guru Sosiologi
Sekolah : SMA Dwisaka
Lokasi : Ruang Kelas
Waktu : Kamis siang, 24 Februari 2011

Menjelang pelaksanaan UN, apa saja yang dilakukan?

Kita, kan, pendalaman materi. Materi kelas 1 dan 2. Kita memberikan batasan-batasan kepada siswa, yang mau keluar itu apa.

Dalam seminggu ada berapa hari?

Seminggu satu kali. Kalau saya kebetulan dapat jadwalnya hari Kamis.

Tambahan jam atau di luar jam pelajaran?

Di luar jam belajar. Maksimal tiga jam.

Materi apa saja yang diberikan?

Try out yang lalu kita ulang. Ujian Nasional yang dulu kita bahas. Kemudian kita bahas buku paket kelas 1, 2, dan 3.

Apakah siswa diajari mengisi jawaban UN secara taktis?

Iya. Khususnya untuk Sosiologi, yang penting anak memahami pertanyaan. Kadang anak-anak suka terjebak, baru baca awalnya, langsung...

Kadang siswa mengalami perasaan takut dan cemas. Bagaimana Anda memotivasi siswa agar tenang?

Satu, harus siap. Paling tidak apa yang sudah diberikan dipelajari. Kemudian, tidak usah takut, hadapi saja, yang penting kita usaha. Terus banyak beribadah. Puasa, kalau bisa, pada saat menghadapi ujian. Itu pesan saya ke anak.

Anda menemui kendala saat mempersiapkan siswa?

Ada. Kadang pada saat pendalaman materi anak-anak suka telat datang.

Ada harapan terhadap pelaksanaan UN?

Tahun kemarin soal A dan B. Tahun ini lima (A, B, C, D, dan E). Itu sudah membuat anak ketakutan. Harapan saya kalau bisa jangan sebanyak itu. A dan B sudah cukup. Itu membuat pusing anak dan guru. Mudah-mudahan soal tidak jauh dari yang kami bahas.

TRANSKIP WAWANCARA

Responden: Dinas Pendidikan Jakarta Pusat

No.	Pertanyaan	Jawaban	Kode
1.	Bagaimana Anda memandang secara umum pelaksanaan UN tahun 2010?	UN secara umum berjalan dengan lancar dan sukses, terbukti dengan tingkat kelulusan yang sangat tinggi (untuk tingkat menengah mencapai 98%)	
2.	Bagaimana cara kebijakan UN disosialisasikan oleh dinas pendidikan?	Ada 2 jalan yang ditempuh: Secara langsung : Dinas Pendidikan mensosialisasikan kepada kepala Sekolah guru dan Siswa pada event tertentu yang dikemas dalam bentuk kegiatan yaitu; <i>Pengendalian dan Koordinasi Pelaksanaan UN</i> Secara tidak Langsung: yaitu melalui media cetak dan elektronik termasuk internet dan televisi.	
3.	Siapa yang memegang kebijakan/ditugaskan dalam melaksanakan kebijakan berkaitan dengan UN?	Yang melaksanakan sosialisasi adalah stakeholder pendidikan di Provinsi DKI Jakarta	
4.	Media apa yang digunakan untuk sosialisasi sosialisasi?	Cetak dan elektronik	
5.	Berapa lama kegiatan sosialisasi UN dilaksanakan ?	Kurang lebih 4 (empat) bulan sebelum pelaksanaan UN	
	Apa yang bapak ketahui tentang kebijakan UN	Salah satu alat untuk pemetaan pendidikan	
6.	Bagaimanan rekrutmen petugas pelaksanaan kegiatan UN?	Petugas terdiri dari: Petugas Prpvinsi: direkrut dari bagian bidang yang langsung menangani UN (SMA/SMK/SD,SMP) Petugas kotamadya: seluruh kepala seksi, kasubag dan Pejabat fungsiona Umum Senior Pos Rayon: Petugas dari sekretariat rayon sekolah Sekolah: Guru dan Karyawan Sekolah	

7.	Berapa jumlah personel	Sesuai dengan kebutuhan	
8.	Sejauh mana kewenangan yang dimiliki oleh petugas ?	Tergantung daritugas pokok yang tertuang dalam petunjuk teknis pelaksanaan UN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan	
9.	Jelaskan sarana dan prasarana yang menunjang kelancaran pelaksanaan UN ?	Komputer, Scanner, dll	
10	Bagaimana mekanisme pendistribusian berkas?	Berkas dikirim dari percetakan langsung ke Pos Rayon, kemudian sekolah mengambil berkas langsung ke Pos Rayon	
11.	Siapa yang terlibat dalam pendistribusian berkas?	Seluruh petugas ditambah polisi, keamanan dan pemantau independen	
12	Apakah masih kebocoran UN;?	Tidak	
13..	Bagaimana mekanisme pelaporan pelaksanaan UN?	Pelaporan dilakukan oleh sekolah, dikirim ke rayon, kemudian rayon merekap dan dikirimkan ke Dinas Pendidikan tembusan ke Suku Dinas Pendidikan Kota	
14.	Apakah Dinas Pendidikan memberikan dana operasional pelaksanaan UN ke sekolah?	Ya	
15.	Dari mana sumber dana pelaksanaan untuk: <ul style="list-style-type: none"> • Pengandaan soal • Transportasi (soal) ke sekolah • SPJ pengawasan dari dinas 	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBN dan APBD • APBD 	

TRANSKIP WAWANCARA

Responden: Kepala Sekolah SMAN 68 Jakarta (A)

Responden: Kepala Sekolah SMA Triwibawa Jakarta (B)

Responden: Kepala Sekolah SMA Dwi Saka Jakarta (C)

No.	Pertanyaan	Jawaban	Kode
1.	Dalam rangka mempersiapkan siswa optimal dalam menghadapi Ujian Nasional, apa yang telah dilakukan sekolah?	Materi kelas XII sudah diselesaikan di semester 5, semester 6 <i>drill</i> terus untuk TO (<i>Try Out</i>). TO itu dievaluasi guna diberikan analisis materi yang masih lemah untuk diulang lagi, terus TO lagi, diulang lagi, TO lagi.	A
		<p>Persiapannya kurang maksimal. Latar belakangnya soal input. Inputnya siswa kita ini adalah sisa daripada sisa. Artinya dia sudah daftar di sekolah yang dianggap favorit tidak lolos, turun lagi tidak lolos juga, paling terakhir kita. Dasar inputnya tidak memadai. Motivasi belajar mereka juga kurang. Ketiga, kenapa hal demikian bisa terjadi, faktor pendorong penyemangat mereka karena latar belakang pendidikan orangtua mereka minim</p> <p>Pertama untuk kesiapan tentu pembentukan panitia. Kemudian kita mengusulkan pengawas silang melalui rayon. Kita mengikuti raat sosialisasi dan kita kumpulkan orangtua siswa dann siswa untuk mendapatkan sosialisasi mengenai tata cara Ujian Nasional. Kemudian kami kedatangan oleh tim independen, dari kampus UNJ. Berikutnya tiap hari kami dimonitor oeh tim monitoring, dari Sudin Pendidikan, dari Dinas Kebudayaan Jakarta, dari Rayon, pengawas paket. Sebenarnya apda saat peaskaan lancar2 saja, tapi karena otak anak2 terbatas. Mereka tidak senang soal yang adanya wacana karena mereka</p>	B

		malas baca. Mereka tidak senang soal yng menghitung. Mereka senang menghafal.	
		<p>Dari tahun ke tahun kita selalu mengadakan pendalaman materi (PM). Kita kasih waktu empat bulan. Bulan April ujian, awal Desember sampai Maret selalu PM. <i>Kedua</i>, kita selalu menekankan ke guru-guru enam bidang studi UN, terus dan terus kita kasih materi ujian. <i>Ketiga</i>, guru-guru yang Ujian Sekolah seperti PPKN, komputer, agama, seni budaya, mohon mengalah. Tapi semua Allah yang atur. Kan kemarin 0% lulus. Untung Pemerintah menyelenggarakan UN Ulang, hasilnya lumayan separuh tertolong. Selain yang lulus ujian ulang ikut Paket. Masih ada dua orang yang tidak lulus. Untuk tahun 2010/2011 juga sama, meningkatkan PM. Saya juga selalu tekankan ke siswa untuk mengontak Allah, nomornya 44342. Shalat.</p> <p><i>kendala yang dihadapi dalam persiapan</i>, Ada. Dari 31 peserta UN, yang hadir PM selalu anak-anak itu. Paling 10, 11, 12 orang. Yang lainnya tidak pernah nongol. Tapi kalau saya <i>cross check</i> ke rumahnya, sudah jalan. PM jam 8 sampai jam 11. Tiga jam.</p>	C
2.	Try Out berapa kali?	Tahun lalu 6 atau 7 kali	A
		Belum dioptimalkan saja kita adakan pendalaman materi, kemudian kita ikut-sertakan <i>try out</i> sampai dua kali, tapi grafik belajar mereka sangat minim. Sehingga kami pernah menawarkan pada mereka lewat orangtuanya, “Kalau saja putra-putri Bapak-Ibu belum mampu mengikuti ujian, silakan ditunda dulu sehingga tahun depan bisa ada peluang ikut	B

		ujian.” Mereka tetap menghendaki ikut ujian. Mereka bilang, “Kalau tidak lulus Ujian Nasional, kita ikut Paket C saja.” Akhirnya <i>alhamdulillah</i> Pemerintah mengadakan Ujian Ulang tempo hari. Hampir 70% mereka lulus, untuk Ujian Ulang. Itu pun kami paksakan.	
		Tiap hari. Tapi kalau tanggal merah prei. Sekolah sudah kayak begini. Tetap saya memungut. Saya datang dari Bekasi, pakai transport. Kalau saya pribadi lebih mengalah. Saya <i>ngomong</i> ke orangtua murid. Tetapi <i>ngomong</i> doang, murid tidak ada yang... orangtua istilahnya...sudah tinggal besok ujian kita punguti PM biayanya Rp 150 ribu sebagai ganti uang transport dan snack atau makan siang, tetap saja yang bayar 4-5 orang. Akhirnya mau-mau saja orangtua, tapi kenyataannya yang bayar 3-4 orang. Akhirnya kita dan Yayasan mencari-cari untuk nomboki guru-guru. Pada saat gajian, Yayasan mencari utangan. Guru tidak mau tahu. Pas tanggal muda, guru berani menghadap saya. Minta honor. Saya punya rezeki, saya kasih. Ini sudah enam tahun (sejak 2005) jadi Kepala Sekolah. Pemerintah tetap kita harapkan memberi bantuan	C
3.	Yang mengadakan sekolah sendiri?	Macam-macam. Ada sekolah sendiri, ada bimbingan belajar, perguruan tinggi, MKKS. Dari perguruan tinggi wkt itu Dinas Pendidikan menjalin kerjasama dengan Guna Dharma utk persiapan pra UN.	A
		Sekolah sendiri, ada bimbingan belajar, perguruan tinggi, MKKS.	B
		Sekolah sendiri, ada bimbingan belajar, perguruan tinggi, MKKS	C

4.	Ada kendala dalam pelaksanaan ujian kemarin?	Ada kendala, kemarin tidak lulus 11 orang karena anak terjebak kepada bocoran soal dan tidak siap menghadapi ujian sehingga dia mengandalkan bocoran.	A
		Mereka kita giring dulu untuk belajar. Belum pulang, mereka sudah mau pulang. Belum dioptimalkan saja kita adakan pendalaman materi, kemudian kita ikut-sertakan try out sampai dua kali, tapi grafik belajar mereka sangat minim. Sehingga kami pernah menawarkan pada mereka lewat orangtuanya, "Kalau saja putra-putri Bapak-Ibu belum mampu mengikuti ujian, silakan ditunda dulu sehingga tahun depan bisa ada peluang ikut ujian."	B
		Ada. Dari 31 peserta UN, yang hadir PM selalu anak-anak itu. Paling 10, 11, 12 orang. Yang lainnya tidak pernah nongol. Tapi kalau saya <i>cross check</i> ke rumahnya, sudah jalan. PM jam 8 sampai jam 11. Tiga jam.	C
5.	Apa ada kebocoran dalam pelaksanaan UN?	Tidak. Itu sebenarnya prediksi saja. Justru karena dia percaya bocoran itu makanya tidak lulus, Mutlak tidak ada. Kalau ada bocoran, justru itu prediksi yang menyesatkan. Berikut kuncinya juga ada. Mungkin sekali nomor 1 cocok atau nomor 2 cocok, tapi itu <i>gambling</i> .	A
		Tidak ada. Tim independennya pun <i>stand by</i> di ruangan.	B
		Tidak ada.	C
6.	Itu Ujian Utama, kan? Saat Ujian Ulangan lulus semua?	Ya, lulus semua.	A
		Ada yang tidak lulus, yang tidak lulus ikutan paket C	B
		Ada yang tidak lulus, lalu ikut paket C	C

7.	Solusinya bagaimana, Pak?	Solusi terbagus ya pada ujian kedua itu. Kita siapkan lagi ujian kedua, jangan percaya pada bocoran. Lalu konsentrasi pada materi yang diujikan, utamanya yang belum lulus, harus lulus.	A
8.	Dapat informasi tentang UN dari mana?	Ikut rayon SMAN 77 Jakarta, Kami memang tim pengkaji juklak dan juknis sehingga setelah juklak dan juknis terusun, kami sosialisasikan bertingkat, dari pihak panitia penyelenggara, lalu turun kepada kepala sekolah, lalu guru bidang studi yang diujikan nasional dan semua masyarakat. Mass media juga perlu dipahami secara umum. Dari Dinas Pendidikan kemudian kepala bidang, kepala bagian, kepala sekolah, guru-guru bidang studi yang diujikan, lalu ke orangtua murid juga disosialisasikan.	A
		Dari Rayon, kemudian BSNP. Kami dapat informasi dari Rayon. Kami juga aktif jadi anggota MGMP. Seperti pada hari ini ada pertemuan di SMKN 27. Tahun lalu juga di SMKN 27.Jakarta.	B
		Terus terang kami tidak punya jaringan seperti sekolah-sekolah lain. Kami dapat info dari teman-teman. <i>Kalau informasi langsung, dari Rapat-rapat. Rayon</i>	C
9.	Apa Informasi yang disampaikan oleh pihak sekolah?	Pihak sekolah mengundang para orang tua dan siswa kelas XII, menjelaskan bagaimana pelaksanaan ujian nasional, kemudian pihak sekolah menawarkan sharing untuk saling mendukung agar pelaksanaan ujian nasional berjalan sesuai yang diharapkan,.....”antara lain menawarkan try out beserta pembiayaannya	B

10.	Jika ada perubahan UN, informasinya didapat dari mana?	Dari panitia penyelenggara tingkat dinas. Karena tingkat dinas berkewajiban membuat juklak dan juknis sekaligus mensosialisasikan. Untuk sekarang cepat sekali. Kita bisa akses ke internet di <i>website</i> dan <i>email</i> yang disajikan. Kita bisa buka kapan saja. Sedangkan informasi tentang UN kepada orangtua siswa dan siswa kelas XII pihak sekolah mengadakan sosialisasi untuk memberikan informasi tentang UN sesuai dengan juklak dan juknis.	A
		Kami dapat informasi dari Rayon. Kami juga aktif jadi anggota MGMP	B
		Dari teman, kepala sekolah. Apalagi saya dari sekolah seperti ini, harus super aktif ke teman-teman.	C
11.	Ada panitia tingkat sekolah. Bagaimana rekrutmennya?	Rekrutmennya guru-guru yang sesuai bidangnya dan sudah pernah jadi panitia. Kita tunjuk untuk kita SK-kan sehingga bisa melakukan tugas dengan sangat bertanggung jawab, personelnya Minimal tujuh.	A
		Dari guru-guru yang nota benenya mereka tidak ditugaskan untuk mengawas silang ke luar. Panitianya ada lima orang; saya, satu penanggung jawab, Wakil Kepala Sekolah, guru.	B
		Saya punya staf 17 orang. Kita kumpulkan nama-nama. Kita bikin panitia yang tidak boleh ke mana-mana. Lima orang. Lima orang kita kirim, lima orang kita panitia, lima orang duduk manis di rumah karena sudah sepuh.	C
12.	Kewenangan mereka apa?	Melaksanakan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) sesuai yang telah diatur dalam surat tugas itu.	A

		Membantu saja. Misalnya menyiapkan ruangan ujian, ruangan pengawas, peralatan sarana-prasarana yang dibutuhkan seperti kertas, blangko, antar-jemput soal ke Rayon.	B
		Kewenangannya, ikut apa yang telah ditugaskan oleh Dinas ke kami, terutama mengantarkan anak-anak supaya ujian dan bisa lulus. Misalnya Senin kita Ujian Nasional, hari Sabtu saya <i>briefing</i> teman-teman pengawas. Paling itu kewenangan saya; anak-anak saya bisa ujian mandiri, tidak numpang.	C
13.	Apa sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan UN?	Banyak, dari sarana-prasarana, perangkat soalnya, dari pemindaianya, penilaiannya dan sistem regulasi. Kami punya juklak dan juknis Pos (<i>Procedur Operational Standard</i>). Harus kita patuhi. Tim khusus yang ditunjuk oleh Dinas dan disahkan oleh Dinas. Soalnya dari BSNP membuat aturan bagaimana sistem penagwasan, sistem pemindaianya	A
		Untuk meja-kursi, 31 cukup. Ruangan saya bikin dua ruang. Ruang I 16, ruang II 15. Ruangan bisa kita pakai sesuai dengan petunjuk teknis yang diedarkan Dinas. Sarana lain, karena pengawas dari sekolah lain, sebulan sebelum ujian kita cat. Yang bolong ditambah.	C
14.	Bagaimana mekanisme pelaporannya?	Pelaporannya sangat cepat, <i>online</i> , terbuka, dan semuanya bisa tahu di bagian-bagian tertentu. Kita menggunakan sistem <i>online</i> . Dengan dibantu teknologi canggih ini sangat mudah. Pengumuman pun nanti <i>online</i> . Nggak perlu repot-repot, kumpul di sekolah untuk coret-core.	A

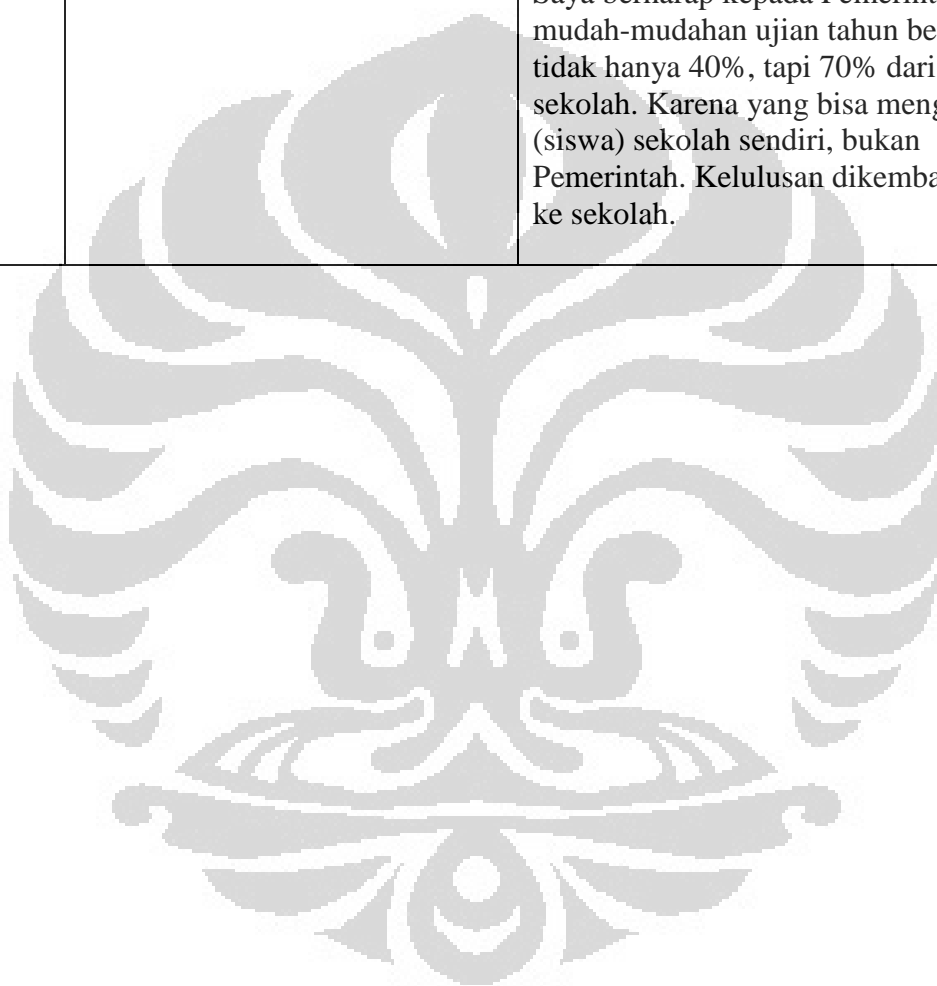
		Ada format blangko laporan harian. Laporan harian dibuat per bidang studi. Laporan kumulatif. Pada hari itu juga dikirim ke Rayon berbarengan kita mengantarkan lembar jawaban. Rayonnya di SMK 35 di Karet Tengsin, di belakang kuburan Karet.	B
		Pelaporannya, tiap hari hasil dari ujian kita lihat lalu kita kirim ke Rayon. Yang jadi kendala, ambil soal dan kirim soal pakai roda empat. Jadi menyewa taksi	C
15.	Ketika soal dikumpul, disegel lagi, lalu bagaimana? Apa dibawa ke rayon?	Di sistem yang ditunjuk dalam pos nanti. Kita ikuti saja. Kalau dikirim ke rayon kita ikuti. Lembar jawabannya ke perguruan tinggi yang ditunjuk, misalnya UNJ.	A
16.	Berapa dana dari Dinas Pendidikan per siswa?	Saya lupa <i>Dropping</i> dana untuk negeri dari Dinas Pendidikan Provinsi. Pusat tidak ada. Dana dari APBN , tapi sangat kecil. Kita harus nombok dari uang Komite sekolah. Karena penjaga ujian kita kasih transport, makan, kita <i>enak-enakin</i> .	A
		Ada. Dari tingkat Provinsi dan Pusat. Tahun lalu hanya sedikit. Hanya ada Rp 27 ribu per siswa dari Pusat. Dari tingkat 1 (provinsi) Rp 32.700. Sangat tidak cukup.	B
		Ada, membantu, tapi kurang. Rp 100 ribu per anak. Dari APBD kalau tidak salah Rp 16 ribu. Kalau dari APBN sisanya. Itu se-Indonesia sama. Tapi dengan pelaksanaan empat hari, kita sediakan teh, kopi, susu untuk pengawas dan makanan rada enak untuk pengawas.	C
17..	Apa ada pungutan kepada siswa dalam pelaksanaan UN?	Tidak ada.	A

		Tidak ada. Cuma adanya sistem silang itu. Kita panggil orangtua yang penghasilannya di atas Rp 2 juta. Ada saja yang membantu. Tidak ditetapkan besarnya berapa.	B
		<p>Tetap saya pungut. Uang PM per bulan per anak Rp 150 ribu. Di sini bukan uang ujian, tapi uang akhir tahun <i>ngomong</i>-nya. Uang praktik beli kertas sekian, tetapi uang akhir tahun untuk kelas tiga sekian.</p> <p>Kemarin juga dianggarkan untuk acara perpisahan atas permintaan murid. Totalnya hampir Rp 750 ribu.</p> <p>Jadi itu bukan untuk bayar Ujian Nasional saja, tapi semuanya? Iya. Sejak enam tahun ini saya pegang (Kepala Sekolah), ada sekitar 40-an ijazah belum diambil. Ada yang kurang uang.</p>	C
18.	Selain acara yang dapat memotivasi siswa seperti try out, ada lagi?	Kita mengundang motivator.	A
		<p>Kita senantiasa beri motivasi. Pokoknya tiada hari tanpa mengingatkan anak-anak bahwasanya ujian akhir di depan mata. “Tiada hari tanpa belajar. Tiap hari kalian masuk walaupun belum ujian, itu ujian. Anggap saja gurumu itu adalah pengawas.” Tetap kita berikan semangat, sehingga ketika tidak lulus di ujian pertama, karena semangat, akhirnya mereka punya motivasi untuk ikut ujian lagi. Akhirnya 70% mereka lulus.</p> <p>Kemudian dilanjutkan sisanya kami paksakan, kami daftarkan untuk ikut Paket C. Begitu pelaksanaan ujian Paket C, kami hubungi. Kaget juga orangtuanya, kok masih ada perhatian sekolah. Tanpa dipungut biaya, silakan berangkat.</p>	B

		<p>Rayon, di SMK 35. Kami siapkan transportnya, angkutannya. Berangkat, tinggal duduk manis di sana. Kami tunggu. Ditunggu oleh Kepala Sekolah dari pagi sampai siang. <i>Alhamdulillah</i> lulus semua. Cuma yang jadi laporan kami cuma 70% itu. Tiga puluh enam peserta ujian, <i>alhamdulillah</i> lulus semua. Bagaimana caranya kita harus berusaha, kita selamatkan anak-anak, selamatkan nama sekolah. Ada kesempatan, kita masuk. <i>Alhamdulillah</i> rekan-rekan dan Yayasan mendukung. Akhirnya semangat kita muncul.</p> <p>Untuk apa saja pengeluarannya? Persiapan saja kita harus menatar, memberikan pembinaan kepada guru-guru tentang teknik menyusun kisi-kisi. Mereka ikut bedah soal ke MGMP. Mereka harus menyusun naskah ujian. Naskah ujian kita bayar. Sekolah yang bayar, sudah ada anggarannya. Kemudian membeli kertas, mau <i>nge-print</i> naskah. Beli tinta. Tenaga yang <i>nge-print</i>. Turunnya dana setelah pelaksanaan. Kita harus nalangi dulu. Itu yang jadi kendala. Kita terpaksa minta bantuan dari Yayasan bagaimana caranya sehingga Yayasan punya inisiatif. Dipanggillah orangtua, siapa yang bisa membantu. Subsidi silang.</p> <p>Tiap upacara kita laksanakan. Kita berikan pengarahannya kemudian doa bersama. Baik di awal dan akhir upacara, diselipkan doa untuk kesuksesan siswa kelas 3</p>	
--	--	--	--

		Kamis besok saat <i>try out</i> terakhir, kita adakan doa bersama dan maulid. Selain PM, anak-anak kita motivasi untuk beli buku Panduan Ujian Nasional. Paling cuma separuh yang mau. Doa bersama ada.	C
19.	Acara lain seperti berdoa bersama?	Ada. Bahkan anak-anak Rohis mabit (malam bina iman dan takwa) di sini. Mengingat sambil belajar dan shalat tahajud di malam hari ketika malam Minggu.	A
		Tiap upacara kita laksanakan. Kita berikan pengarahannya kemudian doa bersama. Baik di awal dan akhir upacara, diselipkan doa untuk kesuksesan siswa kelas 3.	B
		Kamis besok saat <i>try out</i> terakhir, kita adakan doa bersama dan maulid. Selain PM, anak-anak kita motivasi untuk beli buku Panduan Ujian Nasional. Paling cuma separuh yang mau. Doa bersama ada	C
20.	Ada harapan terhadap pelaksanaan Ujian Nasional agar tiap tahun meningkat?	Mudah-mudahan saja untuk SMA 68 siswa-siswinya hasilnya meningkat	A
		<i>Pertama</i> , pelaksanaan pembuatan soal, kalau bisa, kita mendapatkan petunjuk dari BSNP, tetapi pembuatan soal dilakukan oleh sekolah masing-masing. Sebab standarisasi sekolah berbeda-beda. Triwibawa ini sekolah, benar di kota Jakarta, tetapi selangkah saja ke sekolah lain sudah jauh. Karena inputnya tadi, kemudian ekonomi mereka. Berikutnya adalah meningkatkan bantuan subsidi dari pemerintah agar sekolah seperti ini diperhatikan dan dibantu.	B

		<p>Selama ini kami hanya mendapatkan yang namanya BKMM. BKMM, kan, tidak seluruh siswa. Dari 112 siswa, hanya dapat 16 siswa. Itu pun disaring oleh kami yang benar-benar yatim-piatu dan miskin, Kami hanya dapat bantuan dari Dinas dalam bentuk BKMM.</p>	B
		<p>Saya berharap kepada Pemerintah mudah-mudahan ujian tahun besok tidak hanya 40%, tapi 70% dari sekolah. Karena yang bisa mengubah (siswa) sekolah sendiri, bukan Pemerintah. Kelulusan dikembalikan ke sekolah.</p>	C



TRANSKIP WAWANCARA

Responden: Guru Sekolah SMAN 68 Jakarta (A)

Responden: Guru Sekolah SMA Triwibawa Jakarta (B)

Responden: Guru Sekolah SMA Dwi Saka Jakarta (C)

No.	Pertanyaan	Jawaban	Kode
1.	Persiapan apa yang telah Anda lakukan agar siswa maksimal dalam menghadapi UN tahun lalu?	Memberikan materi yang sesuai SKL yang akan diujikan, jangan lari dari situ.	A
		Biasanya bapak-ibu guru mempersiapkan anaknya untuk melakukan <i>review</i> . <i>Review</i> materi dari kelas 1 sampai kelas 3. Kemudian melakukan <i>try out</i> . Ketiga, bintal (Pembinaan Mental)-nya diperbaiki atau disiapkan untuk menghadapi Ujian Nasional	A
		Sesuai dengan SKL.	A
		Kita membuat latihan-latihan soal. <i>Try Out</i> -nya, kan, banyak. <i>Try Out</i> dibahas. Ada pendalaman materi, selain ada tambahan jam, hari Sabtu. Latihan soal-soal dari kelas 1 sampai kelas 3.	A
		Diskusi mengenai semua materi yang diujikan, <i>try out</i> , pendalaman materi, Di kelas, apa yang dibutuhkan mereka, apa yang tidak diketahui mereka, apa yang mereka ingin tahu	A
		Dari semester awal dengan latihan-latihan soal, penggemblengan latihan soal UN, pendalaman materi sampai menjelang UN. Jadi tidak kurang dari sekolah, sudah maksimal, bagaimana supaya anak bisa lulus. Setiap hari. Dari masuk sekolah jam 7 dan pulang 12.30. Jam 14 siswa masuk kembali sampai jam 16. Itu berlangsung sampai Ujian Nasional. Kalau saya perhatikan, soal ujian nasional dari nomor 1 sampai 20	B

	<p>diambil dari kelas X. Kemudian 20-30 kelas XI. 30-40 soal kelas XII. Ujian Nasional soal yang paling banyak keluar kelas X. Ada dari buku panduan Ujian Nasional. Kemudian dari Kementerian Pendidikan Nasional. Buku-buku perpustakaan. Materi bukunya cukup banyak, Saya dapat dari internet tentang kisi-kisi Ujian Nasional lalu saya kasih fotokopi. Siswa disuruh belajar dipandu saya sesuai dengan kisi-kisi. Tahun kemarin saya selalu mengikuti MGMP Geografi-Sosiologi di SMA Negeri 1, selalu dapat kisi-kisi UN, kemudian saya bagikan ke siswa, saya pandu, saya ajarkan dari pertama sampai akhir.</p>	
	<p>Selama ini, sejak awal mereka kelas 3, saya sudah coba mulai cari latihan UN, fotokopi soal, bahas soal-soal. Bahasa Inggris itu ada dua poin dari UN; <i>listening</i> dan <i>reading</i>. Jadi membiasakan mereka mengerjakan soal <i>listening</i>-nya, pakai soal-soal tahun lalu. Kalau <i>reading</i>-ya fokus ke jenis-jenis <i>reading</i>. Bahas soal, dengarkan kaset soal <i>listening</i>.</p>	B
	<p>Kita tahu bahwa sekolah ini sekolah sederhana. Keterbatasan banyak hal. <i>Pertama</i>, buku pegangan anak. <i>Kedua</i>, fasilitas, seperti di sekeolah lain punya kamus dan buku-buku sastra. Kalau yang lainnya tidak masalah. Iya. Anak-anak juga keterbatasan biaya. Bimbel itu semestinya harus enam bulan sebelumnya. Tapi untuk di sini, untuk menarik biaya bimbel agak repot. Bimbel terbatas, paling di sini 2-3 bulan. Kalau sekolah lain enam bulan sebelum UN sudah bimbel. Seminggu sekali. Di sini bimbel pagi, kalau sore belajar</p>	C

		Kita, kan, pendalaman materi. Materi kelas 1 dan 2. Kita memberikan batasan-batasan kepada siswa, yang mau keluar itu apa. Seminggu satu kali. Kalau saya kebetulan dapat jadwalnya hari Kamis.	C
2.	Apa ada pelajaran tambahan yang diberikan?	Pelajaran tambahan tidak ada, tapi tetap kita beritahukan ke anak bahwa setiap mereka mengalami kendala, kita siap untuk melayani mereka, dengan datang ke ruang guru. Dan biasanya mereka datang. Sudah merupakan kebudayaan. Jadi mereka tidak sungkan lagi untuk datang. Di luar pun mereka boleh datang ke kita.	A
		Pendalaman materi ada, tambahan jam. Paling satu minggu bisa tambah sekitar empat jam, paling banyak untuk semua bidang studi. Didistribusikan ke hari-hari lain atau hari Sabtu. Saya kemarin pelajaran Ekonomi didistribusikan ke hari-hari yang lain. Ada juga yang hari Sabtu. Tergantung kebutuhan. Artinya bukan empat jam untuk tiap bidang studi. Jadi dalam satu minggu ditambahkan empat jam. Itu bisa bergantian. Belum tentu Ekonomi di minggu ini ada, di minggu depan tidak ada. Mesti selang-seling.	A
		Orientasi kita, kan, tidak cuma UN. Orientasi kita juga untuk masuk perguruan tinggi. Jadi soal kita ambil dari mana saja. Yang penting orientasinya ke SKL, fokusnya.	A
		Tidak ada, tetapi kami menyiapkan waktu dan kesempatan. Kalau anak butuh kami, kami siap melakukan. Pasti ada. Kita secara keseluruhan <i>try out</i> . Hasil <i>try out</i> didiskusikan. Kalau ada anak yang membutuhkan tambahan, mereka datang ke kita.	A

		Ada, itu bimbel. Maret ujian, bimbel dimulai bulan November. <i>Materi yang diberikan</i> Kita berdasarkan SKL. Biasanya SKL alat untuk memberitahu apa yang diujikan.	C
3.	Saat pelajaran tambahan, materi apa saja yang diberikan selain soal-soal kelas 1 sampai kelas 3?	Bimbel, materi dari pasar, atau materi dari sekolah lain (<i>change</i>), ada juga MKKS mengadakan. Dari mana saja boleh.	A
		Cuma itu saja. Semua soal kita ambil dari <i>Try Out</i> , soal-soal SNMPTN, soal-soal UN tahun lalu. Anak-anak boleh tanya soal-soal dari luar. Karena ada juga anak-anak di luar belajar, bimbel (bimbingan belajar). Pokoknya kita latihan soal dari kelas 1 sampai kelas 3. Biasanya kita lempar ke anak-anak, mana yang masih kurang, bab mana. Misalnya mereka minta Bab Larutan, lalu kita bahas soal Larutan secara garis besar.	A
4.	Apakah siswa diajarkan cara taktis mengerjakan soal, misalnya mengerjakan soal yang lebih gampang dulu?	Ada juga misalnya untuk menghemat waktu, kalau yang ditanyakan mengenai cerita, acapkali dia sudah tahu, jadi tidak perlu lagi fokus dengan teks. Boleh langsung dijawab yang dia tahu	A
		Saya kira setiap guru pasti akan menyiapkan anaknya secara totalitas, jadi hal seperti itu sudah diberikan.	A
		Oya, itu pasti. Pasti itu semua kita lakukan juga. Misalnya soal-soal yang keluar biasanya begini. Jadi dalam satu bab, kalau bab seperti ini soalnya begini, kita kasih tahu. Terus kalau cara gampang, kamu harusnya seperti ini, kita kasih tahu semua cara mengerjakan. Apa-apa yang perlu diperhatikan.	A

		Jelas. Misalnya soal nomor 1 mengenai soal, kalau yang sudah tahu coreti dulu yang sudah tahu. Berarti kalau yang tidak ada pasti hubungan <i>option</i> antara A, B, C, atau D, pasti ada kunci-kunci di mana nomor A salah, pasti ada faktor salah yang masuk <i>option</i> . Sudah diajarkan, harus.	A
		Itu selalu ada. Diajarkan cara-caranya. Menelaah soal misalnya dari bentuk soal seperti ini bagaimana mengerjakannya. Guru telah memberi sosialisasi dengan baik. Tidak ada istilah belum ada sosialisasi atau program belajar. Di sini sekuat tenaga.	B
		Iya. Untuk <i>listening</i> , dengarkan poin intinya di bagian mana, misalnya pertanyaannya seperti apa. Minimal mereka harus tahu dulu artinya. Kalau mereka sudah tahu artinya, enak, mengerjakannya paham. Kalau untuk <i>reading</i> ada juga trik-triknya. Jadi ambil pokok pikiran dari satu teks seperti apa	B
		Iya. Khususnya untuk Sosiologi, yang penting anak memahami pertanyaan. Kadang anak-anak suka terjebak, baru baca awalnya, langsung...	C
5.	Apa ada kendala yang dihadapi saat mempersiapkan siswa?	Tidak. Cuma menjadi satu kendala, saya, kan, mengajar Bahasa. Kita mengajarkan jenis teks ada bermacam-macam. Oke anak itu mengenal teks, Cuma tingkat kesulitan dari teks itu, kan, tidak bisa kita raba. Misalnya dia kutip teks, misalnya dari <i>Jakarta Post</i> , dibikin lagi teks yang dari <i>Times</i> . Jauh lebih sulit yang dari <i>Times</i> . Meskipun misalnya jenisnya...item, tapi tingkat kesulitannya, di situlah pembuat soal harus jeli. Seperti apa sih sebetulnya yang biasa untuk SMA. Kadang-	A

		<p>kadang sepertinya dia sudah melakukan, diujikan atau misalnya diberikan satu teks yang <i>recount</i>. <i>Recount</i> itu, kan, pengalaman. Tapi pengalaman itu, diambilnya dari teks dari mana, tingkat kesulitannya yang tidak sama. Kita juga sudah memberikan suatu strategi, apapun yang membaca sebanyak-banyaknya.</p>	
		<p>Ya pasti ada. Kendala itu tidak akan sama dari tahun ke tahun. Situasi siswa secara menyeluruh tidak akan sama dari tahun ke tahun. Kalau ditanya <i>treatment</i>-nya apa, tergantung situasi. Ya itu, memotivasi siswa agar mau belajar secara mandiri saja. Kalau dia sudah punya motivasi yang tinggi untuk belajar mandiri, sudah aman.</p>	A
		<p>Tidak ada, biasa-biasa saja, lancar-lancar saja karena kebetulan guru-gurunya bagus. Jadi pas kelas 3 tidak beban.</p>	A
		<p>Anak sendiri kurang ada minat belajar. Ini yang mengakibatkan anak tidak lulus Ujian Nasional. Dari sekolah yang namanya mendorong supaya 100% lulus terus ditingkatkan. Dari pendalaman materi sampai menjelang Ujian Nasional. Kemudian latihan-latihan soal UN, semuanya yang dilaksanakan oleh sekolah berjalan baik. Cuma dorongan dari orangtua dan diri sendiri murid kurang.</p>	B
		<p>Kendala pasti ada. Namanya siswa 30 lebih, pasti ada yang niat dan tidak niat. Tapi kebanyakan berminat untuk belajar. Yang tidak berminat cuma sedikit</p>	B

		<p>Kendalanya, mereka Bahasa Inggris agak lemah dalam mengartikan kata. Melihat teks sudah panjang, mereka malas baca dan tidak tahu artinya. Jadi susah buat mereka. Saya kasih triknya, misalnya pertanyaannya apa, difokuskan ke pertanyaannya. Kalau Bahasa Inggris ada soal pokok pikiran paragraf dua apa, langsung lihat paragraf dua-nya. Nanti cari <i>main idea</i>-nya.</p>	B
		<p>Pasti ada. Misalnya kalau sekolah bagus sudah punya buku pegangan, kalau di sini patokannya bahan <i>try out</i>. Kalau sekolah lain sudah disediakan buku-buku, buku <i>Detik</i>. Harganya mahal. Kalau anak disuruh beli buku <i>Detik</i>, kita tidak sampai hati karena keterbatasan ekonomi. Mungkin kita kendalanya itu buku-buku pegangan. Soal-soal yang di-<i>try out</i>-kan kita bedah dengan anak-anak. Yang lain anak-anak tidak punya</p>	C
		<p>Ya, saya biasanya mengajarkan ke anak, kita melihat soal-soal tahun lalu yang keluar apa saja. Yang sering apa, berarti ini yang harus kamu pelajari. <i>Kedua</i>, triknya cari soal yang lebih mudah. Kalau trik yang pertama tadi, kan, cari soal yang sering keluar. <i>Ketiga</i>, kita melihat soal yang sulit dan baru keluar. Yang sekarang sulit dalam Bahasa Indonesia adalah latar belakang tokoh. Anak tak lihat sisi positif dan negatif (tokoh), itu, kan, baru-baru saja. Itulah yang kita bedah</p>	
		<p>Ada. Kadang pada saat pendalaman materi anak-anak suka telat datang</p>	

6.	Menghadapi UN, anak-anak ada perasaan cemas dan gelisah. Bagaimana cara Anda memotivasi anak-anak?	<p>Pada umumnya anak-anak sekarang tidak begitu khawatir, karena mereka anak-anak yang sudah termotivasi. Mereka sudah punya rencana ke depan. Kalau dibanding dengan orang lain, jauh lebih siap. Jarang kita menemukan anak seperti itu. Bahkan sebetulnya mereka malah ingin menggarap soal lebih banyak. Tanpa kita suruh mereka mengerjakannya. Macam-macam. Minimal dari mulai mengalihkan suasana dari rutinitas ke sesuatu yang baru sehingga dia punya motivasi yang baru lagi untuk melakukan yang lebih baik, itu bisa beraneka. Tiap tahun mungkin bisa tidak sama, bukan hanya sekadar misalnya bintal Rohisnya dalam bentuk tausiyah-tausiyah keagamaan, tetapi bisa juga dengan pendekatan psikologis., Tidak. Biasanya guru bidang studinya. Tetapi kalau mau menyeluruh, sekolah yang mengadakan kegiatan</p>	A
		<p>Justru itu gunanya bintal tadi. Kita tidak lagi mempersiapkan setelah ujian, tetapi sebelum ujian. Kita siapkan supaya dia tidak ada soal. Usaha maksimal sebelum ujian. Setelah itu harus terima kenyataan. Karena sudah dilakukan yang terbaik.</p>	A
		<p>Tanpa kita motivasi mereka, dengan kita semangat mengajar, mereka termotivasi sendiri. Tidak terlalu berat memotivasi mereka. Kalau kelas 3 ya, mereka dengan sendirinya sudah giat. Karena anak-anak SMA 68 beda ya lingkungannya. Mereka sebenarnya sudah semangat tanpa kita terlalu menyemangati. Kita lihat, misalnya, kita masuk ke kelas, mereka sudah sedang melakukan latihan soal. Tanpa kita gerakan mereka sudah latihan soal-soal. Memang kelas 3 semangat sekali.</p>	A

		<p>Siswa SMA 68 tidak pernah (cemas dan takut) karena tiap masuk kita motivasi. Semangat, jangan sakit, makan makanan sehat. Sebelum ujian, hari Minggu jangan belajar, rekreasi dengan orangtua. Berdoa, <i>sharing</i> dengan orangtua. Kita harus memberi semangat itu. Mulai Januari lalu kita <i>try out</i>. Tiap dua minggu sekali kita <i>try out</i>. Hasil <i>try out</i> kita diskusikan. Sebelum <i>try out</i> kita diskusi. Anak-anak tidak ada rasa takut dan percaya diri banget. Anak ujian, kita dijamin, tidak ada yang menengok kiri-kanan, karena kemarin kita tekankan besok yang mengawas guru luar, jangan sampai mereka apriori terhadap sikapmu. Siswa SMA 68 tidak ada yang takut ujian, kecuali satu-dua orang yang punya sifat kayak begitu, susah berubah.</p>	A
		<p>Motivasi saya, selama kita yakin belajar sudah maksimal, <i>insya</i> Allah bisa selain usaha dan doa.</p>	B
		<p>Kita kalau mau berhasil, kan, harus usaha. Saya bilang ke anak-anak, kalau mau berhasil, usaha. Kalau usaha ada pengorbanan. Pengorbanannya banyak. Seperti biaya. <i>Kedua</i>, keinginan kamu sendiri. Kamu mau-tidak belajar dan berhasil. Kita perlu memotivasi mereka dengan mendorong mereka melihat sisi positif. Memang perlu memberi motivasi. Setelah itu siswa termotivasi? Waktu bimbel pertama, kan, pagi, yang datang paling berapa orang. Dari sekian anak yang datang sekian. Begitu kita memberikan motivasi-motivasi yang sifatnya membangun, mereka dari teman ke teman cerita, lumayanlah yang datang.</p>	C

		<p><i>Satu</i>, harus siap. Paling tidak apa yang sudah diberikan dipelajari. Kemudian, tidak usah takut, hadapi saja, yang penting kita usaha. Terus banyak beribadah. Puasa, kalau bisa, pada saat menghadapi ujian. Itu pesan saya ke anak</p>	C
7.	Apa ada hal lain selain itu?	<p>Ada. Dia tidak punya motivasi untuk belajar mandiri. Jadi bukan cuma belajar saja, tapi belajar mandiri. Artinya, tidak mungkin cukup guru menjelaskan semua hal. Maka dia yang harus menggali. Seberapa jauh gali yang dia bisa, tergantung ke motivasi dirinya masing-masing. Target-target yang dia ingin capai, kita, kan, hanya bisa mengarahkan dia, memfasilitasi dia, menemani dia, tapi sebatas dia tidak berusaha atau berusaha tidak maksimal, ya sebanyak itu pula yang dia dapat.</p>	A
		<p>Terus, memberi dorongan. Dorongan-dorongan itu dorongan apa saja. Belajar kelompok juga.</p>	B
8.	Apa harapan terhadap pelaksanaan ujian nasional?	<p>Saya berharap soal UN tidak semakin susah. Soalnya kasihan juga anak-anak banyak bebannya. Mereka tidak cuma harus fokus terhadap satu pelajaran, tapi banyak. Jangan terlalu susah soalnya</p>	B
		<p>UN bukan berarti menjebak anak, maksudnya mau menjebak anak agar tidak lulus dengan banyak cara yang mungkin buat mereka mudah tapi buat anak tidak mudah. Jadi tujuan nasional itu apa. Kalau memang tujuannya mau mengukur, jadi tidak menjatuhkan. Bukan untuk menjebak anak terus tidak lulus. Ada yang namanya ujian ulang, ujian Paket C, bukan itu. Kita mebuat anak selama tiga tahun belajar, ada akhir dia belajar itu, "O kita punya keterbatasan sampai sini." Tapi bukan berarti dengan tiga tahun dia</p>	C

		<p>sekolah terus berusaha, “Kamu itu tidak bisa apa-apa, dengan hasil ujian begini kamu bisa kelihatan tidak bisa apa-apa.” Bukan itu, tapi membuat anak berharap dengan Ujian Nasional, “Saya punya kemampuan sampai sini. Berarti kalau punya kemampuan segini saya bisa kuliah, dong. Kalau kemampuan segini bisa kerja, dong.” Jadi Ujian Nasional bukan semacam, kalau anak-anak bilang, momok menakutkan. Buatlah Ujian Nasional semacam anak-anak berusaha untuk, “Eh saya mau dong dengan tiga tahun saya belajar hasilnya begini.” Membuat anak semangat untuk ujian. Tidak membuat anak, “Aduh bagaimana dong kalau tidak lulus?” Justru di sinilah letak kelemahan Ujian Nasional; bukan buat anak menjadi semangat, tapi takut dan mendorong mereka untuk melakukan hal negatif. Misalnya beli kunci, karena mereka ketakutan tidak bakal lulus. Memang betul pemerintah memberi kisi-kisi dan standar kelulusan. Tapi mendengar kata-kata teman mereka dan kakak-kakak yang dulu kayaknya menyeramkan. Ada yang tidak lulus justru itu yang harus kita buat tidak terjadi. Tapi membuat anak itu, “Ah Ujian Nasional sama seperti ulangan umum, ulangan harian.” Memang mereka harus dimotivasi untuk belajar, tapi Ujian Nasional bukan akhir hidup mereka. Mereka masih punya jangka panjang, pendidikan masih jauh</p>	
		<p>Tahun kemarin soal A dan B. Tahun ini lima (A, B, C, D, dan E). Itu sudah membuat anak ketakutan. Harapan saya kalau bisa jangan sebanyak itu. A dan B sudah cukup. Itu membuat pusing anak dan guru. Mudah-mudahan soal tidak jauh dari yang kami bahas.</p>	<p>C</p>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mustofik Slamet, SE
NPM : 0906589614
Tempat/Tgl Lahir : Pemalang, 08 April 1969
Status : Kawin
Istri : Dwi Christiyani, ST
Anak : 1. Baghiz Maturrafif Christofik
2. Shaka Musyaffa Christofik
3. Makeina Malika Christofik
Nama Orang Tua : Busro
Alamat Rumah : Jl. Raya Pulo Gebang, Gang Restu No. 59 RT. 002 RW. 03
Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur 13950
Pekerjaan : PNS pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Pendidikan Formal : 1. SDN Wanarejan 1 Taman, Pemalang, Lulus Tahun
1984
2. SMPN 1 Taman, Pemalang, Lulus Tahun 1986
3. SMAN 2 Pemalang, Jawa Tengah, Lulus Tahun 1989
4. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas
Islam Indonesia Yogyakarta, Lulus Tahun 1997